

**PENGARUH *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*, KEPEMILIKAN
MANAJERIAL, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL DAN KOMPOSISI
KOMISARIS INDEPENDEN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN
(PERUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA TAHUN 2012-2016
YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi



Oleh:

MAULANA ANDIKA

14812144017

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
JURUSAN PENDIDIKAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2018**

**PENGARUH *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*, KEPEMILIKAN
MANAJERIAL, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL DAN KOMPOSISI
KOMISARIS INDEPENDEN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN
(PERUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA TAHUN 2012-2016
YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA)**

SKRIPSI

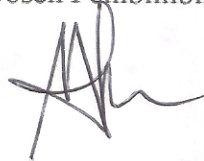
Oleh:

MAULANA ANDIKA

14812144017

Telah disetujui dan disahkan pada tanggal 3 Oktober 2018
Untuk dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Yogyakarta

Disetujui
Dosen Pembimbing



Muhammad Andryzal Fajar, S.E., M.Sc., Ak., CA.
NIP. 19870204 201404 1 002

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul:

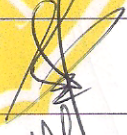

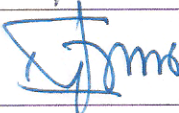
**PENGARUH *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*, KEPEMILIKAN
MANAJERIAL, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL DAN KOMPOSISI
KOMISARIS INDEPENDEN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN
(PERUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA TAHUN 2012-2016
YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA)**

Oleh:

MAULANA ANDIKA
NIM.14812144017

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 11 Oktober 2018
dan dinyatakan telah lulus

DEWAN PENGUJI

Nama Lengkap	Posisi	Tanda Tangan	Tanggal
Prof. Sukirno, M.Si., Ph. D.	Ketua Penguji		17/10/2018
Muhammad Andryzal Fajar, S.E., M.Sc., Ak., CA.	Sekretaris		18/10/2018
Abdullah Taman, S.E., Ak., M.Si., CA.	Penguji Utama		17/10/2018

Yogyakarta, 22 Oktober 2018

Fakultas Ekonomi

Universitas Negeri Yogyakarta

Dekan



Dr. Sugiharsono, M.Si

NIP. 19550328 198303 1 002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Maulana Andika
NIM : 14812144017
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Judul Skripsi : PENGARUH *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*, KEPEMILIKAN MANAJERIAL, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL DAN KOMPOSISI KOMISARIS INDEPENDEN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN (PERUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA TAHUN 2012-2016 YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA)

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat pendapat orang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan tata penulisan karya ilmiah yang lazim.

Yogyakarta, 3 Oktober 2018

Penulis,



Maulana Andika

NIM.14812144017

MOTTO

Ketika engkau sudah berada di jalur menuju Allah, maka berlارilah. Jika sulit bagimu, maka berlari kecillah. Jika kamu lelah, berjalanlah. Jika itupun tak mampu, merangkaklah. Namun jangan pernah berbalik arah atau berhenti.

(Imam Syafi'i).

Barang siapa yang keluar mencari ilmu maka ia berada di jalan Allah sampai ia kembali.

(HR. Tirmidzi)

PERSEMBAHAN

Dengan memanjatkan Puji Syukur kehadiran Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nya, karya sederhana ini penulis persembahkan kepada:

1. Bapak M. Luthfi dan Ibu Emi Suhaemi yang selalu mendukung dan mendoakanku. Semoga harapan terbesar putramu ini untuk membuatmu bahagia dapat tercapai.
2. Andini Prastiti, Aisyah, dan Arman Ramadhan, saudara yang selalu memberikan dukungan dan motivasi.
3. Seluruh keluarga besar yang mendoakan dan memberikan motivasi.
4. Anak asuh Panti Asuhan YPITR yang selalu mendoakan dan memberikan motivasi.

**PENGARUH *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*, KEPEMILIKAN
MANAJERIAL, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL DAN KOMPOSISI
KOMISARIS INDEPENDEN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN
(PERUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA TAHUN 2012-2016
YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA)**

Oleh:

Maulana Andika
NIM. 14812144017

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap Nilai Perusahaan, (2) pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Nilai Perusahaan, (3) pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Nilai Perusahaan, (4) pengaruh Komposisi Komisaris Independen terhadap Nilai Perusahaan, dan (5) pengaruh *Corporate Social Responsibility*, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, dan Komposisi Komisaris Independen terhadap Nilai Perusahaan.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan pertambangan batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2012-2016 yang berjumlah 22 perusahaan. Berdasarkan teknik pengambilan sampel dengan *purposive sampling* didapatkan sampel sebanyak 15 perusahaan. Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi dari laporan keuangan yang dipublikasikan di Bursa Efek Indonesia. Teknik analisis data menggunakan regresi linier sederhana dengan uji t, regresi linear berganda dengan uji F, dan koefisien determinasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) *Corporate Social Responsibility* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Nilai Perusahaan, dengan t hitung 5,523; koefisien regresi 83,532; dan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$; (2) Kepemilikan Manajerial berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan, dengan thitung -0,936; koefisien regresi -9,573; dan nilai signifikansi $0,352 > 0,05$; (3) Kepemilikan Institusional berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Nilai Perusahaan, dengan thitung 0,987; koefisien regresi 1,610; dan nilai signifikansi $0,327 > 0,05$; (4) Komposisi Komisaris Independen berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Nilai Perusahaan dibuktikan thitung 0,094; koefisien regresi 0,231 dan nilai signifikansi $0,926 > 0,05$; dan (5) *Corporate social responsibility*, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, dan Komposisi Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap Nilai Perusahaan, dengan nilai Fhitung 9,702; nilai signifikansi $0,000 < 0,05$; dan nilai $R^2 = 35,7\%$.

Kata kunci : *Corporate Social Responsibility*, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Komposisi Komisaris Independen, dan Nilai Perusahaan

**THE EFFECT OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY,
MANAGERIAL OWNERSHIP, INSTITUTIONAL OWNERSHIP AND
COMPOSITION OF INDEPENDENT COMMISSIONERS ON COMPANY
VALUE (COAL MINING COMPANIES IN 2012-2016 LISTED ON
INDONESIA STOCK EXCHANGE)**

By:

Maulana Andika
NIM. 14812144017

ABSTRACT

This study aims to determine: (1) the effect of Corporate Social Responsibility on Company Value, (2) the effect of Managerial Ownership on Company Value, (3) the effect of Institutional Ownership on Company Value, (4) the influence of the Independent Commissioner Composition on Company Value, and (5) the effect of Corporate Social Responsibility, Managerial Ownership, Institutional Ownership, and Composition of Independent Commissioners on Company Value.

This research is a type of quantitative research. The population in this study were coal mining companies listed on the Indonesia Stock Exchange in the period 2012-2016 which amounted to 22 companies. Based on the sampling technique with purposive sampling obtained a sample of 15 companies. Data collection techniques used documentation from financial reports published on the official website of the Indonesia Stock Exchange. The analysis technique used simple linear regression with t test, multiple linear regression with F test, and coefficient of determination.

The results of this study indicate that: (1) Corporate Social Responsibility has a positive and significant effect on Company Value, with tcount 5,523; regression coefficient 83,532; and significance value $0,000 < 0,05$; (2) Managerial ownership has a negative and insignificant effect on company value, with tcount -0,936; regression coefficient -9.573; and significance value $0.352 > 0.05$; (3) Institutional ownership has a positive and insignificant effect on Company Value, with tcount 0,987; regression coefficient 1.610; and significance value $= 0.327 > 0.05$; (4) The composition of the Independent Commissioners has a positive and insignificant effect on the Company Value, with tcount 0,094; regression coefficient 0.231; and significance value $0.926 > 0.05$; and (5) Corporate social responsibility, Managerial Ownership, Institutional Ownership, and Independent Commissioner Composition have a positive effect on Company Value, with Fcount 9,702; significance value $0,000 < 0,05$; and $R^2 = 35.7\%$.

Keywords : Corporate Social Responsibility, Managerial Ownership, Institutional Ownership, Composition of Independent Commissioners, and Corporate Values

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah SWT berkat limpahan dan rahmat-Nya penulis mampu menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi yang berjudul “Pengaruh *Corporate Social Responsibility*, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional dan Komposisi Komisaris Independen terhadap Nilai Perusahaan” dengan lancar. Peneliti menyadari sepenuhnya, tanpa bimbingan dari berbagai pihak, Tugas Akhir Skripsi ini tidak akan dapat diselesaikan dengan baik dan benar. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Sutrisna Wibawa, M.Pd., Rektor Universitas Negeri Yogyakarta.
2. Dr. Sugiharsono, M.Si., Dekan Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta
3. Dr. Denies Priantinah, M.Si., Ak., CA., Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
4. Muhammad Andryzal Fajar, S.E., M.Sc., Ak., CA. Dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, masukan, serta motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan dorongan serta bantuan selama penyusunan Tugas Akhir Skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam pengerjaan Tugas Akhir Skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat dibutuhkan guna menyempurnakan Tugas Akhir Skripsi ini. Akhirnya harapan penulis mudah-mudahan apa yang terkandung di dalam penelitian ini bermanfaat bagi semua pihak.

Yogyakarta, 3 Oktober 2018

Penulis,



Maulana Andika

NIM. 14812144017

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	9
C. Batasan Masalah.....	10
D. Perumusan Masalah.....	11
E. Tujuan Penelitian.....	11
F. Manfaat Penelitian.....	12
BAB II LANDASAN PUSTAKA.....	13
A. Kajian Pustaka.....	13
1. Nilai Perusahaan.....	13
2. <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i>	15
3. Teori Keagenan.....	19
4. Teori <i>Good Corporate Governance</i>	20
5. Indikator pengukuran <i>Good Corporate Governance</i>	22
B. Kajian Penelitian yang Relevan.....	29
C. Kerangka Berpikir.....	33

D. Paradigma Penelitian.....	36
E. Hipotesis Penelitian.....	38
BAB III METODE PENELITIAN.....	39
A. Jenis Penelitian.....	39
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	39
C. Populasi dan Sampel.....	39
D. Definisi Operasional.....	41
E. Metode Pengumpulan Data.....	44
F. Teknik Analisis Data.....	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	52
A. Hasil Penelitian.....	52
B. Hasil Uji Asumsi Klasik.....	57
C. Pengujian Hipotesis.....	62
D. Pembahasan.....	70
C. Keterbatasan Penelitian.....	79
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	81
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA.....	85
LAMPIRAN.....	90

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Sampel Penelitian.....	40
2. Daftar Perusahaan Pertambangan Batubara.....	53
3. Data Statistik Deskriptif.....	54
4. Hasil Uji Normalitas.....	58
5. Hasil Uji Multikolinearitas.....	58
6. Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	60
7. Uji Autokorelasi.....	62
8. Ringkasan Hasil Analisis Regresi Sederhana X1 terhadap Y.....	63
9. Ringkasan Hasil Analisis Regresi Sederhana X2 terhadap Y.....	64
10. Ringkasan Hasil Analisis Regresi Sederhana X3 terhadap Y.....	66
11. Ringkasan Hasil Analisis Regresi Sederhana X4 terhadap Y.....	67
12. Rangkuman Hasil Analisis Regresi Berganda.....	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Paradigma Penelitian.....	37
2. Grafik <i>Scatterplot</i> Heteroskedastisitas.....	61

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Daftar Sampel Perusahaan Pertambangan Batu Bara yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2016.....	91
2. Data CSR Tahun 2012-2016.....	92
3. Data Kepemilikan Manajerial Tahun 2012-2016.....	95
4. Data Kepemilikan Institusional Tahun 2012-2016.....	98
5. Data Komposisi Komisaris Independen Tahun 2012-2016.....	101
6. Data Nilai Perusahaan Tahun 2012-2016.....	103
7. Indikator Pengungkapan CSR.....	107
8. Hasil Uji Deskriptif.....	116
9. Hasil Uji Normalitas.....	117
10. Hasil Uji Multikolinieritas.....	118
11. Hasil Uji Autokorelasi.....	119
12. Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	120
13. Hasil Uji Regresi Sederhana (Hipotesis 1).....	121
14. Hasil Uji Regresi Sederhana (Hipotesis 2).....	122
15. Hasil Uji Regresi Sederhana (Hipotesis 3).....	123
16. Hasil Uji Regresi Sederhana (Hipotesis 4).....	124
17. Hasil Uji Regresi Berganda.....	125
18. CSR 2012-2016.....	126

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perusahaan merupakan organisasi dimana sumber daya diproses untuk menghasilkan barang atau jasa bagi pelanggan. Secara umum, tujuan perusahaan adalah memperoleh laba sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan. Meningkatnya nilai perusahaan dapat menarik minat para investor untuk menanamkan modalnya (Haruman, 2008). Nilai perusahaan merupakan persepsi investor terhadap perusahaan, yang sering dikaitkan dengan harga saham. Naik turunnya nilai perusahaan dapat dilihat dari harga sahamnya. Perusahaan yang memiliki tingkat nilai perusahaan yang tinggi dianggap dapat mensejahterakan pemegang saham, dan hal tersebut dapat menarik para investor untuk menanamkan modalnya di perusahaan tersebut.

Pada dasarnya nilai perusahaan dapat diukur melalui beberapa aspek, salah satunya adalah dengan harga pasar saham perusahaan, karena harga pasar saham perusahaan mencerminkan penilaian investor secara keseluruhan atas setiap ekuitas yang dimiliki. Harga pasar saham menunjukkan penilaian dari seluruh pelaku pasar, harga pasar saham bertindak sebagai barometer kinerja manajemen perusahaan. Jika nilai suatu perusahaan dapat diproksikan dengan harga saham, maka memaksimalkan nilai perusahaan sama dengan memaksimalkan harga pasar saham.

Terjadinya penurunan nilai perusahaan yang diakibatkan oleh turunnya harga saham perusahaan dapat dilihat dari kasus-kasus dalam perusahaan. Contohnya kasus yang menyebabkan penurunan harga saham secara signifikan di lima perusahaan pada tahun 2011-2013. Lima perusahaan tersebut yaitu: PT. Garda Tujuh Buana Tbk (GTBO), PT Bumi Resources Tbk (BUMI), PT. Krakatau Steel Tbk (KRAS), PT. Bakrieland Development Tbk (ELTY) dan PT. Garuda Indonesia (GIAA). Penurunan harga saham tersebut dikarenakan adanya masalah dalam laporan keuangan terutama mengenai kepemilikan saham dan tata kelola perusahaan yang kurang baik dimana *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan salah satu faktor yang menunjukkan baik atau tidaknya tata kelola perusahaan tersebut (www.liputan6.com).

Nilai perusahaan tidak hanya diukur dari tingkat perolehan harga pasar sahamnya saja. Berbagai penelitian menyimpulkan bahwa terdapat banyak faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya nilai suatu perusahaan. Beberapa faktor tersebut adalah pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan *Good Corporate Governance* (GCG). Pada saat banyak perusahaan menjadi semakin berkembang, maka pada saat itu pula kesenjangan sosial dan kerusakan lingkungan sekitarnya dapat terjadi, karena itu muncul pula kesadaran untuk mengurangi dampak negatif ini. Banyak perusahaan swasta kini mengembangkan apa yang disebut *Corporate Sosial Responsibility* (CSR). Penerapan CSR tidak lagi dianggap sebagai *cost*, melainkan investasi perusahaan (Erni, 2007).

Corporate Social Responsibility saat ini bukan lagi bersifat sukarela/komitmen yang dilakukan perusahaan di dalam mempertanggungjawabkan kegiatan perusahaannya, melainkan bersifat wajib/menjadi kewajiban bagi beberapa perusahaan untuk melakukan atau menerapkannya. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UU PT), yang disahkan pada 20 Juli 2007. Pasal 74 Undang-Undang Perseroan Terbatas menyatakan: (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). (2) TJSL merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya peraturan ini, perusahaan khususnya perseroan terbatas yang bergerak di bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam harus melaksanakan tanggung jawab sosialnya kepada masyarakat.

Sanksi pidana mengenai pelanggaran CSR pun terdapat didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) Pasal 41 ayat (1) yang menyatakan: “Barangsiapa yang melawan hukum dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak lima ratus juta

rupiah”. Selanjutnya, Pasal 42 ayat (1) menyatakan: “Barangsiapa yang karena kealpaannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak seratus juta rupiah” (Sutopoyudo, 2009).

CSR tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada *single bottom line*, yaitu nilai perusahaan (*corporate value*) yang direfleksikan dalam 4 kondisi keuangannya (*financial*) saja, tetapi tanggung jawab perusahaan harus berpijak pada *triple bottom lines*. *Bottom lines* lainnya selain finansial juga terdapat sosial dan lingkungan, karena kondisi keuangan saja tidak cukup menjamin nilai perusahaan tumbuh secara berkelanjutan (*sustainable*). Keberlanjutan perusahaan hanya akan terjamin apabila perusahaan memperhatikan dimensi sosial dan lingkungan hidup. Sudah menjadi fakta bagaimana resistensi masyarakat sekitar, di berbagai tempat dan waktu muncul ke permukaan terhadap perusahaan yang dianggap tidak memperhatikan aspek-aspek sosial, ekonomi dan lingkungan hidupnya.

Corporate social responsibility dapat digunakan sebagai alat marketing baru bagi perusahaan bila itu dilaksanakan berkelanjutan. Dengan melaksanakan CSR berarti perusahaan akan mengeluarkan sejumlah biaya. Biaya pada akhirnya akan menjadi beban yang mengurangi pendapatan sehingga tingkat profit perusahaan akan turun. Namun jika perusahaan melaksanakan CSR, citra perusahaan akan semakin baik sehingga loyalitas

konsumen makin tinggi. Seiring meningkatnya loyalitas konsumen dalam waktu yang lama, maka penjualan perusahaan akan semakin membaik, dan pada akhirnya dengan pelaksanaan CSR, diharapkan tingkat profitabilitas perusahaan juga meningkat (Satyo, 2005 dalam Sutopoyudo, 2009). Oleh karena itu, CSR berperan penting dalam meningkatkan nilai perusahaan sebagai hasil dari peningkatan penjualan perusahaan dengan cara melakukan berbagai aktivitas sosial di lingkungan sekitarnya.

Menurut Darwin (2004) dalam Rakhiemah dan Agustia (2009) perusahaan dapat memperoleh banyak manfaat dari praktik dan pengungkapan CSR apabila dipraktekkan dengan sungguh-sungguh, diantaranya: dapat memperlancar komunikasi dengan *stakeholders*, meluruskan visi, misi, dan prinsip perusahaan terkait dengan praktik dan aktivitas bisnis internal perusahaan, mendorong perbaikan perusahaan secara berkesinambungan sebagai wujud manajemen risiko dan untuk melindungi reputasi, serta untuk meraih *competitive advantage* dalam hal modal, tenaga kerja, *supplier*, dan pangsa pasar.

Selain konsep CSR, nilai perusahaan dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya adalah melalui tata kelola perusahaan yang baik *atau good corporate governance*. Konsep *corporate governance* timbul karena adanya keterbatasan dari teori keagenan dalam mengatasi masalah keagenan. *Corporate governance* juga merupakan suatu sistem untuk mengarahkan (*direct*) dan mengendalikan (*control*) suatu perusahaan atau korporasi (Setyaningrum, 2012). *Stakeholder* menghendaki adanya *Good Corporate*

Governance untuk memperoleh informasi sejelas-jelasnya mengenai perusahaan. Tumirin (2007), menyatakan adanya penerapan GCG akan mempengaruhi tercapainya nilai perusahaan. Penerapan GCG dapat didorong dari dua sisi, yaitu etika dan peraturan. Dorongan dari etika (*ethical driven*) datang dari kesadaran individu pelaku bisnis menjalankan praktik bisnis yang mengutamakan kelangsungan hidup perusahaan, kepentingan *stakeholder* dan menghindari cara-cara menciptakan keuntungan sesaat. Sedangkan dorongan dari peraturan (*regulatory driven*) “memaksa” perusahaan untuk patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Herawati (2008) serta Siallagan dan Machfoedz (2006) mengungkapkan bahwa mekanisme GCG biasanya ditandai dengan adanya kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan komisaris independen. Kepemilikan manajemen berperan sebagai pihak yang menyatukan kepentingan antara manajer dengan pemegang saham. Peningkatan kepemilikan manajerial membantu untuk menghubungkan kepentingan pihak internal dan pemegang saham, dan mengarah ke pengambilan keputusan yang lebih baik dan meningkatnya nilai perusahaan. Dengan demikian, aktivitas perusahaan dapat diawasi melalui kepemilikan manajerial yang besar (Endraswati, 2012). Kepemilikan institusional yang diartikan sebagai kepemilikan saham perusahaan oleh institusi atau lembaga tertentu (Tarjo, 2008). Kepemilikan institusional dapat meningkatkan nilai perusahaan, dengan memanfaatkan informasi, serta dapat mengatasi konflik

keagenan karena dengan meningkatnya kepemilikan institusional maka segala aktivitas perusahaan akan diawasi oleh pihak institusi atau lembaga. Tingginya jumlah kepemilikan institusional akan meningkatkan sistem kontrol perusahaan yang ditujukan guna meminimalisasi tingkat kecurangan akibat tindakan oportunistik pihak manajer yang nantinya dapat mengurangi nilai perusahaan. Peningkatan jumlah kepemilikan institusional ini juga ditujukan agar setiap aktivitas yang dilakukan diarahkan pada pencapaian nilai perusahaan yang tinggi (Haruman, 2008).

Komisaris independen dalam struktur organisasi biasanya beranggotakan dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan yang berfungsi untuk menyeimbangkan dalam pengambilan keputusan. Komisaris independen dapat bertindak sebagai penengah dalam perselisihan yang terjadi diantara para manajer internal dan mengawasi kebijakan manajemen serta memberikan nasihat kepada manajemen. Komisaris independen merupakan posisi terbaik untuk melaksanakan fungsi monitoring agar tercipta perusahaan yang *Good Corporate Governance* (Alfinur, 2016). Komisaris independen adalah komisaris yang bukan merupakan anggota manajemen, pemegang saham mayoritas, pejabat atau dengan kata lain berhubungan langsung dengan pemegang saham mayoritas suatu perusahaan yang mengawasi pengelolaan perusahaan (Surya dan Yustifandana, 2006). Fungsi dan sistem GCG yang baik akan membantu perusahaan untuk menarik investasi, mengumpulkan dana, memperkuat fondasi bagi kinerja

perusahaan, melindungi kerentanan perusahaan terhadap kesulitan keuangan di masa depan.

Kesuksesan suatu perusahaan banyak ditentukan oleh karakteristik strategis dan manajerial perusahaan tersebut. Strategi tersebut diantaranya juga mencakup strategi penerapan sistem *good corporate governance* dalam perusahaan. Indikator *Good Corporate Governance* meliputi Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, dan Dewan Komisaris Independen. Indikator *Good Corporate Governance* ini akan meningkatkan pengawasan bagi perusahaan menuju ke arah yang lebih baik. Diharapkan juga bahwa *Good Corporate Governance* dapat meningkatkan Nilai Perusahaan.

Peningkatan nilai perusahaan ini dapat tercapai apabila ada kerja sama antara manajemen perusahaan dengan pihak lain yang meliputi *shareholder* maupun *stakeholder* dalam membuat keputusan-keputusan keuangan dengan tujuan memaksimalkan modal kerja yang dimiliki. Apabila tindakan antara manajer dengan pihak lain tersebut berjalan sesuai, maka masalah diantara kedua belah pihak tersebut tidak akan terjadi. Dalam kenyataan penyatuan kepentingan kedua pihak tersebut sering kali menimbulkan masalah. Adanya masalah diantara manajer dan pemegang saham disebut masalah agensi (*agency problem*). Adanya *agency problem* tersebut akan menyebabkan tidak tercapainya tujuan keuangan perusahaan, yaitu meningkatkan nilai perusahaan dengan cara memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Untuk itu diperlukan sebuah control dari pihak

luar dimana peran *monitoring* dan pengawasan yang baik akan mengarahkan tujuan perusahaan sebagaimana mestinya.

Penelitian Amanti (2013) menunjukkan bahwa GCG memiliki efek negatif pada nilai perusahaan, hal ini dimungkinkan karena perusahaan hanya berlaku untuk memenuhi GCG formal, sehingga kepemilikan manajerial tidak memberikan nilai tambah kepada perusahaan dan keberadaan komisaris independen tidak menunjukkan perbaikan kinerja perusahaan. Penelitian ini mengacu pada penelitian Titah Kinanti Kusumaningtyas (2015) mengenai pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap nilai perusahaan yang terdaftar pada indeks sri kehati. Dalam penelitian Titah Kinanti Kusumaningtyas, komponen pengukuran *Good Corporate Governance* terdiri dari Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, dan Komisaris Independen. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang saya lakukan ini adalah tidak digunakannya kualitas audit, tetapi menambahkan variabel *Corporate Social Responsibility* pada variabel independennya. Oleh karena itu, penelitian ini berjudul **Pengaruh *Corporate Social Responsibility*, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional dan Komposisi Komisaris Independen terhadap Nilai Perusahaan. (Perusahaan Pertambangan Batubara Tahun 2012-2016 yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia).**

B. Identifikasi Masalah

1. Terjadinya penurunan nilai perusahaan yang ditandai dengan penurunan harga saham dikarenakan adanya masalah dalam laporan

keuangan terutama mengenai kepemilikan saham dan tata kelola perusahaan yang kurang baik.

2. Tanggung jawab perusahaan harus berpijak pada *triple bottom lines* yaitu tanggung jawab perusahaan pada aspek sosial, lingkungan dan keuangan.
3. Tinggi rendahnya nilai perusahaan salah satunya dipengaruhi oleh pengungkapan *Corporate Social Responsibility* dan *Good Corporate Governance*.
4. Pada tanggal 20 juli 2007 pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas yang mengatur kewajiban perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan atau lebih dikenal *Corporate Social Responsibility* (CSR).
5. Konflik keagenan yang muncul antara manajer dan pemegang saham dapat menurunkan nilai perusahaan.

C. Batasan Masalah

Mengingat begitu kompleksnya permasalahan diatas, peneliti akan membatasi pada lima komponen dalam penelitian ini. Lima komponen tersebut yaitu *Corporate Social Responsibility*, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Komposisi Komisaris Independen dan Nilai Perusahaan. Hal ini dilakukan agar penelitian lebih fokus dan tidak menyimpang dari permasalahan yang telah diuraikan di atas.

D. Perumusan Masalah

1. Apakah *Corporate Social Responsibility* berpengaruh terhadap nilai perusahaan?
2. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap nilai perusahaan?
3. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap nilai perusahaan?
4. Apakah komposisi komisaris independen berpengaruh terhadap nilai perusahaan?
5. Apakah *corporate social responsibility*, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan komposisi komisaris independen berpengaruh terhadap nilai perusahaan?

E. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap nilai perusahaan.
2. Mengetahui pengaruh kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan.
3. Mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap nilai perusahaan.
4. Mengetahui pengaruh komposisi komisaris independen terhadap nilai perusahaan.

5. Mengetahui pengaruh *Corporate Social Responsibility*, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan komposisi komisaris independen terhadap nilai perusahaan.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi penulis, penelitian ini berguna untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan. Hal ini merupakan aplikasi dari teori yang di dapat dari perkuliahan umum.
2. Bagi perusahaan, memberikan gambaran mengenai pentingnya tanggung jawab sosial perusahaan dan sebagai pertimbangan dalam pembuatan kebijakan perusahaan untuk lebih meningkatkan kepeduliannya kepada lingkungan sosial.
3. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan referensi penelitian terhadap mata kuliah manajemen keuangan khususnya dalam hal Indikator *Good Corporate Governance* (Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, dan Komposisi Komisaris Independen), Nilai Perusahaan, dan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

BAB II

LANDASAN PUSTAKA

A. Kajian Pustaka

1. Nilai Perusahaan

Nilai perusahaan dalam penelitian ini didefinisikan sebagai nilai pasar, seperti halnya penelitian yang pernah dilakukan oleh (Nurlela dan Islahuddin, 2008), karena nilai perusahaan dapat memberikan kemakmuran pemegang saham secara maksimum apabila harga saham perusahaan meningkat. Semakin tinggi harga saham, maka makin tinggi kemakmuran pemegang saham. Untuk mencapai nilai perusahaan umumnya para pemodal menyerahkan pengelolaannya kepada para profesional. Para profesional diposisikan sebagai manajer ataupun komisaris (Nurlela dan Islahuddin, 2008).

Menurut Samuel (2000) dalam Kusumadilaga (2010) menjelaskan bahwa *enterprise value* (EV) atau dikenal juga sebagai *firm value* (nilai perusahaan) merupakan konsep penting bagi investor, karena merupakan indikator bagi pasar menilai perusahaan secara keseluruhan. Sedangkan menurut Wahyudi (2005) dalam Kusumadilaga (2010) menyebutkan bahwa nilai perusahaan merupakan harga yang bersedia dibayar oleh calon pembeli andai perusahaan tersebut dijual. Dalam penilaian perusahaan terkandung unsur proyeksi, asuransi, perkiraan, dan *judgment*. Ada beberapa konsep dasar penilaian yaitu: nilai

ditentukan untuk suatu waktu atau periode tertentu; nilai harus ditentukan pada harga yang wajar; penilaian tidak dipengaruhi oleh kelompok pembeli tertentu. Secara umum banyak metode dan teknik yang telah dikembangkan dalam penilaian perusahaan, di antaranya adalah: a) pendekatan laba antara lain metode rasio tingkat laba atau *price earning ratio*, metode kapitalisasi proyeksi laba; b) pendekatan arus kas antara lain metode diskonto arus kas; c) pendekatan dividen antara lain metode pertumbuhan dividen; d) pendekatan aktiva antara lain metode penilaian aktiva; e) pendekatan harga saham; f) pendekatan *economic value added* (Suharli, 2006).

Nilai perusahaan menggambarkan seberapa baik atau buruk manajemen mengelola kekayaannya, hal ini bisa dilihat dari pengukuran kinerja keuangan yang diperoleh. Suatu perusahaan akan berusaha untuk memaksimalkan nilai perusahaannya. Peningkatan nilai perusahaan biasanya ditandai dengan naiknya harga saham di pasar (Rahayu, 2010). Rasio-rasio keuangan dapat untuk mengetahui nilai pasar perusahaan yang dapat memberikan indikasi bagi manajemen mengenai penilaian para investor di masa lalu dan prospeknya di masa mendatang (Martina, 2012). Ada beberapa rasio yang dapat digunakan untuk mengukur nilai pasar perusahaan, salah satunya adalah *Price to Book Value*.

Menurut Hermawati (2010) *Price to Book Value* (PBV) adalah angka rasio yang menjelaskan seberapa kali seorang investor bersedia

membayar sebuah saham untuk setiap nilai buku per sahamnya. PBV diperoleh dengan cara perbandingan nilai pasar yang diukur dengan harga saham penutupan, terhadap nilai buku (*book value*) memberikan penilaian akhir dan mungkin yang paling menyeluruh atas status pasar saham perusahaan. *Book Value* dihitung dengan membagi nilai bersih (*net worth*) perusahaan dengan jumlah yang beredar. Nilai bersih adalah selisih antara total aktiva dengan total kewajiban (*liabilities*) suatu perusahaan (Handoko, 2010).

Rasio ini mengukur nilai yang diberikan pasar keuangan kepada manajemen dan organisasi perusahaan sebagai sebuah perusahaan yang terus tumbuh. Semakin tinggi PBV berarti pasar percaya akan prospek perusahaan tersebut.

2. *Corporate Social Responsibility (CSR)*

Istilah CSR mengacu pada bagaimana perusahaan bertanggung jawab dalam mengelola dampak dari proses kegiatan bisnis terhadap *stakeholder* dan memberikan hasil yang positif kepada masyarakat. CSR dapat didefinisikan sebagai konsep dalam mengoperasikan bisnis dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti etika, hukum, komersial, dan sosial. Di sisi lain, komisi Eropa mendefinisikan CSR sebagai konsep dimana perusahaan memutuskan secara sukarela untuk berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang lebih baik dan lingkungan yang bersih serta meningkatkan kepedulian sosial dan lingkungan terhadap *stakeholder*. (Fountaine, 2013).

Corporate social responsibility (CSR) atau pertanggung-jawaban sosial perusahaan adalah mekanisme bagi suatu organisasi untuk secara sukarela mengintegrasikan perhatian terhadap lingkungan dan sosial ke dalam operasinya dan interaksinya dengan *stakeholders*, yang melebihi tanggung jawab organisasi di bidang hukum (Darwin, 2004 dalam Kusumadilaga, 2010).

Corporate social responsibility merupakan komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk kontribusi dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dengan adanya praktik *Corporate Social Responsibility* maka diharapkan nilai perusahaan akan baik dimata masyarakat. Perusahaan besar dan memiliki biaya keagenan yang lebih besar tentu akan mengungkapkan informasi yang lebih luas hal ini dilakukan untuk mengurangi biaya keagenan yang dikeluarkan (Martina, 2012).

Menurut Daniri (2007) dalam Rahayu (2010), CSR lahir dari desakan masyarakat atas perilaku perusahaan yang biasanya selalu fokus untuk memaksimalkan laba, menyejahterakan para pemegang saham., dan mengabaikan tanggung jawab sosial seperti perusakan lingkungan, eksploitasi sumber daya alam, dan lain sebagainya. Pada intinya, keberadaan perusahaan berdiri secara berseberangan dengan kenyataan kehidupan sosial. Konsep dan praktik CSR saat ini bukan lagi dipandang sebagai suatu *cost center* tetapi juga sebagai suatu

strategi perusahaan yang dapat memacu dan menstabilkan pertumbuhan usaha secara jangka panjang. Oleh karena itu penting untuk mengungkapkan CSR dalam perusahaan sebagai wujud pelaporan tanggung jawab sosial kepada masyarakat.

Menurut *The World Business Council for Sustainable Development* (WBCSD), *Corporate Social Responsibility* atau tanggung jawab sosial perusahaan didefinisikan sebagai komitmen bisnis untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan, melalui kerja sama para karyawan serta perwakilan mereka, keluarga mereka, komunitas setempat maupun masyarakat umum untuk meningkatkan kualitas kehidupan dengan cara yang bermanfaat baik bagi bisnis sendiri maupun untuk pembangunan. Perusahaan besar memiliki biaya keagenan yang lebih besar tentu akan mengungkapkan informasi yang lebih luas hal ini dilakukan untuk mengurangi biaya keagenan yang dikeluarkan (Kusumadilaga, 2010).

Pertanggungjawaban sosial perusahaan diungkapkan di dalam laporan yang disebut *Sustainability Reporting*. *Sustainability Reporting* adalah pelaporan mengenai kebijakan ekonomi, lingkungan dan sosial, pengaruh dan kinerja organisasi dan produknya di dalam konteks pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). *Sustainability Reporting* meliputi pelaporan mengenai ekonomi, lingkungan dan pengaruh sosial terhadap kinerja organisasi (ACCA, 2004 dalam Kusumadilaga, 2010). *Sustainability report* harus menjadi dokumen

strategik yang berlevel tinggi yang menempatkan isu, tantangan dan peluang *Sustainability Development* yang membawanya menuju kepada *core business* dan sektor industrinya.

Dalam gagasan tanggung jawab sosial, perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada *single bottom line*, yaitu nilai perusahaan (*corporate value*) yang direfleksikan dalam kondisi keuangannya (*financial*) saja. Tanggung jawab perusahaan harus berpijak pada *triple bottom lines*. Disini *bottom lines* lainnya, selain finansial adalah sosial dan lingkungan. Kondisi keuangan saja tidak cukup menjamin nilai perusahaan tumbuh secara berkelanjutan (*sustainable*). Keberlanjutan perusahaan hanya akan terjamin apabila perusahaan memperhatikan dimensi sosial dan lingkungan hidup (Handoko, 2010). Menurut Teguh (2006), menyebutkan program-program *Corporate Social Responsibility* dapat dikelompokkan atas tiga aspek, yaitu:

a. Program Sosial

Program sosial merupakan program perusahaan yang melakukan kegiatan kedermwanaan untuk membangun masyarakat dan meningkatkan taraf hidup manusia. Di dalam program sosial ada berbagai macam program yang dapat dijalankan oleh perusahaan, diantaranya: sumbangan kepada korban bencana alam, sumbangan kepada pesantren dan panti asuhan, beasiswa pendidikan, dan pelayanan kesehatan umum.

b. Program Lingkungan

Program lingkungan merupakan program perusahaan yang bertujuan untuk menjaga ekosistem dan lingkungan agar terjaga dari kerusakan dan meminimalisir terjadinya polusi akibat dari aktivitas perusahaan. Program lingkungan memiliki berbagai program yang dapat dijalankan oleh perusahaan, yaitu penanaman pohon, kampanye lingkungan hidup, dan menghasilkan produk yang ramah lingkungan.

c. Program Ekonomi

Pada saat ini, perusahaan pada aktivitasnya tidak lagi berusaha untuk meningkatkan nilai keuntungan sebesar-besarnya, akan tetapi harus dapat memberikan kemajuan ekonomi bagi para stakeholdernya. Program ekonomi merupakan program perusahaan yang melakukan tindakan untuk terjun langsung di dalam masyarakat untuk membantu memperkuat ketahanan ekonomi dan menjadikan masyarakat yang tangguh dan mandiri.

3. Teori Keagenan

Teori keagenan dapat menjelaskan bagaimana pihak-pihak yang terlibat dalam perusahaan akan berperilaku, karena pada dasarnya antara *agent* dan *principal* memiliki kepentingan yang berbeda yang menyebabkan terjadinya konflik keagenan (*agent conflict*). Pada dasarnya, konflik keagenan terjadi karena adanya pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian perusahaan. Adanya konflik kepentingan

antara investor dan manajer menyebabkan munculnya *agency cost* yaitu biaya *monitoring* yang dikeluarkan oleh *principle*. Menurut Jensen dan Meckling (1976) dalam Kusumaningtyas (2015), adanya masalah keagenan memunculkan biaya agensi yang terdiri dari:

- a. The monitoring expenditure by the principle (monitoring cost).*
- b. The bounding expenditure by the agent (bounding cost).*
- c. The residual loss.*

4. Teori *Good Corporate Governance*

Good Corporate Governance didefinisikan sebagai sistem mengenai bagaimana perusahaan diarahkan dan dikontrol. Hal ini mengacu pada distribusi hak dan tanggung jawab di antara pemangku kepentingan seperti dewan, manajer, pemegang saham, pelanggan, karyawan dalam aturan dan prosedur pembuatan keputusan. Dengan demikian, tujuan dan pemantauan kinerja perusahaan dapat terlaksana dengan baik. Selain itu, GCG juga dapat didefinisikan sebagai seperangkat mekanisme dimana investor luar dapat dilindungi dari pengambilalihan oleh struktur dalam perusahaan (termasuk manajemen, kepentingan keluarga dan pemerintah. (Mudashiru, dkk. 2014).

Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia-FCGI* (2006) tidak membuat definisi tersendiri tetapi mengambil definisi dari *Cadbury Committee of Uinter Kingdom*, yang kalau diterjemahkan adalah: seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara

pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan.

Menurut Sukrisno Agoes (2006) mendefinisikan tata kelola perusahaan yang baik sebagai suatu sistem yang mengatur hubungan peran dewan komisaris, peran direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya.

Dalam hubungannya dengan tata kelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN), menteri Negara BUMN mengeluarkan Keputusan Nomor Kep-117/M-MBU/202 tentang penerapan GCG (Tjager dkk., 2003). Ada lima prinsip menurut keputusan ini, yaitu:

a. Kewajaran (*fairness*)

Perlakuan yang adil dan setara didalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku.

b. Transparansi

Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materil dan relevan mengenai perusahaan.

c. Akuntabilitas

Kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

d. Pertanggungjawaban

Kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku.

e. Kemandirian

Suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

5. Indikator pengukuran *Good Corporate Governance*

Indikator pengukuran *Good Corporate Governance* yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Kepemilikan manajerial

Menurut Jensen dan Meckling (dalam Kusumaningtyas, 2015) menyatakan bahwa mekanisme untuk mengatasi konflik keagenan antara lain meningkatkan kepemilikan insider (*insider ownership*) sehingga dapat mensejajarkan kepentingan pemilik dengan manajer. Kepemilikan manajerial adalah besarnya saham yang dimiliki manajemen dari total saham yang beredar. Kepemilikan saham yang

besar dari segi nilai ekonomisnya memiliki insentif menyelaraskan kepentingan manajemen dan principal. Kepemilikan manajerial juga dapat dikatakan sebagai situasi yang didalamnya manajer sekaligus sebagai pemegang saham perusahaan yang ditunjukkan dengan persentase kepemilikan saham perusahaan oleh manajer.

Kepemilikan manajerial merupakan kondisi di mana manajer memiliki saham perusahaan atau dengan kata lain manajer tersebut sekaligus sebagai pemegang saham perusahaan (Tarigan, Josua dan Yulius Yogi Christiawan, 2007: 2). Wahidahwati (2002: 607) mendefinisikan kepemilikan manajerial sebagai tingkat kepemilikan saham pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan, misalnya direktur, manajemen, dan komisaris. Dari berbagai pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kepemilikan manajerial merupakan kondisi di mana manajer perusahaan merangkap jabatan sebagai manajemen perusahaan sekaligus pemegang saham yang turut aktif dalam pengambilan keputusan.

Manajer dalam menjalankan operasi perusahaan seringkali bertindak bukan untuk memaksimumkan kemakmuran pemegang saham, melainkan justru tergoda untuk meningkatkan kesejahteraannya sendiri. Kondisi tersebut akan mengakibatkan munculnya perbedaan kepentingan antara pemegang saham dengan manajerial. Konflik yang disebabkan oleh pemisahan antara kepemilikan dan fungsi pengelolaan dalam teori keuangan disebut

konflik keagenan atau *agency conflict* (Luciana Spica Almilia dan Meliza Silvy, 2006: 2).

Situasi tersebut di atas tentunya akan berbeda jika kondisi manajer juga sekaligus sebagai pemegang saham. Secara teoritis ketika kepemilikan manajerial rendah maka insentif terhadap kemungkinan terjadinya perilaku oportunistik manajer akan meningkat. Adanya kepemilikan manajerial dipandang dapat menyelaraskan potensi perbedaan kepentingan antara pemegang saham luar dengan manajemen (Jensen dan Meckling, 1976: 339). Selaras dengan Tarigan, Josua dan Yulius Yogi Christiawan (2007: 2) yang menyatakan bahwa dalam perusahaan dengan kepemilikan manajerial, manajer yang sekaligus pemegang saham tentunya akan menyelaraskan kepentingannya sebagai manajer dengan kepentingannya sebagai pemegang saham. Dengan demikian, manajer akan bertindak secara hati-hati dalam mengambil keputusan karena mereka akan turut menanggung hasil keputusan yang diambil.

Pada kepemilikan yang menyebar, masalah keagenan terjadi antara pihak manajemen dengan pemegang saham. Hal ini menyebabkan pemegang saham memiliki kekuasaan dan menyerahkannya kepada manajer. Sebagai konsekuensinya, manajer menuntut kompensasi yang tinggi sehingga berdampak pada meningkatnya biaya keagenan. Pada kondisi ini, konflik keagenan

diatasi dengan meningkatkan kepemilikan manajerial (Luciana Spica Almilia dan Meliza Silvy, 2006: 2).

Manajer mendapat kesempatan untuk terlibat pada kepemilikan saham dengan tujuan untuk menyelaraskan dengan pemegang saham. Oleh karena pendanaan dengan sumber dana internal lebih efisien dibanding pembiayaan dengan sumber daya eksternal maka melalui kebijakan tersebut manajer diharapkan menghasilkan kinerja yang baik serta mengarahkan dividen pada tingkatan yang rendah. Penetapan dividen yang rendah akan membuat perusahaan memiliki laba ditahan yang tinggi sehingga memiliki sumber dana internal relatif tinggi (Chen dan Steiner melalui Kartika Nuringsih, 2005: 108).

b. Kepemilikan institusional

Kepemilikan institusional adalah besarnya jumlah saham yang dimiliki institusi dari total saham beredar. Adanya kepemilikan institusional dapat memantau secara profesional perkembangan investasinya sehingga tingkat pengendalian terhadap manajemen sangat tinggi yang pada akhirnya dapat menekan potensi kecurangan. Pemegang saham institusional diantaranya mencakup perusahaan, asuransi, dana pensiun, dan reksadana. Faisal (2005) menyatakan bahwa semakin besar kepemilikan institusional maka semakin efisien pemanfaatan asset perusahaan dan dilakukan oleh manajemen. Menurut Tarjo (2008) bahwa kepemilikan institusional berpengaruh

signifikan terhadap nilai pemegang saham. Hal ini berarti menunjukkan, bahwa kepemilikan institusional menjadi mekanisme yang handal sehingga mampu memotivasi manajer dalam meningkatkan kinerjanya yang pada akhirnya dapat meningkatkan nilai perusahaan.

Kepemilikan institusional memiliki peranan yang sangat penting dalam meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi antara manajer dan pemegang saham. Keberadaan investor institusional dianggap mampu menjadi mekanisme monitoring yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil oleh manajer. Hal ini disebabkan investor institusional terlibat dalam pengambilan yang strategis perusahaan (Jensen, M.C. dan Meckling, W.H., 1976: 372-373). Semakin besar kepemilikan institusi maka akan semakin besar kekuatan suara dan dorongan dari institusi tersebut untuk mengawasi manajemen. Akibatnya, akan memberikan dorongan yang lebih besar untuk mengoptimalkan nilai perusahaan sehingga kinerja perusahaan akan meningkat. Kinerja yang meningkat tersebut akan menguntungkan bagi pemegang saham karena dengan kata lain pemegang saham akan mendapatkan banyak keuntungan berupa dividen (Mayang Patricia, 2014: 16).

Pengawasan yang dilakukan oleh investor institusional akan menjamin kemakmuran pemegang saham. Pengaruh kepemilikan institusional sebagai agen pengawas ditekan melalui investasi

mereka yang cukup besar dalam pasar modal. Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat menghalangi perilaku oportunistik manajer (Vera Kusumawati, 2011: 38-39).

Kepemilikan institusional dapat mengurangi *agency cost* dengan cara mengaktifkan pengawasan melalui investor-investor institusional. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan dengan keterlibatan institusional dalam kepemilikan saham, manajemen perusahaan akan diawasi oleh investor-investor institusional sehingga kinerja manajemen juga akan meningkat (Sisca Christianty Dewi, 2008: 48). Kepemilikan institusional dianggap sebagai efek substitusi dari upaya untuk meminimalkan biaya keagenan melalui kebijakan dividen dan utang. Oleh karena itu, untuk menghindari inefisiensi penggunaan sumber daya, diterapkannya kebijakan dividen yang lebih rendah (Marselina Widiastuti, Pranata P. Midiastuty, dan Eddy Suranta, 2013: 321).

c. Komposisi komisaris independen

Terdapat pandangan bahwa independensi dewan komisaris yang lebih besar lebih baik untuk meningkatkan *performance* perusahaan karena mereka mempunyai berbagai kemampuan yang lebih beragam dalam membantu dibuatnya keputusan-keputusan yang lebih baik. Namun, terdapat kemungkinan bahwa jumlah dewan

komisaris yang banyak kurang efektif. Saat jumlah anggota dewan komisaris menjadi terlalu banyak, koordinasi akan menjadi semakin sulit, dan bermasalah terutama dalam melakukan pengambilan keputusan.

Ukuran dewan yang besar dapat memberikan keuntungan maupun kerugian bagi perusahaan. Keuntungan dari ukuran dewan komisaris yang besar dalam suatu perusahaan yaitu dapat mengelola sumber dayanya dengan lebih baik. Pertukaran keahlian, pikiran, dan informasi dalam dewan juga akan lebih luas dan bervariasi. Semakin besar kebutuhan akan hubungan eksternal yang semakin efektif, maka kebutuhan akan dewan komisaris dalam jumlah besar akan semakin tinggi pula (Bagus, 2011).

Kerugian dari ukuran dewan yang besar adalah dapat meningkatkan permasalahan dalam hal komunikasi dan koordinasi. Permasalahan tersebut dapat menurunkan kemampuan dewan untuk mengendalikan dan mengawasi manajemen, sehingga dapat menimbulkan permasalahan agensi yang muncul dari pemisahan antara manajemen dan *principal* (Bagus, 2011). Dengan kata lain, ukuran dewan komisaris yang terlalu besar juga dapat meningkatkan biaya agensi dalam perusahaan.

B. Kajian Penelitian yang Relevan

Berikut adalah beberapa penelitian yang relevan yang sudah ada:

1. Titah Kinanti Kusumaningtyas (2015) mengenai Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap nilai perusahaan yang terdaftar pada indeks Sri Kehati. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, Kepemilikan Manajerial diperoleh signifikansi t sebesar $0,062 > \alpha = 5\%$. Hal ini berarti bahwa Kepemilikan Manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap Nilai Perusahaan. Kepemilikan Institusional diperoleh signifikansi t sebesar $0,018 < \alpha = 5\%$. Hal ini berarti bahwa Kepemilikan Institusional berpengaruh signifikan terhadap Nilai Perusahaan. Komposisi Komisaris Independen diperoleh signifikansi t sebesar $0,158 > \alpha = 5\%$. Hal ini berarti bahwa Komisaris Independen tidak berpengaruh signifikan terhadap Nilai Perusahaan. Kualitas Audit diperoleh signifikansi t sebesar $0,412 > \alpha = 5\%$. Hal ini berarti bahwa Kualitas Audit tidak berpengaruh signifikan terhadap Nilai Perusahaan.
2. Penelitian yang dilakukan Dewi Agustina, mengenai pengaruh *Corporate Governance* dan variabel keuangan terhadap Nilai Perusahaan. Dari hasil penelitian diperoleh variabel ukuran Dewan Komisaris memiliki nilai signifikansi sebesar $0,000$. Hal ini menunjukkan bahwa Dewan Komisaris berpengaruh signifikan terhadap Nilai Perusahaan. Variabel Dewan Komisaris Independen menunjukkan nilai signifikansi sebesar $0,073$ sehingga dapat

disimpulkan bahwa Komisaris Independen tidak berpengaruh signifikan terhadap Nilai Perusahaan. Variabel Kepemilikan Institusional menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,817 sehingga Kepemilikan Institusional tidak diterima. Kepemilikan Manajerial menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,038 Sehingga Kepemilikan Manajerial berpengaruh signifikan terhadap Nilai Perusahaan. Komite Audit menunjukkan signifikansi sebesar 0,275 sehingga Komite Audit tidak diterima.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Reny Dyah Retno M dan Denies Priantinah M.Si., Ak. (2012). Mengenai pengaruh *Good Corporate Governance* dan Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* terhadap Nilai Perusahaan (studi empiris pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2007 -2010). Variabel GCG memiliki koefisien regresi sebesar 0,536 dan nilai signifikansi sebesar 0,17. Hal ini menunjukkan bahwa GCG akan mendorong peningkatan pada nilai perusahaan. sedangkan variabel CSR dalam penelitian ini memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan dengan nilai t hitung 0,053 dan signifikansi 0,958 hal ini berarti bahwa variabel pengungkapan CSR secara parsial tidak memiliki pengaruh signifikan, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengungkapan CSR tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Cintia Yuniarti (2014), mengenai Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap kinerja dan nilai

perusahaan pada perusahaan *high profile* yang terdaftar di bursa efek Indonesia tahun 2010-2013. Dalam penelitian ini variabel proporsi dewan komisaris independen memiliki pengaruh signifikan positif terhadap kinerja dan nilai perusahaan dengan nilai signifikansi sebesar 0,192 terhadap kinerja perusahaan dan 0,267 terhadap nilai perusahaan. Variabel ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja dan nilai perusahaan dengan nilai signifikansi sebesar 0,025 terhadap nilai perusahaan dan 0,000 terhadap nilai perusahaan. Ukuran komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja dan nilai perusahaan dengan nilai signifikansi sebesar 0,211 terhadap kinerja perusahaan dan 0,130 terhadap nilai perusahaan. Kepemilikan manajerial memiliki pengaruh signifikan positif terhadap kinerja dan nilai perusahaan dengan nilai signifikansi sebesar 0,009 terhadap kinerja perusahaan dan 0,011 terhadap nilai perusahaan. Kepemilikan institusional memiliki pengaruh positif terhadap kinerja dan nilai perusahaan dengan nilai signifikansi sebesar 0,009 terhadap kinerja perusahaan dan 0,014 terhadap nilai perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Bayu Suryonugroho (2016), pengaruh *corporate social responsibility* (CSR) terhadap nilai perusahaan dengan kepemilikan institusional, kepemilikan manajemen, dan ukuran perusahaan sebagai variabel moderating (studi empiris pada perusahaan pemenang ISRA yang terdaftar di bursa efek Indonesia 2009-2012). Variabel CSR berpengaruh positif dan tidak signifikan

terhadap nilai perusahaan dengan nilai signifikansi sebesar 0,523. Maka hipotesis CSR berpengaruh terhadap nilai perusahaan ini ditolak. Hipotesis kepemilikan manajemen memoderasi hubungan CSR terhadap nilai perusahaan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,492. Sehingga hipotesis ditolak. Hipotesis ukuran perusahaan memoderasi hubungan CSR terhadap nilai perusahaan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,844. Sehingga hipotesis ditolak. Hipotesis pengaruh CSR parameter *environment*, *Community*, dan *employment* secara bersama-sama terhadap nilai perusahaan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,496. Sehingga hipotesis ditolak.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Yustisia Puspaningrum (2014), mengenai pengaruh CSR dan kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan dengan profitabilitas dan ukuran perusahaan sebagai variabel moderating (studi empiris pada perusahaan pertambangan di bursa efek Indonesia). Hipotesis pertama pengaruh CSR terhadap nilai perusahaan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,611. Sehingga hipotesis pertama ditolak. Hipotesis kedua pengaruh kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan memiliki nilai $t = 1,158$ lebih kecil dari t tabel 1,696. Dapat disimpulkan bahwa kepemilikan manajerial tidak mempengaruhi nilai perusahaan. Hipotesis ketiga pengaruh CSR terhadap nilai perusahaan dengan profitabilitas sebagai variabel moderating memiliki nilai signifikansi sebesar 0,067 sehingga hipotesis ketiga ditolak. Hipotesis keempat pengaruh

kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan dengan profitabilitas sebagai variabel moderating koefisien regresi sebesar 0,193. Dengan t signifikansi 0,025. Artinya ROA tidak dapat memoderasi pengaruh kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan. hipotesis kelima pengaruh CSR terhadap nilai perusahaan dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderating memiliki nilai signifikansi sebesar 0,003 lebih kecil dari 0,05, sehingga hipotesis kelima diterima

C. Kerangka Berpikir

1. Pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap Nilai Perusahaan

Tujuan utama perusahaan adalah meningkatkan nilai perusahaan. Nilai perusahaan akan terjamin tumbuh secara berkelanjutan jika perusahaan memperhatikan dimensi ekonomi, sosial dan lingkungan hidup karena keberlanjutan merupakan keseimbangan antara kepentingan-kepentingan ekonomi, lingkungan dan masyarakat. Oleh sebab itu dengan adanya praktik CSR yang baik, diharapkan nilai perusahaan akan dinilai dengan baik oleh investor (Nurlela dan Islahuddin, 2008). Hal ini disebabkan CSR merupakan salah satu dimensi dari sosial dan lingkungan hidup.

Penelitian Rustiarini (2010) menyatakan bahwa *Corporate Sosial Responsibility* berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Permanasari (2010) yang juga menyimpulkan bahwa *Corporate Social Responsibility*

berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Sementara itu, penelitian dari Nurlela dan Islahuddin (2008) dan Susanto dan Subekti (2013) menyimpulkan bahwa CSR tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan.

2. Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Nilai Perusahaan

Kepemilikan manajemen akan mendorong manajemen untuk meningkat nilai perusahaan. Hasil ini sesuai dengan penelitian Jensen dan meckling (1979) yang membuktikan bahwa variabel struktur kepemilikan saham oleh manajemen mempunyai pengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Peningkatan proporsi saham yang dimiliki manajer akan menurunkan kecenderungan manajer untuk melakukan tindakan yang berlebihan. Dengan demikian, makan akan mempersatukan kepentingan manajer dengan pemegang saham, hal ini berdampak positif meningkatkan nilai perusahaan.

3. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Nilai Perusahaan

Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen melalui proses *monitoring* secara efektif sehingga dapat mengurangi manajemen laba (Ujiyantho dan Pramuka, 2007). Adanya kepemilikan investor institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen, karena kepemilikan saham mewakili suatu sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung atau sebaliknya terhadap kinerja manajemen. Begitu juga penelitian Wening (2009),

semakin besar kepemilikan oleh institusi keuangan maka semakin besar pula kekuatan suara dan dorongan untuk mengoptimalkan nilai perusahaan.

4. Pengaruh Komposisi Komisaris Independen terhadap Nilai Perusahaan

Dewan komisaris dalam suatu perusahaan lebih ditekankan pada fungsi *monitoring* dari implementasi kebijakan direksi. Peran komisaris ini diharapkan akan meminimalisir permasalahan agensi yang timbul antara dewan direksi dengan pemegang saham. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Barnhart & Rosenstein (1998) dalam Kusumaningtyas (2015) membuktikan bahwa semakin tinggi perwakilan dari *outside director* (komisaris independen) maka semakin tinggi independensi dan efektifitas *corporate board*.

5. Pengaruh *corporate social responsibility*, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan komposisi komisaris independen terhadap nilai perusahaan.

Perusahaan sebagai sebuah entitas bisnis memiliki arah dan tujuan melaksanakan kegiatan operasionalnya. Memaksimalkan nilai perusahaan merupakan salah satu tujuan perusahaan sebagai upaya untuk memberikan kesejahteraan para pemegang saham. Nilai perusahaan didefinisikan sebagai nilai pasar. Harga saham perusahaan yang meningkat dapat pula meningkatkan nilai perusahaan dan memaksimalkan kemakmuran pemegang saham.

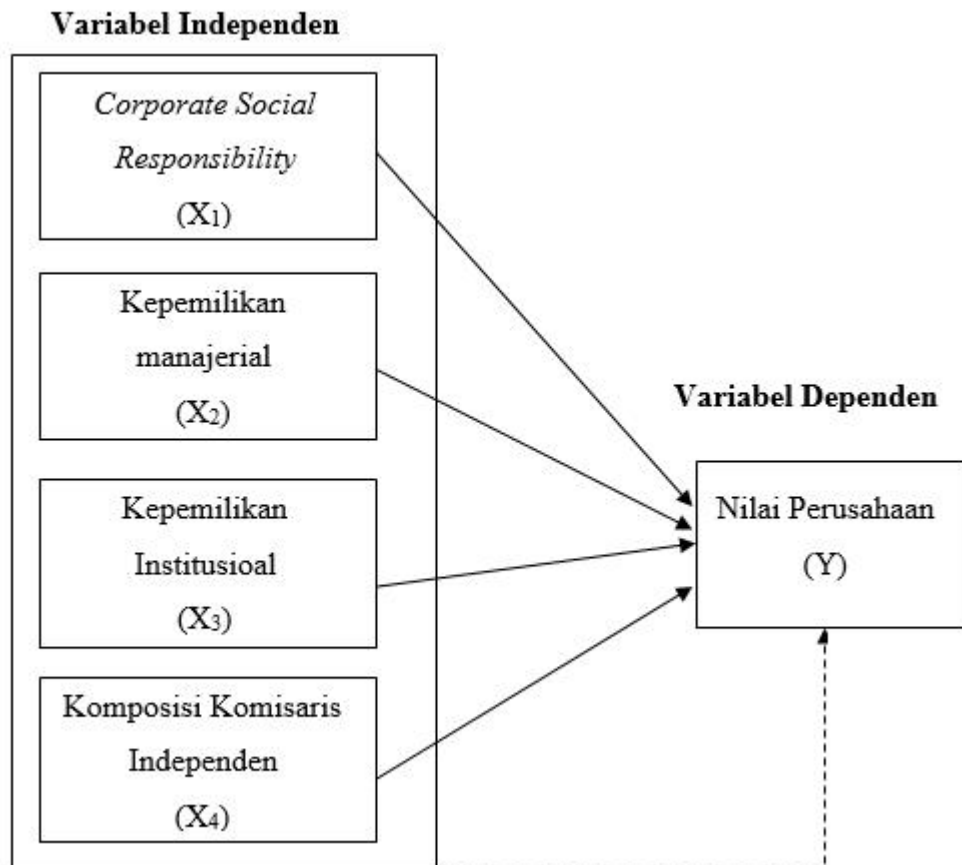
Corporate social responsibility menjadi sesuatu yang penting dan wajib dilaporkan oleh perusahaan. *Corporate social responsibility* menjadi bentuk pertanggungjawaban perusahaan terhadap sosial dan lingkungan serta sebagai salah satu hal yang menjadi pertimbangan investor saat akan melakukan keputusan investasi.

Good Corporate Governance merupakan suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang diharapkan dapat memberikan dan meningkatkan nilai perusahaan kepada para pemegang saham. Indikator *good corporate governance* yang digunakan pada penelitian ini yaitu kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan komposisi komisaris independen. Dengan demikian, penerapan *good corporate governance* dipercaya dapat meningkatkan nilai perusahaan.

Dengan demikian, *corporate social responsibility*, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan komposisi komisaris independen dapat secara bersama-sama berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

D. Paradigma Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dan penelitian yang relevan yang telah dikemukakan diatas, maka variabel-variabel yang terkait dalam penelitian ini dapat dirumuskan melalui kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 1. Paradigma Penelitian

Keterangan:

X₁: *Corporate Social Responsibility*

X₂: Kepemilikan Manajerial

X₃: Kepemilikan Institusional

X₄: Komposisi Komisaris Independen

Y : Nilai Perusahaan

—————→ : pengaruh antara variabel X terhadap Y

-----→ : pengaruh simultan variabel X terhadap Y

E. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan uraian paradigma penelitian diatas, maka peneliti dapat menarik hipotesis penelitian sebagai berikut:

1. H1 : *Corporate Social Responsibility* berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.
2. H2 : Kepemilikan Manajerial berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan
3. H3 : Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.
4. H4 : Komposisi komisaris independen berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.
5. H5 : *Corporate social responsibility*, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan komposisi komisaris independen berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah studi empiris berupa penelitian secara kuantitatif. Penelitian kuantitatif menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik (Indriantoro dan Supomo, 2002).

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret 2018 dengan menggunakan data yang diperoleh dari website Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id)

C. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan pertambangan batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2012 hingga 2016. Pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Adapun kriteria sampel yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan pertambangan batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2012 hingga 2016.
2. Menerbitkan laporan tahunan secara lengkap selama periode 2012 hingga 2016.

Peneliti menggunakan sampel laporan keuangan tahun 2012-2016 karena laporan keuangan pada tahun tersebut merupakan laporan keuangan terbaru yang akan membuat analisis hasil penelitian menjadi lebih baik. Jumlah perusahaan yang menjadi sampel penelitian sebanyak 15 perusahaan.

Tabel 1. Sampel Penelitian

NO	Nama	Kode Emiten
1	Adaro Energy Tbk	ADRO
2	Bara Jaya Internasional Tbk	ATPK
3	Bumi Resources Tbk	BUMI
4	Bayan Resources Tbk	BYAN
5	Darma Henwa Tbk	DEWA
6	Delta Dunia Makmur Tbk	DOID
7	Garda Tujuh Buana Tbk	GTBO
8	Harum Energy Tbk	HRUM
9	Indo Tambangraya Megah Tbk	ITMG
10	Resources Alam Indonesia Tbk	KKGI
11	Samindo Resources Tbk	MYOH
12	Perdana Karya Perkasa Tbk	PKPK
13	Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk	PTBA
14	Petrosea Tbk	PTRO
15	Golden Eagle Energy Tbk	SMMT

Sumber: www.idx.co.id

Jumlah populasi perusahaan pertambangan batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebanyak 22 perusahaan. Terdapat 15 perusahaan yang sesuai dengan kriteria pengambilan sampel, sedangkan terdapat 7 perusahaan yang tidak layak menjadi sampel penelitian, karena tidak sesuai dengan kriteria *purposive sampling*.

D. Definisi Operasional

1. Variabel Independen

a. *Corporate Social Responsibility*

Corporate Social Responsibility (CSR) adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan (Untung, 2008).

Indikator pengukuran Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam penelitian ini menggunakan indikator yang dipakai pada penelitian Sembiring (2005) berupa *checklist*. Indeks tingkat pengungkapan CSR dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$CSRDI_j = \frac{\sum X_{ij}}{n_j}$$

Keterangan:

$CSRDI_j$: *Corporate Social Responsibility disclosure index perusahaan j*

$\sum X_{ij}$: Jumlah item yang diungkapkan

N_j : Jumlah item yang seharusnya diungkapkan oleh perusahaan (79 item)

b. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham oleh manajemen perusahaan yang diukur dengan persentase jumlah saham yang dimiliki oleh manajemen (Sujono dan Soebiantoro dalam Kusumaningtyas (2015). Indikator yang digunakan untuk mengukur kepemilikan manajerial adalah persentase jumlah saham yang dimiliki pihak manajemen dari seluruh modal saham perusahaan yang beredar:

$$KM = \frac{\text{Saham yang dimiliki manajer}}{\text{jumlah saham beredar}}$$

c. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan Institusional adalah kepemilikan saham oleh pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dana perwalian dan institusi lainnya pada akhir tahun. Indikator yang digunakan untuk mengukur kepemilikan manajerial adalah persentase jumlah saham yang dimiliki pihak institusional dari seluruh modal saham perusahaan yang beredar:

$$KI = \frac{\text{Kepemilikan Saham institusional}}{\text{Jumlah saham yang beredar}}$$

d. Komposisi Komisaris Independen

Menurut Wardhani (2008) Komisaris Independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat

mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata sesuai kepentingan perusahaan. Rumus untuk menghitung komisaris independen adalah:

$$KKI = \frac{\text{Jumlah komisaris independen}}{\text{total anggota dewan komisaris}} \times 100 \%$$

2. Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah nilai perusahaan. Adapun rumus dalam menghitung *Price to Book Value* adalah sebagai berikut (Handoko, 2010):

$PBV = \frac{\text{Harga Saham}}{\text{Nilai Buku Saham (BV)}}$
$BV = \frac{(TA - TL)}{\text{Saham Beredar (SB)}}$

Keterangan :

PBV = *Price to Book Value*/ Nilai perusahaan

BV = *Book Value*/ Nilai buku saham

TA = Total Aset

TL = Total *Liabilities*

SB = Saham Beredar

E. Metode Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari *website* Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id).

F. Teknik Analisis Data

Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan profil data sampel yang meliputi antara lain maksimum, minimum, mean (rata-rata) dan data standar deviasi. Data yang telah diteliti dikelompokkan menjadi enam, yaitu: *return on assets*, *return on equity*, *operating profit margin*, *net profit margin*, *corporate social responsibility*, dan nilai perusahaan. Statistik deskriptif mendeskripsikan data menjadi sebuah informasi yang lebih jelas dan mudah dipahami. Statistik deskriptif digunakan untuk mengembangkan profil perusahaan yang menjadi sampel statistik deskriptif berhubungan dengan pengumpulan dan peningkatan data, serta penyajian hasil peningkatan tersebut (Ghozali, 2006).

1. Pengujian Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik bertujuan untuk mengetahui dan menguji kelayakan atas model regresi yang digunakan untuk penelitian ini. Pengujian ini juga dimaksudkan untuk memastikan bahwa di dalam model regresi yang digunakan tidak terdapat autokorelasi, multikolineritas, dan heteroskedastisitas serta untuk memastikan bahwa data yang dihasilkan berdistribusi normal (Ghozali, 2006).

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2006). Ada dua cara untuk mengetahui apakah residual terdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik. Karena analisis grafik dapat menyesatkan, maka dipilih uji statistik *Kolmogorov Smirnov* dengan melihat tingkat signifikansinya. Uji ini dilakukan sebelum data diolah. Pendeteksian normalitas data apakah terdistribusi normal atau tidak dengan menggunakan uji *Kolmogorov Smirnov*. Residual dinyatakan terdistribusi normal jika nilai signifikansi *Kolmogorov Smirnov* $> 0,05$ dan sebaliknya.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas dalam model regresi (Ghozali, 2006). Model regresi yang baik seharusnya bebas dari multikolineritas. Deteksi terhadap ada tidaknya multikolineritas yaitu (a) Nilai *R square* (R^2) yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris yang sangat tinggi, tetapi secara individual tidak terikat, (b) Menganalisis matrik variabel-variabel independen. Jika antar variabel independen terdapat korelasi yang cukup tinggi (lebih dari 0.09),

maka merupakan indikasi adanya multikolineritas. (c) Melihat *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF), suatu model regresi yang bebas dari masalah multikolineritas apabila mempunyai nilai *tolerance* dari 0,1 dan nilai VIF lebih dari 10 (Ghozali, 2006).

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dan residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang Homoskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas. Cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas yaitu dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (*dependen*) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Deteksi ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot* antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual ($Y \text{ prediksi} - Y \text{ sesungguhnya}$) yang telah di *studentized*. Dasar analisis:

- 1) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.

- 2) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier berganda ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan terdapat *problem* autokorelasi (Ghozali, 2006). Autokorelasi timbul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya.

Autokorelasi dapat diketahui melalui uji Durbin-Watson (DW test). Jika d lebih kecil dibandingkan dengan dU atau lebih besar dari 4--dU, maka H_0 ditolak yang berarti terdapat autokorelasi. Jika d terletak diantara dU dan 4--dU, maka H_0 diterima yang berarti tidak ada autokorelasi.

e. Analisis Regresi Linear Sederhana

Analisis regresi sederhana digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). Bentuk persamaan regresi linear sederhana yaitu:

$$Y = a + bX$$

Dimana:

Y : Nilai Perusahaan

α : Harga Y ketika harga X=0 (konstan)

b : Koefisien regresi

X : CSR, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional,
Komposisi Komisaris Independen

Selanjutnya nilai a dan b didapat dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Umar, 2011: 114):

$$a = \frac{\sum Y (\sum X^2) - \sum X \sum XY}{n \sum X^2 - (\sum X)^2}$$

$$b = \frac{n \sum XY - \sum X \sum Y}{n \sum X^2 - (\sum X)^2}$$

Pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dapat dilihat dari nilai koefisien regresi (*b*). Nilai koefisien regresi bisa positif atau negatif. Nilai koefisien positif artinya jika variabel independen naik maka variabel dependen naik dan sebaliknya jika variabel independen turun, maka nilai variabel dependen juga turun. Untuk mengetahui signifikansi dari pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen digunakan uji t. Kriteria yang digunakan dalam uji t yaitu jika nilai t hitung lebih besar daripada t tabel ($t_{hitung} > t_{tabel}$), maka variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Sebaliknya, apabila nilai t hitung lebih kecil daripada t tabel ($t_{hitung} < t_{tabel}$) variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap dependen.

f. Uji Regresi Linear Berganda

Analisis regresi ganda digunakan oleh peneliti, bila peneliti bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen (kriterium), bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi (Sugiyono, 2010: 275).

Rumus yang digunakan:

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + b_4 X_4$$

Keterangan:

Y = Nilai Perusahaan

X₁ = *Corporate Social Responsibility*

X₂ = Kepemilikan Manajerial

X₃ = Kepemilikan Institusional

X₄ = Komposisi Komisaris Independen

a = harga Y jika X = 0

b₁ = koefisien CSR

b₂ = koefisien Kepemilikan Manajerial

b₃ = koefisien Kepemilikan Institusional

b₄ = koefisien Komposisi Komisaris Independen

g. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (*Adjust R Squared*) mengukur seberapa besar kemampuan model dalam menerangkan variabel-variabel dependennya, dimana nilai koefisien determinasi antara 0 dan 1 (Ghozali, 2009).

h. Uji Statistik t

Uji statistik t dilakukan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Uji t dapat juga dilakukan dengan melihat nilai signifikansi t masing-masing variabel. Jika nilai signifikansi lebih besar dari α maka hipotesis ditolak, yang berarti secara individual variabel independen tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen begitu pula sebaliknya.

i. Menguji signifikansi dengan Uji F

Uji F digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh variabel X terhadap Y secara simultan dengan membandingkan nilai F_{hitung} (F_h) dengan F_{tabel} (F_t). Rumus yang digunakan sebagai berikut:

$$F_h = \frac{R^2 / k}{(1 - R^2) / (n - k - 1)}$$

Keterangan:

n= jumlah variabel independen

R= koefisien korelasi berganda

k= jumlah variabel independen

(Sugiyono, 2010)

Kriteria pengambilan keputusannya sebagai berikut:

1. Jika nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka hipotesis alternatif diterima yaitu variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
2. Jika nilai $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka hipotesis alternatif ditolak yaitu variabel independen secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui “Pengaruh *Corporate Social Responsibility*, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional dan Komposisi Komisaris Independen terhadap Nilai Perusahaan (Pada Perusahaan Pertambangan Batubara Tahun 2012-2016 yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data diperoleh dari *website* Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) dan *website* Saham Ok. Pengumpulan data dilakukan dengan mempelajari buku-buku literatur dan jurnal-jurnal ilmiah selama periode 2012-2016 yang berkaitan dengan data perusahaan pertambangan batubara. Pengungkapan variabel *Corporate Social Responsibility* menggunakan acuan informasi dari *Sustainability Reporting Guidelines* (SRG), yang dikeluarkan oleh *Global Reporting Initiative* (GRI) dengan menggunakan 79 item kriteria.

Populasi yang digunakan adalah perusahaan pertambangan batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2012 hingga 2016. Jumlah populasi perusahaan pertambangan batubara sebanyak 22 perusahaan, namun perusahaan yang masuk dalam sampel penelitian sebanyak 15 perusahaan. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel dengan

kriteria tertentu yang sudah ditentukan sebelumnya. Kriteria yang digunakan dalam pengambilan sampel penelitian ini sebagai berikut:

1. Perusahaan pertambangan batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2012 hingga 2016.
2. Menerbitkan laporan tahunan secara lengkap selama periode 2012 hingga 2016.

Adapun daftar perusahaan pertambangan batubara yang menjadi populasi dan sampel dalam penelitian ini disajikan sebagai berikut:

Tabel 2. Daftar Perusahaan Pertambangan Batubara

No	Nama	Kode Emiten
1	Adaro Energy Tbk	ADRO
2	Bara Jaya Internasional Tbk	ATPK
3	Bumi Resources Tbk	BUMI
4	Bayan Resources Tbk	BYAN
5	Darma Henwa Tbk	DEWA
6	Delta Dunia Makmur Tbk	DOID
7	Garda Tujuh Buana Tbk	GTBO
8	Harum Energy Tbk	HRUM
9	Indo Tambangraya Megah Tbk	ITMG
10	Resources Alam Indonesia Tbk	KKGI
11	Samindo Resources Tbk	MYOH
12	Perdana Karya Perkasa Tbk	PKPK
13	Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk	PTBA
14	Petrosea Tbk	PTRO
15	Golden Eagle Energy Tbk	SMMT

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa terdapat 15 perusahaan yang sesuai dengan kriteria pengambilan sampel, sedangkan terdapat 7 perusahaan yang tidak layak menjadi sampel penelitian, karena tidak sesuai dengan kriteria *purposive sampling*. Perusahaan yang tidak termasuk dalam sampel antara lain: TOBA, MBAP, GEMNS, FIRE,

BORN, BSSR, dan ARII. Setelah dilakukan pengolahan data dan dilakukan uji statistik, maka hasil statistik yang diperoleh dari data variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini disajikan dalam analisis sebagai berikut:

1. Analisis Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan deskripsi atas variabel-variabel penelitian secara statistik berupa nilai minimal-maksimal, nilai rata-rata (*mean*), dan *standard deviation* (simpangan baku). Hasil analisis deskriptif dapat di lihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3. Data Statistik Deskriptif

Variabel	N	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>	<i>Mean</i>	<i>Std. Deviation</i>
CSR	75	0,22	0,30	0,26	0,02
Kepemilikan Manajerial	75	0,00	0,16	0,01	0,03
Kepemilikan Institusional	75	0,00	1,00	0,55	0,23
Komposisi Komisaris Independen	75	0,00	0,75	0,36	0,15
Nilai Perusahaan	75	-2,06	15,25	2,45	3,21

Sumber: Data Sekunder Diolah

Berdasarkan *output* program pengolah data di atas, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

a. *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Corporate Social Responsibility ditunjukkan dengan proksi CSR. Berdasarkan tabel 3 di atas dapat diketahui bahwa dari 75 data yang ada, variabel CSR mempunyai nilai minimum sebesar

0,22 dan nilai maksimum sebesar 0,30. CSR terendah terjadi pada perusahaan Darma Henwa Tbk (DEWA) sebesar 0,22 sedangkan CSR tertinggi terjadi pada perusahaan Bayan Resources Tbk (BYAN), Garda Tujuh Buana Tbk (GTBO), dan Golden Eagle Energy Tbk (SMMT) sebesar 0,30. Nilai rata-rata atau *mean* sebesar 0,26 dan standar deviasi sebesar 0,02. Nilai *mean*/rata-rata lebih besar dari standar deviasi yaitu $0,26 > 0,02$ menandakan bahwa sebaran nilai CSR baik.

b. Kepemilikan Manajerial

Berdasarkan tabel 3 di atas dapat diketahui bahwa dari 75 data yang ada, variabel Kepemilikan Manajerial mempunyai nilai minimum sebesar 0,00 dan nilai maksimum sebesar 0,16. Kepemilikan Manajerial terendah terjadi pada perusahaan Darma Henwa Tbk (DEWA), Bara Jaya Internasional Tbk (ATPK), Bayan Resources Tbk (BYAN), Perdana Karya Perkasa Tbk (PKPK), Golden Eagle Energy Tbk (SMMT), Garda Tujuh Buana Tbk (GTBO), Petrosea Tbk (PTRO), Bumi Resources Tbk (BUMI) sebesar 0,16; sedangkan Kepemilikan Manajerial tertinggi terjadi pada perusahaan Adaro Energy Tbk (ADRO) sebesar 0,16. Nilai rata-rata atau *mean* sebesar 0,01 dan standar deviasi sebesar 0,03. Nilai *mean*/rata-rata lebih kecil dari standar deviasi yaitu $0,01 < 0,03$ menandakan bahwa sebaran nilai Kepemilikan Manajerial kurang baik.

c. Kepemilikan Institusional

Berdasarkan tabel 3 di atas dapat diketahui bahwa dari 75 data yang ada, variabel Kepemilikan Institusional mempunyai nilai minimum sebesar 0,00 dan nilai maksimum sebesar 1,00. Kepemilikan Institusional terendah terjadi pada perusahaan Perdana Karya Perkasa Tbk (PKPK) sebesar 0,00; sedangkan Kepemilikan Institusional tertinggi terjadi pada perusahaan Samindo Resources Tbk (MYOH) sebesar 1,00. Nilai rata-rata atau mean sebesar 0,55 dan standar deviasi sebesar 0,23. Nilai mean/rata-rata lebih besar dari standar deviasi yaitu $0,55 > 0,23$ menandakan bahwa sebaran nilai Kepemilikan Institusional baik.

d. Komposisi Komisaris Independen

Berdasarkan tabel 3 di atas dapat diketahui bahwa dari 75 data yang ada, variabel Komposisi Komisaris Independen mempunyai nilai minimum sebesar 0,00 dan nilai maksimum sebesar 0,75. Komposisi Komisaris Independen terendah terjadi pada perusahaan Garda Tujuh Buana Tbk (GTBO), Petrosea Tbk (PTRO), Bumi Resources Tbk (BUMI), Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG) sebesar 0,00; sedangkan Komposisi Komisaris Independen tertinggi terjadi pada perusahaan Golden Eagle Energy Tbk (SMMT) sebesar 0,75. Nilai rata-rata atau mean sebesar 0,36 dan standar deviasi sebesar 0,15. Nilai mean/rata-rata lebih besar dari standar deviasi yaitu $0,36 > 0,15$

menandakan bahwa sebaran nilai Komposisi Komisaris Independen baik.

e. Nilai Perusahaan

Berdasarkan tabel 3 di atas dapat diketahui bahwa dari 75 data yang ada, variabel Nilai Perusahaan mempunyai nilai minimum sebesar -2,06 dan nilai maksimum sebesar 15,25. Nilai perusahaan terendah terjadi pada perusahaan Bumi Resources Tbk (BUMI) sebesar -2,06; sedangkan Nilai Perusahaan tertinggi terjadi pada perusahaan Bayan Resources Tbk (BYAN) sebesar 15,25. Nilai rata-rata atau mean sebesar 2,45 dan standar deviasi sebesar 3,21. Nilai mean/rata-rata lebih kecil dari standar deviasi yaitu $2,45 < 3,21$ menandakan bahwa sebaran data Nilai Perusahaan kurang baik.

B. Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik ini dilakukan agar memperoleh model regresi yang dapat dipertanggungjawabkan. Uji asumsi klasik dalam penelitian ini menggunakan uji normalitas data, uji multikolinieritas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas. Hasil uji asumsi klasik disajikan sebagai berikut.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui sebaran data variabel penelitian berdistribusi normal atau tidak. Pengujian normalitas

menggunakan teknik analisis *Kolmogorov-Smirnov*. Hasil uji normalitas pada penelitian ini disajikan berikut.

Tabel 4. Hasil Uji Normalitas

	<i>Unstandardized Residual</i>	Kesimpulan
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>	0,107	Normal

Sumber: Data Sekunder Diolah

Hasil uji normalitas variabel penelitian menunjukkan bahwa semua variabel penelitian mempunyai nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 pada ($0,107 > 0,05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa residual berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui apakah ada korelasi antar variabel bebas (independen). Untuk pengujian ini digunakan fasilitas uji *Variance Inflation Factor* (VIF). Analisis regresi berganda dapat dilanjutkan apabila nilai VIF-nya kurang dari 10 dan nilai *tolerance*-nya di atas 0,1. Hasil uji multikolinearitas disajikan pada tabel 5 berikut:

Tabel 5. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	<i>Tolerance</i>	VIF	Kesimpulan
CSR	0,953	1,050	Tidak terdapat multikolinieritas
Kepemilikan Manajerial	0,933	1,072	Tidak terdapat multikolinieritas
Kepemilikan Institusional	0,974	1,027	Tidak terdapat multikolinieritas
Komposisi Komisaris Independen	0,990	1,010	Tidak terdapat multikolinieritas

Sumber: Data Sekunder Diolah

Tabel 5 menunjukkan bahwa semua variabel bebas mempunyai nilai toleransi di atas 0,1 dan nilai VIF di bawah 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi pada penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Pengujian dilakukan dengan uji *Glejser* yaitu meregresi masing-masing variabel independen dengan *absolute residual* sebagai variabel dependen. Sebagai pengertian dasar, residual adalah selisih antara nilai observasi dengan nilai prediksi, sedangkan *absolute* adalah nilai mutlaknya. Uji *Glejser* digunakan untuk meregresi nilai absolut residual terhadap variabel independen. Deteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dengan menggunakan tingkat kepercayaan 5%, jika tingkat kepercayaan lebih dari 5% maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dan sebaliknya. Hasil pengujian diperoleh sebagai berikut:

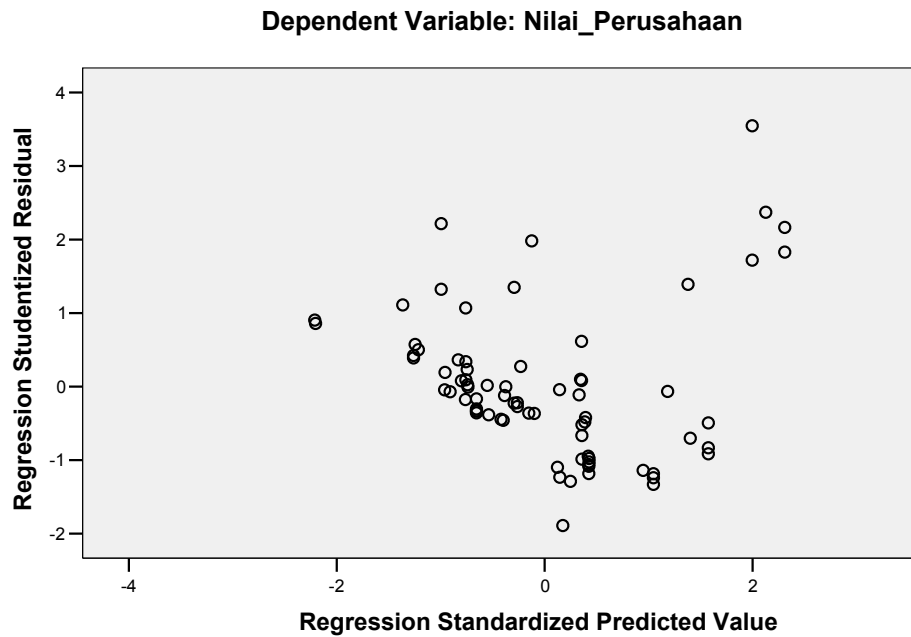
Tabel 6. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig	Kesimpulan
CSR	0,088	Tidak terdapat heteroskedastisitas
Kepemilikan Manajerial	0,175	Tidak terdapat heteroskedastisitas
Kepemilikan Institusional	0,768	Tidak terdapat heteroskedastisitas
Komposisi Komisaris	0,995	Tidak terdapat heteroskedastisitas
Independen		

Sumber: Data Sekunder Diolah

Berdasarkan uji *Glejser* yang telah dilakukan dari Tabel 6 dengan jelas menunjukkan bahwa tidak ada satupun variabel independen yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen nilai *absolute Residual* (ABS_RES). Hal ini terlihat dari probabilitas signifikansinya di atas tingkat kepercayaan 5%. Jadi dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas (tidak ada heteroskedastisitas).

Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat melalui grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu *ZPRED* dengan residualnya *SRESID* yang disajikan di bawah ini:



Gambar 2. Grafik *Scatterplot* Heteroskedastisitas

Gambar 2 di atas menunjukkan bahwa tidak ada pola yang jelas dan titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Imam Ghozali, 2011).

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya) (Ghozali, 2011). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Alat ukur yang digunakan untuk mendeteksi adanya autokorelasi dalam penelitian menggunakan tes *Durbin Watson* (D-W). Uji *Durbin Watson* hanya digunakan untuk

autokorelasi tingkat satu (*first order autocorrelation*) dan mensyaratkan adanya *intercept* (konstanta) dalam model regresi dan tidak ada variabel lagi di antara variabel independen.

Tabel 7. Uji Autokorelasi

Du	4-du	Nilai D-W	Kesimpulan
1,7390	$4 - 1,7390 = 2,261$	2,178	Non Autokorelasi

Sumber: Data Sekunder Diolah

Berdasarkan Tabel 7 di atas dapat dilihat bahwa hasil perhitungan nilai *Durbin-Watson* sebesar 2,178 yang berarti nilainya diantara $du < dw < 4 - du$ dimana $du = 1,7390$ dan $4 - du = 4 - 1,7390 = 2,261$. Hal ini menunjukkan tidak ada autokorelasi.

C. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis penelitian ini menguji pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Pengujian hipotesis pertama sampai keempat dilakukan dengan teknik analisis regresi sederhana karena hanya menjelaskan pengaruh satu variabel bebas dan satu variabel terikat sedangkan pengujian hipotesis kelima menggunakan teknik analisis regresi ganda karena menjelaskan pengaruh empat variabel bebas secara bersama-sama dengan satu variabel terikat. Deskripsi hasil uji hipotesis dijelaskan pada uraian berikut.

a. Pengujian Hipotesis Pertama

Hipotesis pertama menyatakan bahwa “*Corporate Social Responsibility* berpengaruh positif terhadap Nilai Perusahaan”. Di bawah ini adalah hasil pengujian hipotesis dengan regresi sederhana.

Tabel 8. Ringkasan Hasil Analisis Regresi Sederhana X1 terhadap Y

Variabel		Konstanta	Koefisien	Nilai R		Nilai T		
				R ²	Adj. R ²	T hitung	T tabel	Sig.
X1	Y	-19,373	83,532	0,295	0,285	5,523	1,992	0,000

Sumber: Data Sekunder Diolah

1) Persamaan garis regresi

Berdasarkan tabel di atas, maka persamaan garis regresi dapat dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut:

$$\hat{Y} = a + bX$$

$$\hat{Y} = -19,373 + 83,532X_1$$

Persamaan tersebut menunjukkan bahwa nilai koefisien X₁ sebesar 83,532 yang berarti apabila *Corporate Social Responsibility* (CSR) (X₁) meningkat 1 poin maka Nilai Perusahaan (Y) akan meningkat sebesar 83,532 poin.

2) Koefisien determinasi (r²)

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan r² sebesar 0,295; artinya *Corporate Social Responsibility* (CSR) mampu mempengaruhi Nilai Perusahaan (Y) sebesar 29,5%; masih ada 70,5% dipengaruhi faktor atau variabel lain yang dimungkinkan berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan (Y).

3) Pengujian Signifikansi Regresi Sederhana (Uji-t)

Berdasarkan tabel 8, diketahui bahwa nilai t_{hitung} sebesar 5,523; jika dibandingkan dengan t_{tabel} pada tingkat signifikansi 0,05, yaitu sebesar 1,992; maka t_{hitung} lebih besar daripada t_{tabel} (5,523 > 1,992). Nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05

dan nilai koefisien regresi dengan arah positif sebesar 83,532 yang menunjukkan adanya pengaruh positif. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis tersebut dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh signifikan antara *Corporate Social Responsibility* terhadap Nilai Perusahaan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hipotesis pertama yang menyatakan “*Corporate Social Responsibility* berpengaruh positif terhadap Nilai Perusahaan”, diterima.

b. Pengujian Hipotesis Kedua

Hipotesis kedua menyatakan bahwa “Kepemilikan Manajerial berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan”. Di bawah ini adalah hasil pengujian hipotesis dengan regresi sederhana.

Tabel 9. Ringkasan Hasil Analisis Regresi Sederhana X_2 terhadap Y

Variabel		Konstanta	Koefisien	Nilai R		Nilai T		
				R^2	$Adj. R^2$	T hitung	T tabel	Sig.
X2	Y	2,549	-9,573	0,012	-0,002	-0,936	1,992	0,352

Sumber: Data Sekunder Diolah

1) Persamaan garis regresi

Berdasarkan tabel di atas, maka persamaan garis regresi dapat dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut:

$$\hat{Y} = a + bX$$

$$\hat{Y} = 2,549 - 9,573X_2$$

Persamaan tersebut menunjukan bahwa nilai koefisien X_2 sebesar -9,573 yang berarti apabila Kepemilikan Manajerial (X_2) meningkat 1 poin maka Nilai Perusahaan (Y) akan menurun sebesar 9,573 poin.

2) Koefisien determinasi (r^2)

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan r^2 sebesar 0,012; artinya Kepemilikan Manajerial mampu mempengaruhi Nilai Perusahaan (Y) sebesar 1,2%; masih ada 98,8% dipengaruhi faktor atau variabel lain yang dimungkinkan berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan (Y).

3) Pengujian Signifikansi Regresi Sederhana (Uji-t)

Berdasarkan tabel 9, diketahui bahwa nilai t_{hitung} sebesar -0,936; jika dibandingkan dengan t_{tabel} pada tingkat signifikansi 0,05, yaitu sebesar 1,992; maka t_{hitung} lebih kecil daripada t_{tabel} (-0,936 < 1,992). Nilai signifikansi sebesar 0,352 lebih besar dari 0,05 dan nilai koefisien regresi dengan arah negatif sebesar -9,573 yang menunjukkan adanya pengaruh negatif. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh signifikan antara Kepemilikan Manajerial terhadap Nilai Perusahaan, maka hipotesis kedua yang menyatakan “Kepemilikan Manajerial berpengaruh positif terhadap Nilai Perusahaan”, ditolak.

c. Pengujian Hipotesis Ketiga

Hipotesis ketiga menyatakan bahwa “Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan”. Di bawah ini adalah hasil pengujian hipotesis dengan regresi sederhana.

Tabel 10. Ringkasan Hasil Analisis Regresi Sederhana X₃ terhadap Y

Variabel		Konstanta	Koefisien	Nilai R		Nilai T		
				R ²	Adj. R ²	T hitung	T tabel	Sig.
X ₃	Y	1,561	1,610	0,013	0,000	0,987	1,992	0,327

Sumber: Data Sekunder Diolah

1) Persamaan garis regresi

Berdasarkan tabel di atas, maka persamaan garis regresi dapat dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut:

$$\hat{Y} = a + bX$$

$$\hat{Y} = 1,561 + 1,610X_3$$

Persamaan tersebut menunjukkan bahwa nilai koefisien X₃ sebesar 1,610 yang berarti apabila Kepemilikan Institusional (X₃) meningkat 1 poin maka Nilai Perusahaan (Y) akan meningkat sebesar 1,610 poin.

2) Koefisien determinasi (r²)

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan r² sebesar 0,013; artinya Kepemilikan Institusional mampu mempengaruhi Nilai Perusahaan (Y) sebesar 1,3%; masih ada 98,7% dipengaruhi faktor atau variabel lain yang dimungkinkan berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan (Y).

3) Pengujian Signifikansi Regresi Sederhana (Uji-t)

Berdasarkan tabel 10, diketahui bahwa nilai t_{hitung} sebesar 0,987; jika dibandingkan dengan t_{tabel} pada tingkat signifikansi 0,05, yaitu sebesar 1,992; maka t_{hitung} lebih kecil daripada t_{tabel} (0,987 < 1,992). Nilai signifikansi sebesar 0,327 lebih besar dari 0,05

dan nilai koefisien regresi dengan arah positif sebesar 1,610 yang menunjukkan adanya pengaruh positif. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh signifikan antara Kepemilikan Institusional terhadap Nilai Perusahaan, maka hipotesis ketiga yang menyatakan “Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap Nilai Perusahaan”, ditolak.

d. Pengujian Hipotesis Keempat

Hipotesis keempat menyatakan bahwa “Komposisi Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan”. Di bawah ini adalah hasil pengujian hipotesis dengan regresi sederhana.

Tabel 11. Ringkasan Hasil Analisis Regresi Sederhana X4 terhadap Y

Variabel		Konstanta	Koefisien	Nilai R		Nilai T		
				R ²	Adj. R ²	T hitung	T tabel	Sig.
X4	Y	2,369	0,231	0,00012	-0,014	0,094	1,992	0,926

Sumber: Data Sekunder Diolah

1) Persamaan garis regresi

Berdasarkan tabel di atas, maka persamaan garis regresi dapat dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut:

$$\hat{Y} = a + bX$$

$$\hat{Y} = 2,369 + 0,231X_4$$

Persamaan tersebut menunjukkan bahwa nilai koefisien X₄ sebesar 0,231 yang berarti apabila Komposisi Komisaris Independen (X₄) meningkat 1 poin maka Nilai Perusahaan (Y) akan meningkat sebesar 0,231 poin.

2) Koefisien determinasi (r^2)

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan r^2 sebesar 0,00012; artinya Komposisi Komisaris Independen mampu mempengaruhi Nilai Perusahaan (Y) sebesar 0,012%; masih ada 99,988% dipengaruhi faktor atau variabel lain yang dimungkinkan berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan (Y).

3) Pengujian Signifikansi Regresi Sederhana (Uji-t)

Berdasarkan tabel 11, diketahui bahwa nilai t_{hitung} sebesar 0,094; jika dibandingkan dengan t_{tabel} pada tingkat signifikansi 0,05, yaitu sebesar 1,992; maka t_{hitung} lebih kecil daripada t_{tabel} ($0,094 < 1,992$). Nilai signifikansi sebesar 0,926 lebih besar dari 0,05 dan nilai koefisien regresi dengan arah positif sebesar 0,231 yang menunjukkan adanya pengaruh positif. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh signifikan antara Komposisi Komisaris Independen terhadap Nilai Perusahaan, maka hipotesis ketiga yang menyatakan “Komposisi Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap Nilai Perusahaan”, ditolak.

e. Pengujian Hipotesis Kelima

Analisis data yang digunakan untuk pengujian hipotesis kelima dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Di bawah ini akan dibahas hasil analisis regresi berganda.

Tabel 12. Rangkuman Hasil Analisis Regresi Berganda

Variabel	Koefisien Regresi (b)	R	R ²	F	Sig.
Konstanta	-21,936	0,597	0,357	9,702	0,000
CSR	91,188				
Kepemilikan Manajerial	-19,842				
Kepemilikan Institusional	1,257				
Komposisi Komisaris Independen	0,177				

Sumber: Data Sekunder Diolah

1) Persamaan garis regresi

Dari hasil analisis regresi dapat diketahui persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$Y = -21,936 + 91,188X_1 - 19,842 X_2 + 1,257 X_3 + 0,177X_4 + e$$

2) Koefisien Determinasi (R²)

Hasil uji R² pada penelitian ini diperoleh nilai sebesar 0,357. Hal ini menunjukkan bahwa Nilai Perusahaan dipengaruhi oleh *Corporate Social Responsibility*, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, dan Komposisi Komisaris Independen sebesar 35,7%, sedangkan sisanya sebesar 64,3% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

3) Pengujian Signifikansi Regresi Berganda (Uji-F)

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai R hitung sebesar 0,597 yang menunjukkan adanya pengaruh positif dengan signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 (0,000 < 0,05). Oleh karena koefisien regresi bernilai positif dan nilai signifikansi kurang dari 0,05; hal ini berarti bahwa hipotesis kelima yang

menyatakan “*Corporate social responsibility*, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, dan Komposisi Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap Nilai Perusahaan” diterima.

D. Pembahasan

1. Pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap Nilai Perusahaan

Hasil statistik uji t untuk variabel *Corporate Social Responsibility* diperoleh t_{hitung} lebih besar daripada t_{tabel} ($5,523 > 1,992$). Nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 dan nilai koefisien regresi dengan arah positif sebesar 83,532 yang menunjukkan adanya pengaruh positif. Berdasarkan penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa *Corporate Social Responsibility* berpengaruh positif terhadap Nilai Perusahaan.

Corporate social responsibility (CSR) atau pertanggung-jawaban sosial perusahaan adalah mekanisme bagi suatu organisasi untuk secara sukarela mengintegrasikan perhatian terhadap lingkungan dan sosial ke dalam operasinya dan interaksinya dengan *stakeholders*, yang melebihi tanggung jawab organisasi di bidang hukum (Darwin, 2004 dalam Kusumadilaga, 2010). *Corporate social responsibility* merupakan komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk kontribusi dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan menitikberatkan

pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Nilai perusahaan akan terjamin tumbuh secara berkelanjutan jika perusahaan memperhatikan dimensi ekonomi, sosial dan lingkungan hidup karena keberlanjutan merupakan keseimbangan antara kepentingan-kepentingan ekonomi, lingkungan dan masyarakat. Oleh sebab itu dengan adanya praktik CSR yang baik, diharapkan nilai perusahaan akan dinilai dengan baik oleh investor (Nurlela dan Islahuddin, 2008). Hal ini disebabkan CSR merupakan salah satu dimensi dari sosial dan lingkungan hidup.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rustiarini (2010) menyatakan bahwa *Corporate Sosial Responsibility* berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Permanasari (2010) yang juga menyimpulkan bahwa *Corporate Social Responsibility* berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

2. Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Nilai Perusahaan

Hasil statistik uji t untuk variabel Kepemilikan Manajerial diperoleh nilai t_{hitung} lebih kecil daripada t_{tabel} ($0,936 < 1,992$). Nilai signifikansi sebesar 0,352 lebih besar dari 0,05 dan nilai koefisien regresi dengan arah negatif sebesar -9,573. Berdasarkan penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Kepemilikan Manajerial berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan.

Tidak berpengaruhnya Kepemilikan Manajerial terhadap Nilai Perusahaan diakibatkan adanya peningkatan jumlah kepemilikan manajerial tidak mampu mengurangi konflik agensi yang timbul akibat hubungan keagenan. Jumlah kepemilikan manajerial yang besar tidak mampu mensejajarkan kepentingan manajemen dan pemegang saham, sehingga tujuan perusahaan dalam mencapai nilai perusahaan yang tinggi tidak dapat tercapai. Para manajer memiliki kepentingan yang cenderung dipenuhinya dibandingkan dengan pencapaian tujuan perusahaan secara keseluruhan.

Selain itu dalam penelitian Wibowo (2017) dijelaskan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan disebabkan oleh belum banyak pihak manajemen yang memiliki saham perusahaan dengan jumlah yang cukup signifikan. Jumlah kepemilikan manajerial yang rendah menyebabkan pihak manajemen lebih mementingkan kepentingannya sendiri daripada kepentingan perusahaan. Jumlah kepemilikan saham yang belum signifikan tersebut menyebabkan manajer lebih mementingkan tujuannya sebagai seorang manajer daripada sebagai pemegang saham. Karena pihak manajemen mempunyai jumlah saham yang sedikit, sehingga pihak manajemen mementingkan kepentingan pribadinya, sehingga tidak mempengaruhi nilai perusahaan.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Sukirni (2012) pada penelitiannya menyatakan bahwa jumlah kepemilikan manajerial yang

rendah menyebabkan pihak manajemen lebih mementingkan kepentingannya sendiri daripada kepentingan perusahaan. Jumlah kepemilikan saham yang belum signifikan tersebut menyebabkan manajer lebih mementingkan tujuannya sebagai seorang manajer daripada sebagai pemegang saham.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Titah Kinanti Kusumaningtyas (2015) mengenai “Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Nilai Perusahaan yang terdaftar pada Indeks Sri Kehati”. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, untuk kepemilikan manajerial diperoleh signifikansi t sebesar $0,062 > \alpha = 5\%$. Hal ini berarti bahwa Kepemilikan Manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap Nilai Perusahaan.

3. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Nilai Perusahaan

Hasil statistik uji t untuk variabel Kepemilikan Institusional diperoleh nilai t_{hitung} lebih kecil daripada t_{tabel} ($0,987 < 1,992$). Nilai signifikansi sebesar 0,327 lebih besar dari 0,05 dan nilai koefisien regresi dengan arah positif sebesar 1,610. Berdasarkan penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Kepemilikan Institusional berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Nilai Perusahaan.

Hasil penelitian membuktikan bahwa secara parsial tidak terdapat pengaruh yang signifikan Kepemilikan Institusional terhadap Nilai Perusahaan. Hal ini disebabkan bahwa besar atau kecilnya kepemilikan institusional atas perusahaan belum mampu mengontrol dan mengawasi

tindakan manajer dalam perusahaan. Tindakan manajer dalam perusahaan yang terlalu besar tidak mampu dikendalikan oleh investor institusional secara efisien yang dikarenakan investor institusional akan lebih berfokus pada perusahaan daripada tindakan manajer, sehingga kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

Sementara itu dalam penelitian Welin dan Rusiti (2013) dijelaskan bahwa kepemilikan insititusional tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan dikarenakan pemegang saham mayoritas memiliki kecenderungan mampu mengontrol atau mengendalikan perusahaan. Kemampuan mengontrol ini menjadikan pemegang saham mayoritas sebagai pemegang saham pengendali, sehingga pemegang saham pengendali cenderung memiliki hak kontrol. Hak kontrol tersebut dapat berperan besar dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Penelitian ini sejalan dengan penelitian dari Fitriani (2015) dan Sugiarto (2011) yang menyimpulkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Kepemilikan institusional dari perusahaan-perusahaan *holding companies* yang saling berafiliasi di Indonesia masih merupakan perusahaan-perusahaan keluarga dimana pihak manajemen perusahaan masih bagian dari perusahaan-perusahaan keluarga tersebut (Sudarma, 2004). Kepemilikan saham oleh pihak institusional didominasi oleh pihak-pihak yang tidak independen (berafiliasi satu sama lain) sehingga fungsi kepemilikan institusional sebagai pengawas bagi manajemen tidak bisa berjalan semestinya

walaupun kepemilikan saham oleh pihak institusional tinggi. Kondisi ini menyebabkan *agency problem* tidak bisa ditekan dan dapat berimbas pada *market value* perusahaan yang menurun.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dewi Agustina mengenai “Pengaruh *Corporate Governance* dan Variabel Keuangan terhadap Nilai Perusahaan”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kepemilikan institusional diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,817 sehingga Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan.

4. Pengaruh Komposisi Komisaris Independen terhadap Nilai Perusahaan

Hasil statistik uji t untuk variabel Komposisi Komisaris Independen diperoleh nilai t_{hitung} lebih kecil daripada t_{tabel} ($0,094 < 1,992$). Nilai signifikansi sebesar 0,926 lebih besar dari 0,05 dan nilai koefisien regresi dengan arah positif sebesar 0,231. Berdasarkan penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Komposisi Komisaris Independen berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Nilai Perusahaan.

Tidak berpengaruhnya Komposisi Komisaris Independen terhadap Nilai Perusahaan karena dewan komisaris independen kurang objektif dalam melakukan pengawasan terhadap dewan direksi, sehingga kinerja dewan direksi kurang begitu efektif dan efisien yang akhirnya berdampak pada menurunnya nilai perusahaan. Penjelasan dari hasil ini adalah kemungkinan adanya komisaris independen dalam perusahaan

yang diobservasi hanyalah bersifat formalitas untuk memenuhi regulasi dari Bursa Efek Indonesia sehingga keberadaan komisaris independen ini tidak untuk menjalankan fungsi *monitoring* yang baik dan tidak menggunakan independensinya untuk mengawasi kebijakan direksi. Komisaris independen dalam suatu perusahaan bukan merupakan jaminan bahwa nilai perusahaan akan meningkat. Adanya *monitoring* komisaris independen tidak menghalangi perilaku manajer untuk memaksimumkan kepentingan pribadinya sehingga target perusahaan untuk memaksimumkan nilai perusahaan sulit tercapai apabila terdapat perbedaan kepentingan seperti itu. Hal ini dinilai sulit untuk investor agar dapat menilai lebih tinggi nilai saham perusahaan dibandingkan nilai buku perusahaan.

Alasan lainnya yakni dewan komisaris independen kurang objektif dalam melakukan pengawasan terhadap dewan direksi, sehingga kinerja dewan direksi kurang begitu efektif dan efisien yang akhirnya berdampak pada menurunnya kinerja keuangan perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki dewan komisaris independen hanya untuk memenuhi syarat minimal jumlah dewan komisaris independen yang ditetapkan oleh Bursa Efek Indonesia, sehingga membuat kinerja perusahaan tidak efektif dan akan sulit mendapat respon baik dari investor untuk menilai lebih tinggi nilai saham perusahaan.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Titah Kinanti Kusumaningtyas (2015) mengenai “Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Nilai Perusahaan yang Terdaftar pada Indeks Sri Kehati”. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa komposisi komisaris independen diperoleh signifikansi t sebesar $0,158 > \alpha = 5\%$. Hal ini berarti bahwa komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan.

5. Pengaruh *Corporate Social Responsibility*, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, dan Komposisi Komisaris Independen terhadap Nilai Perusahaan

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai R hitung sebesar 0,597 yang menunjukkan adanya pengaruh positif dengan signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$), hal ini berarti bahwa *Corporate social responsibility*, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, dan Komposisi Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap Nilai Perusahaan.

Menurut Samuel (2000) dalam Kusumadilaga (2010) menjelaskan bahwa *enterprise value* (EV) atau dikenal juga sebagai *firm value* (nilai perusahaan) merupakan konsep penting bagi investor, karena merupakan indikator bagi pasar menilai perusahaan secara keseluruhan. Nilai perusahaan menggambarkan seberapa baik atau buruk manajemen mengelola kekayaannya, hal ini bisa dilihat dari pengukuran kinerja keuangan yang diperoleh. Suatu perusahaan akan berusaha untuk

memaksimalkan nilai perusahaannya. Peningkatan nilai perusahaan biasanya ditandai dengan naiknya harga saham di pasar (Rahayu, 2010). Rasio-rasio keuangan dapat untuk mengetahui nilai pasar perusahaan yang dapat memberikan indikasi bagi manajemen mengenai penilaian para investor di masa lalu dan prospeknya di masa mendatang (Martina, 2012).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Corporate social responsibility*, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, dan Komposisi Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap Nilai Perusahaan. *Corporate social responsibility* menjadi sesuatu yang penting dan wajib dilaporkan oleh perusahaan. *Corporate social responsibility* menjadi bentuk pertanggungjawaban perusahaan terhadap sosial dan lingkungan serta sebagai salah satu hal yang menjadi pertimbangan investor saat akan melakukan keputusan investasi.

Good Corporate Governance merupakan suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang diharapkan dapat memberikan dan meningkatkan nilai perusahaan kepada para pemegang saham. Indikator *good corporate governance* yang digunakan pada penelitian ini yaitu kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan komposisi komisaris independen. Dengan demikian, penerapan *good corporate governance* dipercaya dapat meningkatkan nilai perusahaan. Dengan demikian, *corporate social responsibility*, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan komposisi

komisaris independen dapat secara bersama-sama berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

Hasil uji R^2 pada penelitian ini diperoleh nilai sebesar 0,357. Hal ini menunjukkan bahwa Nilai Perusahaan dipengaruhi oleh *Corporate Social Responsibility*, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, dan Komposisi Komisaris Independen sebesar 35,7%, sedangkan sisanya sebesar 64,3% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini

Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Titah Kinanti Kusumaningtyas (2015) mengenai “Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Nilai Perusahaan yang Terdaftar pada Indeks Sri Kehati”. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa secara bersama-sama kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan komposisi komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan.

C. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini telah diupayakan untuk memperoleh hasil yang maksimal, namun pada kenyataannya dalam penelitian ini masih terdapat kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan, diantaranya sebagai berikut:

1. Model penelitian yang relatif sederhana karena hanya mengungkap pengaruh *Corporate Social Responsibility*, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional dan Komposisi Komisaris Independen

terhadap Nilai Perusahaan. Terdapat masih banyak kemungkinan variabel faktor lain yang berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan, namun tidak dimasukkan dalam penelitian ini, seperti: ukuran perusahaan dan profitabilitas.

2. Penggunaan data *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam penelitian ini sebagian besar berasal dari laporan tahunan perusahaan, hanya beberapa perusahaan yang sudah menerbitkan laporan pertanggungjawaban (*sustainability report*) sehingga tidak semua item diungkapkan secara jelas.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dijelaskan di bab sebelumnya, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. *Corporate Social Responsibility* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Nilai Perusahaan. Hal ini dibuktikan dengan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($5,523 > 1,992$), koefisien regresi positif sebesar 83,532, dan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$.
2. Kepemilikan Manajerial berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Hal ini dibuktikan dengan nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($0,936 < 1,992$), koefisien regresi negatif sebesar -9,573; dan nilai signifikansi sebesar $0,352 > 0,05$.
3. Kepemilikan Institusional berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Nilai Perusahaan. Hal ini dibuktikan dengan nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($0,987 < 1,992$), koefisien regresi positif sebesar 1,610; dan nilai signifikansi sebesar $0,327 > 0,05$.
4. Komposisi Komisaris Independen berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Nilai Perusahaan. Hal ini dibuktikan dengan nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($0,094 < 1,992$), koefisien regresi positif sebesar 0,231 dan nilai signifikansi sebesar $0,926 > 0,05$.
5. *Corporate Social Responsibility*, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, dan Komposisi Komisaris Independen

berpengaruh positif terhadap Nilai Perusahaan. Hal ini dibuktikan dengan nilai R hitung positif sebesar 0,597 dengan signifikansi sebesar 0,000. Hasil uji R² pada penelitian ini diperoleh nilai sebesar 0,357; artinya Nilai Perusahaan dipengaruhi oleh *Corporate Social Responsibility*, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, dan Komposisi Komisaris Independen sebesar 35,7%, sedangkan sisanya sebesar 64,3% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan di atas, dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Perusahaan

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa *Corporate Social Responsibility* (CSR) berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan, dengan demikian perusahaan hendaknya lebih memperhatikan kelengkapan pengungkapan yang dilakukan perusahaan terkait aktivitas CSR perusahaan. Semakin lengkapnya *CSR Disclosure* yang dilakukan perusahaan, kemungkinan akan lebih meningkatkan nilai perusahaan di mata investor. Sehingga keberlanjutan perusahaan untuk jangka panjang akan lebih terjamin. Selain itu, perusahaan juga disarankan untuk terus memperhatikan dan mengungkapkan tanggung jawab sosial menggunakan acuan informasi dari *Sustainability Reporting Guidelines* (SRG), yang

dikeluarkan oleh *Global Reporting Initiative* (GRI) dengan menggunakan 79 item kriteria, sebagai pertimbangan dalam pembuatan kebijakan perusahaan untuk lebih meningkatkan kepeduliannya terhadap lingkungan sosial.

2. Bagi Investor

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa secara parsial terdapat pengaruh CSR terhadap Nilai Perusahaan. Oleh karena itu, bagi para investor diharapkan dapat mempertimbangkan perusahaan yang melakukan pengungkapan CSR sebagai tempat untuk investasi agar dapat mengambil keputusan investasi yang menguntungkan kedua belah pihak.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya yang menggunakan penelitian yang sama disarankan untuk menambahkan variabel yang belum dimasukkan dalam penelitian ini, seperti: ukuran perusahaan dan profitabilitas. Selain itu, diharapkan juga untuk menambah jumlah tahun pengamatan, sehingga akan diperoleh gambaran yang lebih baik tentang kondisi perusahaan serta peningkatan perkembangan perusahaan tersebut sejauh mana dalam meningkatkan nilai perusahaan.

4. Bagi Akademisi

Bagi pihak akademisi diharapkan dengan adanya hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi penelitian terhadap

mata kuliah akuntansi khususnya Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial, dalam hal analisis *Corporate Social Responsibility*, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Komposisi Komisaris Independen, dan Nilai Perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, S., dan Ardana, C. I. (2014). *Etika Bisnis dan Profesi, Tantangan Membangun Manusia Seutuhnya*. Edisi Revisi. Salemba Empat. Jakarta.
- Alfinur. (2016). Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance (GCG) terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan yang Listing di BEI. *Jurnal Ekonomi Modernisasi*.
- Almilia, S. L., dan Silvy, M. (2006). Analisis Kebijakan Dividen dan Kebiakan Leverage terhadap Prediksi Kepemilikan Manajerial dengan Teknik Analisa Multinomial Logit. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis* 6(1).
- Amri, C. (2011). Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan, Good Corporate Governance dan Corporate Social Responsibility Terhadap Nilai Perusahaan. *Skripsi*. Universitas Gunadarma. Depok.
- Dewi, C. S. (2008). Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Kebijakan Utang, Profitabilitas, dan Ukuran Perusahaan terhadap Kebijakan Dividen. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi* 10(1), hlm. 47- 58.
- Endraswati, Hikmah. (2012). Pengaruh Struktur Kepemilikan dan Kebijakan Dividen terhadap Nilai Perusahaan dengan Kebijakan Hutang sebagai Variabel Moderating pada Perusahaan di BEI. *Jurnal STAIN Salatiga*.
- Fitriani, A. G. (2015). Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Profitabilitas, dan Kebijakan Hutang terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2013. *Skripsi*. Universitas Nusantara PGRI Kediri.
- Fountaine, M. (2013). Corporate Social Responsibility and Sustainability: The new bottom line. *International journal of business and social science*. Vol. 4 No. 4.
- Ghozali, I. (2006). *Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Edisi Ke 4. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Handoko, Y. (2010). Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Pengungkapan Corporate Social Responsibility dan Good Corporate Social Responsibility Sebagai Variabel Pemoderasi. *Skripsi*. Universitas Gunadarma. Depok.
- Harahap, S. S. (2002). *Teori Akuntansi Laporan Keuangan*. PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Harningsih. (2012). Evaluasi Pengaruh Rasio-rasio Keuangan Terhadap Perubahan Laba Pada Bank Umum Konvensional di Indonesia. *Skripsi*. Universitas Gunadarma. Depok.

- Haruman, T. (2008). *Pengaruh Struktur Kepemilikan terhadap Keputusan Keuangan dan Nilai Perusahaan: Survey pada Perusahaan Manufaktur di PT. Bursa Efek Indonesia*. Simposium Nasional Akuntansi XI. Pontianak.
- Hermawati, A. (2010). Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Pengungkapan Corporate Social Responsibility Dan Struktur Kepemilikan Sebagai Variabel Pemoderasi. *Skripsi*. Universitas Gunadarma. Depok.
- Indriantoro, N, dan Bambang Supomo. (2002). *Metode Penelitian Bisnis: Untuk Akuntansi dan Manajemen*. Edisi Pertama. BPFE. Yogyakarta.
- Kusumadilaga, R. (2010). Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia). *Skripsi*. Universitas Dipenogoro. Semarang.
- Kusumaningtyas, K, T. (2015). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan Yang Terdaftar Pada Indeks Sri Kehati. *Skripsi*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA). Surabaya.
- Kusumawati, V. (2011). Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Komite Audit, dan Kualitas Audit terhadap Created Share Holder Value pada Perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Skripsi*. Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Mudashiru, A., Bakare, I, A, O., Babatunde, Y., et al. (2014). Good corporate governance and organizational performance: An empirical Analysis. *International journal of humanities and social science*. Vol 4, No.7.
- Nuringsih, K. (2005). Analisis Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kebijakan Utang, ROA, dan Ukuran Perusahaan terhadap Kebijakan Dividen: Studi 1995-1996. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 2(2), hlm. 103-123.
- Nurlela, R, dan Islahudin. (2008). *Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Nilai Perusahaan dengan Presentase Kepemilikan Manajemen sebagai Variabel Moderating*. Simposium Nasional Akuntansi XI. Pontianak.
- Paranita, E, S. (2007). *Analisis pengaruh Insider ownership, kebijakan hutang, profitabilitas, dan Ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan*. ASET. Volume 9 Nomor 2. Agustus : 464-493.
- Patricia, M. (2014). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Set Kesempatan Investasi, dan Arus Kas Bebas terhadap Kebijakan Utang Perusahaan. *Skripsi*. Universitas Diponegoro.
- Permanasari, W, I. (2010). Pengaruh Kepemilikan Manajemen, Kepemilikan Institusional, dan Corporate Social Responsibility terhadap Nilai Perusahaan. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro. Semarang.

- Prambudi, S, T. (2006). *“CEO dan CSR : Antara Citra dan Kepedulian – Economics and Business Accounting Review”*. Edisi Ketiga/ September – Desember 2006.
- Purwaningtyas, P, F. (2011). Analisis Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2007-2009). *Skripsi*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Puspaningrum, Y. (2014). *Pengaruh Corporate Social Responsibility dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Profitabilitas Dan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderating (studi empiris pada perusahaan pertambangan di Bursa Efek Indonesia)*. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Yogyakarta.Yogyakarta.
- Rahayu, S. (2010). *Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan dengan Pengungkapan Corporate Social Responsibility dan Good Corporate Governance Sebagai Variabel Pemoderasi*. *Skripsi*. Universitas Diponogoro. Semarang.
- Retno, M, D, R., dan Priantinah, D. (2012). Pengaruh Good Corporate Governance dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2007-2010). *Jurnal Nominal*. Vol. I. No. I. Pp. 84-103.
- Rinati, I. (2009). Pengaruh Net Profit Margin (NPM), Return On Assets (ROA), dan Return On Equity (ROE) Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan yang Tercantum Dalam Indeks LQ45. *Skripsi*. Universitas Gunadarma. Depok.
- Roma, J, U, dan Sulardi. (2003). Manfaat Rasio Keuangan dalam Memprediksi Perubahan Laba Perusahaan Manufaktur. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*. Vol. 3, No. 2. Hal 102-126.
- Rustiarini, W, N. (2010). *Pengaruh Corporate Governance pada Hubungan Corporate Social Responsibility dan Nilai Perusahaan*. Simposium Nasional Akuntansi XIII.Purwokerto.
- Sari. Y. P. (2017). *Pengaruh Kinerja Keuangan dan Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Nilai Perusahaan Pada Bank Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2015*. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Yogyakarta.Yogyakarta.
- Sembiring, R, E. (2005). *Karakteristik Perusahaan dan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial : Studi Empiris pada Perusahaan yang Tercatat di Bursa Efek Jakarta*. Simposium Nasional Akuntansi VIII. Solo.

- Siallagan, H., dan Machfoedz, M. (2006). *Mekanisme Corporate Governance, Kualitas Laba dan Nilai Perusahaan*. Simposium Nasional Akuntansi IX. Padang.
- Sudarma, M. (2004). Pengaruh Struktur Kepemilikan Saham, Faktor Internal dan Faktor Eksternal terhadap Struktur Modal dan Nilai Perusahaan. *Disertasi*. Universitas Brawijaya Malang.
- Sugiarto, M. (2011). Pengaruh Struktur Kepemilikan dan Kebijakan Dividen terhadap Nilai Perusahaan dengan Kebijakan Hutang sebagai Intervening. *Jurnal Akuntansi Kontemporer*, 3(1): 1-25.
- Sugiyono. (2010). *Statistika untuk penelitian*. Bandung: alfabeta.
- Suharli, M, (2006). *Akuntansi untuk Bisnis Jasa dan Dagang*. Edisi Pertama. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Surya, Indra dan Ivan Yustifanda. (2006). *Penerapan Good Corporate Governance: Mengesampingkan Hak-Hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Suryonugroho, B. (2016). *Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajemen Dan Ukuran Perusahaan Sebagai variabel Moderating (Studi empiris pada perusahaan pemenang ISRA yang terdaftar dibursa efek Indonesia 2009-2012)*. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta.
- Susanto, B, P., dan Subekti, I. (2013). Pengaruh Corporate Social Responsibility dan Good Corporate Governance terhadap Nilai Perusahaan (Pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*. Vol. 1.No. 2.
- Suwardjono. (2010). *Teori Akuntansi: Perakayasaan Pelaporan Keuangan*. Edisi Ketiga. BPFE. Yogyakarta.
- Tarigan, J., dan Christiawan, Y, Y. (2007). *Kepemilikan Manajerial: Kebijakan Utang, Kinerja, dan Nilai Perusahaan*. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 9(1), hlm.1-8.
- Ujiyantho dan Pramuka. (2007). Mekanisme Corporate Governance, Manajemen laba dan kinerja keuangan (studi pada perusahaan go public sector manufaktur). *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi X. Makasar*.
- Ulupui, I, G, K, A. (2007). Analisis Pengaruh Rasio Likuiditas, Leverage, Aktivitas, dan Profitabilitas terhadap Return Saham. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis* Vol.2.
- Untung, B, H. (2008). *Corporate Social Responsibility*. Edisi Pertama. Sinar Grafika. Jakarta.

- Wahidahwati. (2002). *Kepemilikan Manajerial dan Agency Conflicts: Analisis Persamaan Simultan Non Linear dari Kepemilikan Manajerial, Penerimaan Risiko, Kebijakan Utang, Dan Kebijakan Dividen*". Prosiding Simposium Nasional Akuntansi V Semarang, 5-6 September, hlm. 601-623.
- Welim dan Rusiti. (2013). Pengaruh Kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan Institusional terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI). *e-journal.uajy.ac.id/6172/1/jurnal.pdf*.
- Wibowo, S. (2016). Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Kebijakan Deviden, dan Kebijakan Hutang terhadap Nilai Perusahaan. *Tesis*. Universitas Airlangga.
- Widiastuti, M., Midiastuty, P, P., dan Suranta, E. (2013). "*Dividend Policy and Foreign Ownership*". Simposium Nasional Akuntansi XVI, hlm. 3401-3423.
- www.Liputan6.com
- Yuniarti. C. (2014). *Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja dan Nilai Perusahaan Pada Perusahaan High Profile Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2013*. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Yogyakarta.Yogyakarta.
- Yuniasih, W, N dan Wirakusuma, G, M. (2007). Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Pengungkapan Corporate Social Responsibility dan Good Corporate Governance Sebagai Variabel Pemoderasi. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi. Universitas Udayana. Denpasar.
- Zuredah, K, I. (2010). Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Pengungkapan Corporate Social Responsibility Sebagai Variabel Pemoderasi. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi. Universitas Pembangunan Nasional. Jakarta.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Sampel Perusahaan Tahun 2012-2016

**DAFTAR SAMPEL PERUSAHAAN PERTAMBANGAN BATU BARA
YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA**

TAHUN 2012-2016

NO	Nama	Kode Emiten
1	Adaro Energy Tbk	ADRO
2	Bara Jaya Internasional Tbk	ATPK
3	Bumi Resources Tbk	BUMI
4	Bayan Resources Tbk	BYAN
5	Darma Henwa Tbk	DEWA
6	Delta Dunia Makmur Tbk	DOID
7	Garda Tujuh Buana Tbk	GTBO
8	Harum Energy Tbk	HRUM
9	Indo Tambangraya Megah Tbk	ITMG
10	Resources Alam Indonesia Tbk	KKGI
11	Samindo Resources Tbk	MYOH
12	Perdana Karya Perkasa Tbk	PKPK
13	Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk	PTBA
14	Petrosea Tbk	PTRO
15	Golden Eagle Energy Tbk	SMMT

Lampiran 2. Data CSR Tahun 2012-2016

$$\text{Rumus: CSRDIj} = \frac{\sum X_{ij}}{n_j}$$

No	Kode	Periode	Item yang diungkapkan	79 item	CSR
1	ADRO	2012	22	79	0,28
2	ATPK	2012	18	79	0,23
3	BUMI	2012	21	79	0,27
4	BYAN	2012	19	79	0,24
5	DEWA	2012	17	79	0,22
6	DOID	2012	20	79	0,25
7	GTBO	2012	24	79	0,30
8	HRUM	2012	19	79	0,24
9	ITMG	2012	21	79	0,27
10	KKGI	2012	21	79	0,27
11	MYOH	2012	22	79	0,28
12	PKPK	2012	20	79	0,25
13	PTBA	2012	23	79	0,29
14	PTRO	2012	21	79	0,27
15	SMMT	2012	20	79	0,25
16	ADRO	2013	22	79	0,28
17	ATPK	2013	18	79	0,23
18	BUMI	2013	21	79	0,27
19	BYAN	2013	19	79	0,24
20	DEWA	2013	17	79	0,22
21	DOID	2013	19	79	0,24
22	GTBO	2013	20	79	0,25
23	HRUM	2013	19	79	0,24
24	ITMG	2013	21	79	0,27
25	KKGI	2013	21	79	0,27
26	MYOH	2013	22	79	0,28
27	PKPK	2013	20	79	0,25
28	PTBA	2013	23	79	0,29
29	PTRO	2013	21	79	0,27
30	SMMT	2013	24	79	0,30
31	ADRO	2014	22	79	0,28
32	ATPK	2014	18	79	0,23
33	BUMI	2014	21	79	0,27
34	BYAN	2014	23	79	0,29

No	Kode	Periode	Item yang diungkapkan	79 item	CSR
35	DEWA	2014	19	79	0,24
36	DOID	2014	20	79	0,25
37	GTBO	2014	20	79	0,25
38	HRUM	2014	19	79	0,24
39	ITMG	2014	21	79	0,27
40	KKGI	2014	21	79	0,27
41	MYOH	2014	22	79	0,28
42	PKPK	2014	20	79	0,25
43	PTBA	2014	23	79	0,29
44	PTRO	2014	21	79	0,27
45	SMMT	2014	24	79	0,30
46	ADRO	2015	22	79	0,28
47	ATPK	2015	18	79	0,23
48	BUMI	2015	21	79	0,27
49	BYAN	2015	24	79	0,30
50	DEWA	2015	20	79	0,25
51	DOID	2015	19	79	0,24
52	GTBO	2015	20	79	0,25
53	HRUM	2015	19	79	0,24
54	ITMG	2015	21	79	0,27
55	KKGI	2015	21	79	0,27
56	MYOH	2015	22	79	0,28
57	PKPK	2015	20	79	0,25
58	PTBA	2015	19	79	0,24
59	PTRO	2015	21	79	0,27
60	SMMT	2015	20	79	0,25
61	ADRO	2016	22	79	0,28
62	ATPK	2016	18	79	0,23
63	BUMI	2016	21	79	0,27
64	BYAN	2016	24	79	0,30
65	DEWA	2016	20	79	0,25
66	DOID	2016	23	79	0,29
67	GTBO	2016	20	79	0,25
68	HRUM	2016	19	79	0,24
69	ITMG	2016	21	79	0,27
70	KKGI	2016	21	79	0,27
71	MYOH	2016	22	79	0,28
72	PKPK	2016	20	79	0,25

No	Kode	Periode	Item yang diungkapkan	79 item	CSR
73	PTBA	2016	20	79	0,25
74	PTRO	2016	21	79	0,27
75	SMMT	2016	20	79	0,25

Lampiran 3. Data Kepemilikan Manajerial Tahun 2012-2016

Rumus:

$$KM = \frac{\text{Saham yang dimiliki oleh manajer, dewan direksi dan manajemen}}{\text{Jumlah saham beredar}}$$

No	Kode	Periode	Saham yang Dimiliki Manajer	Jumlah Saham Beredar	Kepemilikan Manajerial
1	ADRO	2012	5.106.917.052,00	31.985.962.000,00	0,159661
2	ATPK	2012	0	914.324.669,00	0,000000
3	BUMI	2012	0	20.773.400.000,00	0,000000
4	BYAN	2012	0	3.333.333.500,00	0,000000
5	DEWA	2012	0	21.853.733.792,00	0,000000
6	DOID	2012	5.300.000,00	8.168.494.232,00	0,000649
7	GTBO	2012	0	2.500.000.000,00	0,000000
8	HRUM	2012	270.000,00	2.703.545.000,00	0,000100
9	ITMG	2012	137.000,00	1.129.925.000,00	0,000121
10	KKGI	2012	3.275.000,00	1.000.000.000,00	0,003275
11	MYOH	2012	0	1.470.875.000,00	0,000000
12	PKPK	2012	0	600.000.000,00	0,000000
13	PTBA	2012	60.000,00	2.304.131.850,00	0,000026
14	PTRO	2012	0	1.008.605.000,00	0,000000
15	SMMT	2012	0	900.000.000,00	0,000000
16	ADRO	2013	4.846.143.450,00	31.985.962.000,00	0,151508
17	ATPK	2013	0	5.760.245.414,00	0,000000
18	BUMI	2013	0	20.773.400.000,00	0,000000
19	BYAN	2013	-	3.333.333.500,00	0,000000
20	DEWA	2013	0	21.853.733.792,00	0,000000
21	DOID	2013	5.300.000,00	8.261.846.232,00	0,000642
22	GTBO	2013	0	2.500.000.000,00	0,000000
23	HRUM	2013	275.000,00	2.703.620.000,00	0,000102
24	ITMG	2013	155.000,00	1.129.925.000,00	0,000137
25	KKGI	2013	3.275.000,00	1.000.000.000,00	0,003275
26	MYOH	2013	0	2.206.312.500,00	0,000000
27	PKPK	2013	0	600.000.000,00	0,000000
28	PTBA	2013	60.000,00	2.304.131.850,00	0,000026
29	PTRO	2013	0	1.008.605.000,00	0,000000
30	SMMT	2013	0	900.000.000,00	0,000000
31	ADRO	2014	4.837.043.450,00	31.985.962.000,00	0,151224
32	ATPK	2014	0	5.760.245.414,00	0,000000

No	Kode	Periode	Saham yang Dimiliki Manajer	Jumlah Saham Beredar	Kepemilikan Manajerial
33	BUMI	2014	0	36.627.020.427,00	0,000000
34	BYAN	2014	0	3.333.333.500,00	0,000000
35	DEWA	2014	0	21.853.733.792,00	0,000000
36	DOID	2014	6.300.500,00	8.245.228.732,00	0,000764
37	GTBO	2014	0	2.500.000.000,00	0,000000
38	HRUM	2014	275.000,00	2.703.620.000,00	0,000102
39	ITMG	2014	153.000,00	1.129.925.000,00	0,000135
40	KKGI	2014	3.275.000,00	1.000.000.000,00	0,003275
41	MYOH	2014	0	2.206.312.500,00	0,000000
42	PKPK	2014	0	600.000.000,00	0,000000
43	PTBA	2014	60.000,00	2.304.131.850,00	0,000026
44	PTRO	2014	0	1.008.605.000,00	0,000000
45	SMMT	2014	0	3.150.000.000,00	0,000000
46	ADRO	2015	4.219.255.248,00	31.985.962.000,00	0,131910
47	ATPK	2015	0	5.760.245.414,00	0,000000
48	BUMI	2015	0	36.627.020.427,00	0,000000
49	BYAN	2015	0	3.333.333.500,00	0,000000
50	DEWA	2015	0	21.853.733.792,00	0,000000
51	DOID	2015	6.700.500,00	8.276.878.732,00	0,000810
52	GTBO	2015	0	2.500.000.000,00	0,000000
53	HRUM	2015	375.000,00	2.703.620.000,00	0,000139
54	ITMG	2015	173.000,00	1.129.925.000,00	0,000153
55	KKGI	2015	3.275.000,00	1.000.000.000,00	0,003275
56	MYOH	2015	0	2.206.312.500,00	0,000000
57	PKPK	2015	0	600.000.000,00	0,000000
58	PTBA	2015	130.000,00	2.304.131.850,00	0,000056
59	PTRO	2015	0	1.008.605.000,00	0,000000
60	SMMT	2015	0	3.150.000.000,00	0,000000
61	ADRO	2016	4.263.235.248,00	31.985.962.000,00	0,133285
62	ATPK	2016	0	5.760.245.414,00	0,000000
63	BUMI	2016	0	36.627.020.427,00	0,000000
64	BYAN	2016	0	3.333.333.500,00	0,000000
65	DEWA	2016	0	21.853.733.792,00	0,000000
66	DOID	2016	21.603.500,00	8.325.016.732,00	0,002595
67	GTBO	2016	0	2.500.000.000,00	0,000000
68	HRUM	2016	380.000,00	2.703.620.000,00	0,000141
69	ITMG	2016	108.500,00	1.129.925.000,00	0,000096
70	KKGI	2016	3.275.000,00	1.000.000.000,00	0,003275

No	Kode	Periode	Saham yang Dimiliki Manajer	Jumlah Saham Beredar	Kepemilikan Manajerial
71	MYOH	2016	0	2.206.312.500,00	0,000000
72	PKPK	2016	0	600.000.000,00	0,000000
73	PTBA	2016	56.000,00	2.304.131.850,00	0,000024
74	PTRO	2016	0	1.008.605.000,00	0,000000
75	SMMT	2016	0	3.150.000.000,00	0,000000

Lampiran 4. Data Kepemilikan Institusional Tahun 2012-2016

$$\text{Rumus: } KI = \frac{\text{Kepemilikan Saham institusional}}{\text{Jumlah saham yang beredar}}$$

No	Kode	Periode	Saham yang Dimiliki Institusi	Jumlah Saham Beredar	Kepemilikan Institusional
1	ADRO	2012	14.045.425.500,00	31.985.962.000,00	0,44
2	ATPK	2012	668.301.534,00	914.324.669,00	0,73
3	BUMI	2012	6.061.699.637,00	20.773.400.000,00	0,29
4	BYAN	2012	1.142.295.500,00	3.333.333.500,00	0,34
5	DEWA	2012	8.585.395.390,00	21.853.733.792,00	0,39
6	DOID	2012	3.264.000.000,00	8.168.494.232,00	0,40
7	GTBO	2012	1.494.956.000,00	2.500.000.000,00	0,60
8	HRUM	2012	1.905.483.500,00	2.703.545.000,00	0,70
9	ITMG	2012	734.452.000,00	1.129.925.000,00	0,65
10	KKGI	2012	628.878.000,00	1.000.000.000,00	0,63
11	MYOH	2012	1.464.569.804,00	1.470.875.000,00	1,00
12	PKPK	2012	0	600.000.000,00	0,00
13	PTBA	2012	1.498.087.500,00	2.304.131.850,00	0,65
14	PTRO	2012	704.014.200,00	1.008.605.000,00	0,70
15	SMMT	2012	696.903.659,00	900.000.000,00	0,77
16	ADRO	2013	14.045.425.500,00	31.985.962.000,00	0,44
17	ATPK	2013	5.531.933.279,00	5.760.245.414,00	0,96
18	BUMI	2013	6.061.699.637,00	20.773.400.000,00	0,29
19	BYAN	2013	1.142.295.500,00	3.333.333.500,00	0,34
20	DEWA	2013	8.585.395.390,00	21.853.733.792,00	0,39
21	DOID	2013	3.264.000.000,00	8.261.846.232,00	0,40
22	GTBO	2013	1.502.235.000,00	2.500.000.000,00	0,60
23	HRUM	2013	1.911.958.500,00	2.703.620.000,00	0,71
24	ITMG	2013	734.452.000,00	1.129.925.000,00	0,65
25	KKGI	2013	628.878.000,00	1.000.000.000,00	0,63
26	MYOH	2013	1.736.114.275,00	2.206.312.500,00	0,79
27	PKPK	2013	0	600.000.000,00	0,00
28	PTBA	2013	1.498.087.500,00	2.304.131.850,00	0,65
29	PTRO	2013	704.014.200,00	1.008.605.000,00	0,70
30	SMMT	2013	713.266.159,00	900.000.000,00	0,79
31	ADRO	2014	14.045.425.500,00	31.985.962.000,00	0,44
32	ATPK	2014	5.123.422.384,00	5.760.245.414,00	0,89
33	BUMI	2014	14.777.485.702,00	36.627.020.427,00	0,40
34	BYAN	2014	1.142.295.500,00	3.333.333.500,00	0,34

No	Kode	Periode	Saham yang Dimiliki Institusi	Jumlah Saham Beredar	Kepemilikan Institusional
35	DEWA	2014	8.585.395.390,00	21.853.733.792,00	0,39
36	DOID	2014	3.264.000.000,00	8.245.228.732,00	0,40
37	GTBO	2014	1.502.235.000,00	2.500.000.000,00	0,60
38	HRUM	2014	1.911.958.500,00	2.703.620.000,00	0,71
39	ITMG	2014	735.092.000,00	1.129.925.000,00	0,65
40	KKGI	2014	648.595.500,00	1.000.000.000,00	0,65
41	MYOH	2014	1.736.114.275,00	2.206.312.500,00	0,79
42	PKPK	2014	0	600.000.000,00	0,00
43	PTBA	2014	1.498.087.500,00	2.304.131.850,00	0,65
44	PTRO	2014	704.014.200,00	1.008.605.000,00	0,70
45	SMMT	2014	2.493.504.603,00	3.150.000.000,00	0,79
46	ADRO	2015	14.045.425.500,00	31.985.962.000,00	0,44
47	ATPK	2015	5.123.422.384,00	5.760.245.414,00	0,89
48	BUMI	2015	10.777.485.702,00	36.627.020.427,00	0,29
49	BYAN	2015	1.142.295.500,00	3.333.333.500,00	0,34
50	DEWA	2015	8.585.395.390,00	21.853.733.792,00	0,39
51	DOID	2015	3.834.332.200,00	8.276.878.732,00	0,46
52	GTBO	2015	1.502.235.000,00	2.500.000.000,00	0,60
53	HRUM	2015	1.923.222.600,00	2.703.620.000,00	0,71
54	ITMG	2015	793.069.556,00	1.129.925.000,00	0,70
55	KKGI	2015	648.903.500,00	1.000.000.000,00	0,65
56	MYOH	2015	1.736.114.275,00	2.206.312.500,00	0,79
57	PKPK	2015	0	600.000.000,00	0,00
58	PTBA	2015	1.498.087.500,00	2.304.131.850,00	0,65
59	PTRO	2015	704.014.200,00	1.008.605.000,00	0,70
60	SMMT	2015	2.493.567.203,00	3.150.000.000,00	0,79
61	ADRO	2016	14.045.425.500,00	31.985.962.000,00	0,44
62	ATPK	2016	5.123.422.384,00	5.760.245.414,00	0,89
63	BUMI	2016	12.041.699.637,00	36.627.020.427,00	0,33
64	BYAN	2016	1.142.295.200,00	3.333.333.500,00	0,34
65	DEWA	2016	7.885.395.390,00	21.853.733.792,00	0,36
66	DOID	2016	3.264.000.000,00	8.325.016.732,00	0,39
67	GTBO	2016	1.502.235.000,00	2.500.000.000,00	0,60
68	HRUM	2016	1.992.488.700,00	2.703.620.000,00	0,74
69	ITMG	2016	736.071.000,00	1.129.925.000,00	0,65
70	KKGI	2016	648.883.500,00	1.000.000.000,00	0,65
71	MYOH	2016	1.402.479.275,00	2.206.312.500,00	0,64
72	PKPK	2016	0	600.000.000,00	0,00

No	Kode	Periode	Saham yang Dimiliki Institusi	Jumlah Saham Beredar	Kepemilikan Institusional
73	PTBA	2016	1.498.087.500,00	2.304.131.850,00	0,65
74	PTRO	2016	704.014.200,00	1.008.605.000,00	0,70
75	SMMT	2016	2.304.070.203,00	3.150.000.000,00	0,73

Lampiran 5. Data Komposisi Komisaris Independen Tahun 2012-2016

Rumus: $KKI = \frac{\text{Jumlah komisaris independen}}{\text{total anggota dewan komisaris}} \times 100$

No	Kode	Periode	Jumlah Komisaris Independen	Total Anggota Dewan Komisaris	x 100%	Komposisi Komisaris Independen
1	ADRO	2012	2	6	100%	0,33
2	ATPK	2012	1	3	100%	0,33
3	BUMI	2012	3	13	100%	0,23
4	BYAN	2012	2	5	100%	0,40
5	DEWA	2012	1	3	100%	0,33
6	DOID	2012	4	8	100%	0,50
7	GTBO	2012	0	3	100%	0,00
8	HRUM	2012	2	5	100%	0,40
9	ITMG	2012	0	6	100%	0,00
10	KKGI	2012	2	5	100%	0,40
11	MYOH	2012	1	3	100%	0,33
12	KPKK	2012	1	3	100%	0,33
13	PTBA	2012	2	6	100%	0,33
14	PTRO	2012	3	7	100%	0,43
15	SMMT	2012	3	5	100%	0,60
16	ADRO	2013	2	5	100%	0,40
17	ATPK	2013	1	3	100%	0,33
18	BUMI	2013	4	7	100%	0,57
19	BYAN	2013	2	5	100%	0,40
20	DEWA	2013	1	4	100%	0,25
21	DOID	2013	4	8	100%	0,50
22	GTBO	2013	0	3	100%	0,00
23	HRUM	2013	2	5	100%	0,40
24	ITMG	2013	0	6	100%	0,00
25	KKGI	2013	1	4	100%	0,25
26	MYOH	2013	1	3	100%	0,33
27	KPKK	2013	1	3	100%	0,33
28	PTBA	2013	2	6	100%	0,33
29	PTRO	2013	3	7	100%	0,43
30	SMMT	2013	3	5	100%	0,60
31	ADRO	2014	2	5	100%	0,40
32	ATPK	2014	1	3	100%	0,33
33	BUMI	2014	4	7	100%	0,57

No	Kode	Periode	Jumlah Komisaris Independen	Total Anggota Dewan Komisaris	x 100%	Komposisi Komisaris Independen
34	BYAN	2014	2	5	100%	0,40
35	DEWA	2014	2	5	100%	0,40
36	DOID	2014	4	6	100%	0,67
37	GTBO	2014	0	3	100%	0,00
38	HRUM	2014	2	5	100%	0,40
39	ITMG	2014	2	6	100%	0,33
40	KKGI	2014	2	5	100%	0,40
41	MYOH	2014	1	3	100%	0,33
42	PKPK	2014	1	3	100%	0,33
43	PTBA	2014	2	6	100%	0,33
44	PTRO	2014	2	5	100%	0,40
45	SMMT	2014	3	5	100%	0,60
46	ADRO	2015	2	5	100%	0,40
47	ATPK	2015	1	3	100%	0,33
48	BUMI	2015	0	3	100%	0,00
49	BYAN	2015	2	5	100%	0,40
50	DEWA	2015	2	6	100%	0,33
51	DOID	2015	4	7	100%	0,57
52	GTBO	2015	1	3	100%	0,33
53	HRUM	2015	2	6	100%	0,33
54	ITMG	2015	2	6	100%	0,33
55	KKGI	2015	2	5	100%	0,40
56	MYOH	2015	1	3	100%	0,33
57	PKPK	2015	1	3	100%	0,33
58	PTBA	2015	2	6	100%	0,33
59	PTRO	2015	2	5	100%	0,40
60	SMMT	2015	3	4	100%	0,75
61	ADRO	2016	2	5	100%	0,40
62	ATPK	2016	1	2	100%	0,50
63	BUMI	2016	0	3	100%	0,00
64	BYAN	2016	2	5	100%	0,40
65	DEWA	2016	2	6	100%	0,33
66	DOID	2016	4	7	100%	0,57
67	GTBO	2016	1	3	100%	0,33
68	HRUM	2016	2	6	100%	0,33
69	ITMG	2016	2	5	100%	0,40

No	Kode	Periode	Jumlah Komisaris Independen	Total Anggota Dewan Komisaris	x 100%	Komposisi Komisaris Independen
70	KKGI	2016	2	5	100%	0,40
71	MYOH	2016	1	3	100%	0,33
72	PKPK	2016	1	3	100%	0,33
73	PTBA	2016	2	6	100%	0,33
74	PTRO	2016	2	5	100%	0,40
75	SMMT	2016	3	5	100%	0,60

Lampiran 6. Data Nilai Perusahaan Tahun 2012-2016

Rumus:

$PBV = \frac{\text{Harga Saham}}{\text{Nilai Buku Saham (BV)}}$
$BV = \frac{(TA-TL)}{\text{Saham Beredar (SB)}}$

No	Kode	Periode	Total Aset	Total Liabilities	Saham Beredar	Nilai Buku Saham	Harga Saham	Nilai Perusahaan
1	ADRO	2012	66.922.560.000.000,00	36.972.020.000.000,00	31.985.962.000,00	936,3651467	1.590,00	1,70
2	ATPK	2012	150.829.602.000.000,00	107.005.545.000,00	914.324.669,00	47,93052018	129,00	2,69
3	BUMI	2012	71.573.946.490.000.000,00	66.892.350.360.000,00	20.773.400.000,00	225,3649441	590,00	2,62
4	BYAN	2012	19.091.049.880.000.000,00	12.014.138.780.000,00	3.333.333.500,00	2123,073224	8.450,00	3,98
5	DEWA	2012	4.394.758.000.000.000,00	1.659.034.240.000,00	21.853.733.792,00	125,183357	50,00	0,40
6	DOID	2012	11.597.708.200.000.000,00	10.702.639.470.000,00	8.168.494.232,00	109,5757314	153,00	1,40
7	GTBO	2012	1.706.839.730.000.000,00	915.348.170.000,00	2.500.000.000,00	316,596624	3.900,00	12,32
8	HRUM	2012	5.386.393.010.000.000,00	1.099.998.620.000,00	2.703.545.000,00	1585,471812	6.000,00	3,78
9	ITMG	2012	14.912.240.000.000.000,00	4.888.070.000.000,00	1.129.925.000,00	8871,535721	41.550,00	4,68
10	KKGI	2012	1.038.015.080.000.000,00	305.026.670.000,00	1.000.000.000,00	732,98841	2.475,00	3,38
11	MYOH	2012	1.292.581.025.000.000,00	1.021.523.918.000,00	1.470.875.000,00	184,2828976	840,00	4,56
12	PKPK	2012	396.277.483.000.000,00	221.555.145.000,00	600.000.000,00	291,2038967	225,00	0,77
13	PTBA	2012	12.728.981.000.000.000,00	4.223.812.000.000,00	2.304.131.850,00	3691,268362	15.500,00	4,20
14	PTRO	2012	5.297.420.000.000.000,00	3.424.520.000.000,00	1.008.605.000,00	1856,921193	1.320,00	0,71
15	SMMT	2012	480.179.294.813,00	34.165.680.348,00	900.000.000,00	495,5706827	3.625,00	7,31

No	Kode	Periode	Total Aset	Total Liabilities	Saham Beredar	Nilai Buku Saham	Harga Saham	Nilai Perusahaan
16	ADRO	2013	67.337.870.000.000,00	35.387.840.000.000,00	31.985.962.000,00	998,8766322	1.090,00	1,09
17	ATPK	2013	1.489.339.945.000,00	368.122.514.000,00	5.760.245.414,00	194,6475107	270,00	1,39
18	BUMI	2013	70.039.081.150.000,00	73.068.676.500.000,00	20.773.400.000,00	-145,8401297	300,00	-2,06
19	BYAN	2013	15.667.888.530.000,00	11.169.476.350.000,00	3.333.333.500,00	1349,523587	8.500,00	6,30
20	DEWA	2013	3.657.580.290.000,00	1.436.500.910.000,00	21.853.733.792,00	101,6338627	50,00	0,49
21	DOID	2013	10.818.054.000.000,00	10.133.915.640.000,00	8.261.846.232,00	82,80695873	92,00	1,11
22	GTBO	2013	884.614.290.000,00	152.734.720.000,00	2.500.000.000,00	292,751828	1.550,00	5,29
23	HRUM	2013	4.806.211.370.000,00	856.455.460.000,00	2.703.620.000,00	1460,913853	2.750,00	1,88
24	ITMG	2013	13.921.400.000.000,00	4.282.850.000.000,00	1.129.925.000,00	8530,256433	28.500,00	3,34
25	KKGI	2013	1.060.877.020.000,00	327.369.960.000,00	1.000.000.000,00	733,50706	2.050,00	2,79
26	MYOH	2013	1.815.818.263.000,00	1.033.563.250.000,00	2.206.312.500,00	354,5531347	490,00	1,38
27	PKPK	2013	361.548.802.000,00	186.390.421.000,00	600.000.000,00	291,930635	86,00	0,29
28	PTBA	2013	11.677.155.000.000,00	4.125.586.000.000,00	2.304.131.850,00	3277,403157	10.200,00	3,11
29	PTRO	2013	5.092.420.000.000,00	3.116.660.000.000,00	1.008.605.000,00	1958,903634	1.150,00	0,59
30	SMMT	2013	626.650.331.630,00	162.422.398.419,00	900.000.000,00	515,8088147	5.900,00	11,44
31	ADRO	2014	64.136.480.000.000,00	31.555.000.000.000,00	31.985.962.000,00	1018,618105	1.040,00	1,02
32	ATPK	2014	1.795.865.062.000,00	621.707.633.000,00	5.760.245.414,00	203,838091	209,00	1,03
33	BUMI	2014	65.005.289.180.000,00	72.335.702.760.000,00	36.627.020.427,00	-200,1367705	80,00	-0,40
34	BYAN	2014	11.616.563.140.000,00	9.061.242.690.000,00	3.333.333.500,00	766,5960967	6.650,00	8,67
35	DEWA	2014	3.558.590.070.000,00	1.334.524.680.000,00	21.853.733.792,00	101,7704989	50,00	0,49
36	DOID	2014	9.053.054.070.000,00	8.133.737.790.000,00	8.245.228.732,00	111,4967589	193,00	1,73
37	GTBO	2014	810.042.030.000,00	124.262.800.000,00	2.500.000.000,00	274,311692	363,00	1,32

No	Kode	Periode	Total Aset	Total Liabilities	Saham Beredar	Nilai Buku Saham	Harga Saham	Nilai Perusahaan
38	HRUM	2014	4.441.068.580.000,00	821.381.740.000,00	2.703.620.000,00	1338,829732	1.660,00	1,24
39	ITMG	2014	13.073.480.000.000,00	4.087.240.000.000,00	1.129.925.000,00	7952,95263	15.375,00	1,93
40	KKGI	2014	995.686.910.000,00	273.742.890.000,00	1.000.000.000,00	721,94402	1.005,00	1,39
41	MYOH	2014	2.031.097.095.000,00	1.027.787.269.000,00	2.206.312.500,00	454,7451125	458,00	1,01
42	PKPK	2014	303.255.720.000,00	156.521.131.000,00	600.000.000,00	244,5576483	88,00	0,36
43	PTBA	2014	14.812.023.000.000,00	6.141.181.000.000,00	2.304.131.850,00	3763,170931	12.500,00	3,32
44	PTRO	2014	4.677.320.000.000,00	2.749.050.000.000,00	1.008.605.000,00	1911,818799	925,00	0,48
45	SMMT	2014	724.974.385.620,00	266.787.049.838,00	3.150.000.000,00	145,4562971	1.785,00	12,27
46	ADRO	2015	59.586.290.000.000,00	26.055.860.000.000,00	31.985.962.000,00	1048,285807	515,00	0,49
47	ATPK	2015	1.773.314.414.000,00	763.673.326.000,00	5.760.245.414,00	175,2774431	194,00	1,11
48	BUMI	2015	33.942.762.580.000,00	62.991.879.890.000,00	36.627.020.427,00	-793,1062088	50,00	-0,06
49	BYAN	2015	9.378.517.280.000,00	7.656.917.130.000,00	3.333.333.500,00	516,4800192	7.875,00	15,25
50	DEWA	2015	3.729.749.320.000,00	1.482.185.080.000,00	21.853.733.792,00	102,8457774	50,00	0,49
51	DOID	2015	8.317.960.610.000,00	7.467.959.720.000,00	8.276.878.732,00	102,695825	54,00	0,53
52	GTBO	2015	601.598.380.000,00	75.371.740.000,00	2.500.000.000,00	210,490656	260,00	1,24
53	HRUM	2015	3.806.540.050.000,00	372.243.420.000,00	2.703.620.000,00	1270,258627	675,00	0,53
54	ITMG	2015	11.783.630.000.000,00	3.438.060.000.000,00	1.129.925.000,00	7385,950395	5.725,00	0,78
55	KKGI	2015	985.415.750.000,00	217.804.100.000,00	1.000.000.000,00	767,61165	420,00	0,55
56	MYOH	2015	1.612.327.090.000,00	678.851.230.000,00	2.206.312.500,00	423,09322	525,00	1,24
57	PKPK	2015	170.598.564.000,00	87.083.602.000,00	600.000.000,00	139,1916033	50,00	0,36
58	PTBA	2015	16.894.043.000.000,00	7.606.496.000.000,00	2.304.131.850,00	4030,822715	4.525,00	1,12
59	PTRO	2015	4.253.680.000.000,00	2.470.910.000.000,00	1.008.605.000,00	1767,560145	290,00	0,16

No	Kode	Periode	Total Aset	Total Liabilities	Saham Beredar	Nilai Buku Saham	Harga Saham	Nilai Perusahaan
60	SMMT	2015	712.785.113.458,00	313.673.790.462,00	3.150.000.000,00	126,7020073	171,00	1,35
61	ADRO	2016	65.222.570.000.000,00	27.363.750.000.000,00	31.985.962.000,00	1183,607359	1.695,00	1,43
62	ATPK	2016	1.585.848.621.000,00	848.700.573.000,00	5.760.245.414,00	127,9716392	194,00	1,52
63	BUMI	2016	31.021.937.000.000,00	58.869.685.070.000,00	36.627.020.427,00	-760,3061277	278,00	-0,37
64	BYAN	2016	8.246.866.610.000,00	6.365.356.870.000,00	3.333.333.500,00	564,4528938	6.000,00	10,63
65	DEWA	2016	3.813.397.060.000,00	1.562.100.350.000,00	21.853.733.792,00	103,0165706	50,00	0,49
66	DOID	2016	8.822.757.040.000,00	7.558.069.190.000,00	8.325.016.732,00	151,9141511	510,00	3,36
67	GTBO	2016	551.069.060.000,00	76.926.050.000,00	2.500.000.000,00	189,657204	260,00	1,37
68	HRUM	2016	4.133.658.530.000,00	579.355.320.000,00	2.703.620.000,00	1314,645997	2.140,00	1,63
69	ITMG	2016	12.097.920.000.000,00	3.023.620.000.000,00	1.129.925.000,00	8030,887006	16.875,00	2,10
70	KKGI	2016	987.087.500.000,00	142.990.440.000,00	1.000.000.000,00	844,09706	1.500,00	1,78
71	MYOH	2016	1.472.542.620.000,00	397.730.010.000,00	2.206.312.500,00	487,1533883	630,00	1,29
72	PKPK	2016	157.702.767.000,00	87.917.337.000,00	600.000.000,00	116,30905	50,00	0,43
73	PTBA	2016	18.576.774.000.000,00	8.024.369.000.000,00	2.304.131.850,00	4579,774808	12.500,00	2,73
74	PTRO	2016	3.934.250.000.000,00	2.229.760.000.000,00	1.008.605.000,00	1689,947997	720,00	0,43
75	SMMT	2016	636.742.340.559,00	255.549.688.996,00	3.150.000.000,00	121,0135402	149,00	1,23

Lampiran 7. Indikator Pengungkapan CSR

INDIKATOR PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

BERDASARKAN GLOBAL REPORTING INITIATIVE (GRI)

1. Indikator Kinerja Ekonomi

Aspek: Kinerja Ekonomi

- EC1 Perolehan dan distribusi ekonomi langsung yang meliputi pendapatan, biaya operasi, imbalan jasa karyawan, donasi dan investasi komunitas lainnya, laba ditahan dan pembayaran kepada penyandang dana serta pemerintah.
- EC2 Implikasi finansial dan risiko lainnya akibat perubahan iklim serta peluangnya bagi aktivitas organisasi.
- EC3 Jaminan kewajiban organisasi terhadap program imbalan pasti.
- EC4 Bantuan finansial yang signifikan dari pemerintah.

Aspek: Kehadiran Pasar

- EC5 Rentang rasio standar upah terendah dibandingkan dengan upah minimum setempat pada lokasi operasi yang signifikan.
- EC6 Kebijakan, praktik dan proporsi pengeluaran untuk pemasok lokal pada lokasi operasi yang signifikan.
- EC7 Prosedur penerimaan pegawai lokal dan proporsi manajemen senior lokal yang dipekerjakan pada lokasi operasi yang signifikan.

Aspek: Dampak Ekonomi Tidak Langsung

- EC8 Pembangunan dan dampak dari investasi infrastruktur serta jasa yang diberikan untuk kepentingan publik secara komersial dan natura.
- EC9 Pemahaman dan penjelasan dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan, termasuk seberapa luas dampaknya.

2. Indikator Kinerja Lingkungan

Aspek: Material

- EN1 Penggunaan Bahan; diperinci berdasarkan berat atau volume
- EN2 Persentase Penggunaan Bahan Daur Ulang.

Aspek: Energi

- EN3 Penggunaan Energi Langsung dari Sumberdaya Energi Primer.
- EN4 Pemakaian Energi Tidak Langsung Berdasarkan Sumber Primer.
- EN5 Penghematan Energi melalui Konservasi dan Peningkatan Efisiensi.
- EN6 Inisiatif untuk mendapatkan produk dan jasa berbasis energi efisien atau energi yang dapat diperbarui serta pengurangan persyaratan kebutuhan energi sebagai akibat dari inisiatif tersebut.
- EN7 Inisiatif untuk mengurangi konsumsi energi tidak langsung dan pengurangan yang dicapai.

Aspek: Air

- EN8 Total pengambilan air per sumber.
- EN9 Sumber air yang terpengaruh secara signifikan akibat pengambilan air.

EN10 Persentase dan total volume air yang digunakan kembali dan didaur ulang.

Aspek: Biodiversitas

EN11 Lokasi dan ukuran tanah yang dimiliki, disewa dan dikelola oleh organisasi pelapor yang berlokasi di dalam atau yang berdekatan dengan daerah yang diproteksi (dilindungi) atau daerah-daerah yang memiliki nilai keanekaragaman hayati yang tinggi di luar daerah yang diproteksi.

EN12 Uraian atas berbagai dampak signifikan yang diakibatkan oleh aktivitas, produk dan jasa organisasi pelapor terhadap keanekaragaman hayati di daerah yang dilindungi dan daerah yang memiliki keanekaragaman hayati bernilai tinggi di luar daerah yang dilindungi.

EN13 Perlindungan dan pemulihan habitat

EN14 Strategi, tindakan dan rencana mendatang untuk mengelola dampak terhadap keanekaragaman hayati.

EN15 Jumlah spesies berdasarkan tingkat risiko kepunahan yang masuk dalam Daftar Merah IUCN (IUCN Red List Species) dan yang termasuk dalam daftar konservasi nasional dengan habitat di daerah-daerah yang terkena dampak operasi.

Aspek: Emisi, Efluen, dan Limbah

EN16 Jumlah emisi gas rumah kaca yang bersifat langsung maupun tidak langsung dan dirinci berdasarkan berat.

EN17 Emisi gas rumah kaca tidak langsung lainnya diperinci berdasarkan berat.

EN18 Inisiatif untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan pencapaiannya.

EN19 Emisi bahan kimia yang merusak lapisan Ozon (Ozone-depleting substances/ODS) diperinci berdasarkan berat.

EN20 NOX, SOX dan emisi udara signifikan lainnya yang diperinci berdasarkan jenis dan berat.

EN21 Jumlah buangan air menurut kualitas dan tujuan.

- EN22 Jumlah berat limbah menurut jenis dan metode pembuangan.
- EN23 Jumlah dan volume tumpahan yang signifikan.
- EN24 Berat limbah yang diangkut, diimpor, diekspor atau diolah yang dianggap berbahaya menurut Lampiran Konservasi Basel I, II, III dan VIII serta persentase limbah yang diangkut secara internasional.
- EN25 Identitas, ukuran, status proteksi dan nilai keanekaragaman hayati badan air serta habitat terkait yang secara signifikan dipengaruhi oleh pembuangan dan limpasan air organisasi pelapor.
- EN26 Inisiatif untuk mengurangi dampak lingkungan produk dan jasa serta sejauh mana dampak pengurangan tersebut.
- EN27 Persentase produk terjual dan bahan kemasannya yang ditarik menurut kategori.

Aspek: Kepatuhan

- EN28 Nilai moneter denda yang signifikan dan jumlah sanksi nonmoneter atas pelanggaran terhadap hukum dan regulasi lingkungan.

Aspek: Pengangkutan/Transportasi

- EN29 Dampak lingkungan yang signifikan akibat pemindahan produk dan barang-barang lain serta material yang digunakan untuk operasi perusahaan dan tenaga kerja yang memindahkan.

Aspek: Menyeluruh

- EN30 Jumlah pengeluaran untuk proteksi dan investasi lingkungan menurut jenis.

3. Praktik Tenaga Kerja dan Pekerjaan yang Layak

Aspek: Pekerjaan

- LA1 Jumlah angkatan kerja menurut jenis pekerjaan, kontrak pekerjaan dan wilayah.
- LA2 Jumlah dan tingkat perputaran karyawan menurut kelompok usia, jenis kelamin dan wilayah.
- LA3 Manfaat yang disediakan bagi karyawan tetap (purna waktu) yang tidak disediakan bagi karyawan tidak tetap (paruh waktu) menurut kegiatan pokoknya.

Aspek: Tenaga Kerja/Hubungan Manajemen

- LA4 Persentase karyawan yang dilindungi perjanjian tawar-menawar kolektif tersebut.
- LA5 Masa pemberitahuan minimal tentang perubahan kegiatan penting, termasuk apakah hal tersebut dijelaskan dalam perjanjian kolektif tersebut.

Aspek: Kesehatan dan Keselamatan Jabatan

- LA6 Persentase jumlah angkatan kerja yang resmi diwakili dalam panitia Kesehatan dan Keselamatan antara manajemen dan pekerja yang membantu memantau dan memberi nasihat untuk program keselamatan dan kesehatan jabatan.
- LA7 Tingkat kecelakaan fisik, penyakit karena jabatan, hari-hari yang hilang dan ketidakhadiran dan jumlah kematian karena pekerjaan menurut wilayah.
- LA8 Program pendidikan, pelatihan, penyuluhan/bimbingan, pencegahan, pengendalian risiko setempat untuk membantu para karyawan, anggota keluarga dan masyarakat mengenai penyakit berat atau berbahaya.
- LA9 Masalah kesehatan dan keselamatan yang tercakup dalam perjanjian resmi dengan serikat karyawan.

Aspek: Pelatihan dan Pendidikan

- LA10 Rata-rata jam pelatihan tiap tahun tiap karyawan menurut kategori/kelompok karyawan.
- LA11 Program untuk pengaturan keterampilan dan pembelajaran sepanjang hayat yang menunjang kelangsungan pekerjaan karyawan dan membantu mereka dalam mengatur akhir karier.
- LA12 Persentase karyawan yang menerima peninjauan kinerja dan pengembangan karier secara teratur.

Aspek: Keberagaman dan Kesempatan Setara

- LA13 Komposisi badan pengelola/penguasa dan perincian karyawan tiap kategori/kelompok menurut jenis kelamin, kelompok, usia, keanggotaan kelompok minoritas dan keanekaragaman indikator lain.
- LA14 Perbandingan atau rasio gaji dasar pria terhadap wanita menurut kelompok atau kategori karyawan.

4. Hak Asasi Manusia

Aspek: Praktek Investasi dan Pengadaan

- HR1 Persentase dan jumlah perjanjian investasi signifikan yang memuat klausul HAM atau telah menjalani proses skrining/filtrasi terkait dengan aspek hak asasi manusia.
- HR2 Persentase pemasok dan kontraktor signifikan yang telah menjalani proses skrining/filtrasi aspek hak asasi manusia.
- HR3 Jumlah waktu pelatihan bagi karyawan dalam hal mengenai kebijakan dan prosedur yang berakitan dengan aspek HAM yang sesuai dengan kegiatan organisasi, termasuk persentase karyawan yang telah menjalani pelatihan.

Aspek: Nondiskriminasi

- HR4 Jumlah kasus diskriminasi yang terjadi dan tindakan yang diambil/dilakukan.

Aspek: Kebebasan Berserikat dan Berunding Bersama Berkumpul

HR5 Segala kegiatan berserikat dan berkumpul yang teridentifikasi dapat menimbulkan risiko yang signifikan serta tindakan yang diambil untuk mendukung hak-hak tersebut.

Aspek: Pekerja Anak

HR6 Kegiatan yang teridentifikasi mengandung risiko yang signifikan dapat menimbulkan terjadinya kasus pekerja anak dan langkah-langkah yang diambil untuk mendukung upaya penghapusan pekerja anak.

Aspek: Kerja Paksa dan Kerja Wajib

HR7 Kegiatan yang teridentifikasi mengandung risiko yang signifikan dapat menimbulkan kasus kerja paksa atau kerja wajib dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mendukung upaya penghapusan kerja paksa atau kerja wajib.

Aspek: Praktik atau Tindakan Pengamanan

HR8 Persentase personel penjaga keamanan yang terlatih dalam hal kebijakan dan prosedur organisasi terkait dengan aspek HAM yang sesuai dengan kegiatan organisasi.

Aspek: Hak Penduduk Asli

HR9 Jumlah kasus pelanggaran yang terkait dengan hak penduduk asli dan langkah-langkah yang diambil.

5. Masyarakat/Sosial

Aspek: Komunitas

S01 Sifat dasar, ruang lingkup dan keefektifan setiap program dan praktik yang dilakukan untuk menilai dan mengelola dampak operasi terhadap masyarakat, baik pada saat memulai, beroperasi maupun mengakhiri.

Aspek: Korupsi

S02 Persentase dan jumlah unit usaha yang memiliki risiko terhadap korupsi.

S03 Persentase pegawai yang dilatih dalam kebijakan dan prosedur antikorupsi.

S04 Tindakan yang diambil dalam menanggapi kejadian korupsi.

Aspek: Kebijakan Publik

S05 Kedudukan kebijakan publik dan partisipasi dalam proses melobi dan pembuatan kebijakan publik.

S06 Nilai kontribusi finansial dan natura kepada partai politik, politisi dan institusi terkait berdasarkan negara dimana perusahaan beroperasi.

Aspek: Kelakuan Tidak Bersaing

S07 Jumlah tindakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan anti persaingan, anti trust, praktik monopoli dan sanksinya.

Aspek: Kepatuhan

S08 Nilai uang dari denda signifikan dan jumlah sanksi nonmoneter untuk pelanggaran hukum dan peraturan yang dilakukan.

6. Tanggung Jawab Produk

Aspek: Kesehatan dan Keamanan Pelanggan

PR1 Tahapan daur hidup dimana dampak produk dan jasa yang menyangkut kesehatan dan keamanan dinilai untuk penyempurnaan dan persentase dari kategori produk dan jasa yang penting dan harus mengikuti prosedur tersebut.

PR2 Jumlah pelanggaran terhadap peraturan dan etika mengenai dampak kesehatan dan keselamatan suatu produk dan jasa selama daur hidup per produk.

Aspek: Pemasangan Label bagi Produk dan Jasa

- PR3 Jenis informasi produk dan jasa yang dipersyaratkan oleh prosedur dan persentase produk serta jasa yang signifikan berkaitan dengan informasi yang dipersyaratkan tersebut.
- PR4 Jumlah pelanggaran peraturan dan voluntary codes mengenai penyediaan informasi produk dan jasa serta pemberian labe per produk.
- PR5 Praktik yang berkaitan dengan kepuasan pelanggan termasuk hasil survei yang mengukur kepuasan pelanggan.

Aspek: Komunikasi Pemasaran

- PR6 Program-program untuk ketaatan pada hukum, standar dan voluntary codes yang terkait dengan komunikasi pemasaran, seperti periklanan, promosi dan sponsorship.
- PR7 Jumlah pelanggaran peraturan dan voluntary codes sukarela mengenai komunikasi pemasaran, seperti periklanan, promosi dan sponsorship menurut produknya.

Aspek: Keleluasaan Pribadi (privacy) Pelanggan

- PR8 Jumlah keseluruhan dari pengaduan yang berdasar tentang pelanggaran keleluasaan pribadi (privacy) pelanggan dan hilangnya data pelanggan.

Aspek: Kepatuhan

- PR9 Nilai moneter dari denda pelanggaran hukum dan peraturan tentang pengadaan dan penggunaan produk dan jasa.

Lampiran 8. Hasil Uji Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
CSR	75	,22	,30	,2613	,02089
Kepemilikan_Manajerial	75	,00	,16	,0100	,03658
Kepemilikan_Institusional	75	,00	1,00	,5540	,22916
Komposisi_Komisaris_Independen	75	,00	,75	,3633	,15268
Nilai_Perusahaan	75	-2,06	15,25	2,4532	3,21457
Valid N (listwise)	75				

Lampiran 9. Hasil Uji Normalitas

NPar Tests

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardiz ed Residual
N		75
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,57835651
Most Extreme Differences	Absolute	,140
	Positive	,140
	Negative	-,077
Kolmogorov-Smirnov Z		1,211
Asymp. Sig. (2-tailed)		,107

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Lampiran 10. Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients ^a							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1							
(Constant)	-21,936	4,059		-5,405	,000		
CSR	91,188	15,115	,593	6,033	,000	,953	1,050
Kepemilikan_Manajerial	-19,842	8,721	-,226	-2,275	,026	,933	1,072
Kepemilikan_Institusional	1,257	1,363	,090	,922	,359	,974	1,027
Komposisi_Komisaris_Independen	,177	2,028	,008	,087	,931	,990	1,010

a. Dependent Variable: Nilai_Perusahaan

Lampiran 11. Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,597 ^a	,357	,320	2,65100	2,178

a. Predictors: (Constant), Komposisi_Komisaris_Independen, CSR, Kepemilikan_Institusional, Kepemilikan_Manajerial

b. Dependent Variable: Nilai_Perusahaan

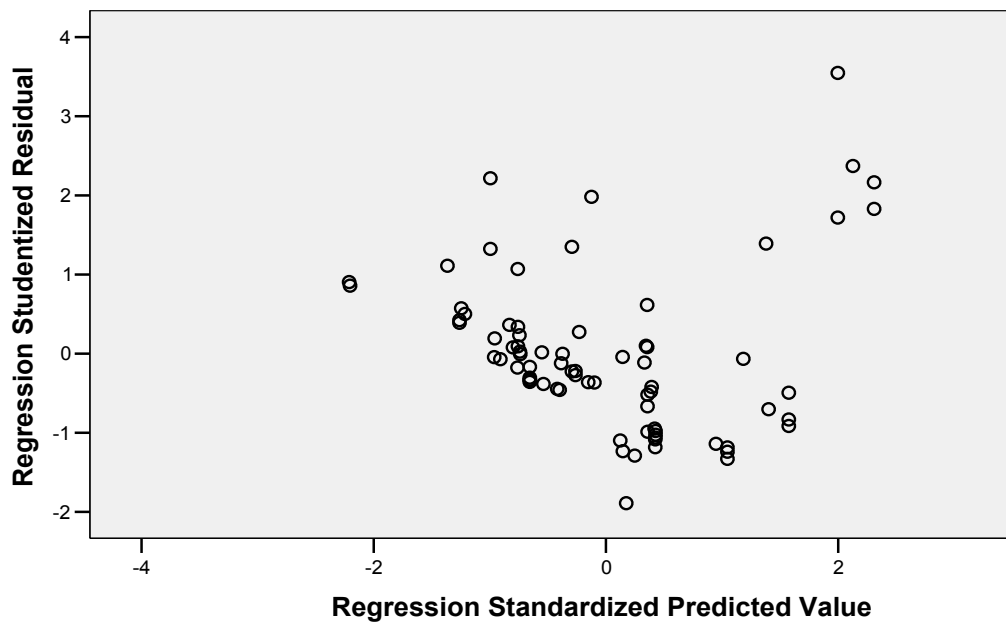
Lampiran 12. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	6,251	2,712		2,305
	CSR	-17,486	10,114	-,208	-,729
	Kepemilikan_Manajerial	8,909	6,499	,166	1,371
	Kepemilikan_Institusional	,267	,900	,035	,297
	Komposisi_Komisaris_Independen	,009	1,336	,001	,007

a. Dependent Variable: abs_res

Scatterplot

Dependent Variable: Nilai_Perusahaan



Lampiran 13. Hasil Uji Regresi Sederhana (Hipotesis 1)

Regression

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	CSR ^a	.	Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: Nilai_Perusahaan

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,543 ^a	,295	,285	2,71814

a. Predictors: (Constant), CSR

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	225,332	1	225,332	30,499	,000 ^a
	Residual	539,343	73	7,388		
	Total	764,675	74			

a. Predictors: (Constant), CSR

b. Dependent Variable: Nilai_Perusahaan

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-19,373	3,965		-4,886	,000
	CSR	83,532	15,126	,543	5,523	,000

a. Dependent Variable: Nilai_Perusahaan

Lampiran 14. Hasil Uji Regresi Sederhana (Hipotesis 2)

Regression

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Kepemilikan_Manajerial ^a	.	Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: Nilai_Perusahaan

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,109 ^a	,012	-,002	3,21725

a. Predictors: (Constant), Kepemilikan_Manajerial

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	9,074	1	9,074	,877	,352 ^a
	Residual	755,601	73	10,351		
	Total	764,675	74			

a. Predictors: (Constant), Kepemilikan_Manajerial

b. Dependent Variable: Nilai_Perusahaan

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2,549	,385		6,615	,000
	Kepemilikan_Manajerial	-9,573	10,224	-,109	-,936	,352

a. Dependent Variable: Nilai_Perusahaan

Lampiran 15. Hasil Uji Regresi Sederhana (Hipotesis 3)

Regression

Variables Entered/Removed^b

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Kepemilikan_Institusional ^a	.	Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: Nilai_Perusahaan

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,115 ^a	,013	,000	3,21512

a. Predictors: (Constant), Kepemilikan_Institusional

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	10,073	1	10,073	,974	,327 ^a
	Residual	754,603	73	10,337		
	Total	764,675	74			

a. Predictors: (Constant), Kepemilikan_Institusional

b. Dependent Variable: Nilai_Perusahaan

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1,561	,977		1,598	,114
	Kepemilikan_Institusional	1,610	1,631	,115	,987	,327

a. Dependent Variable: Nilai_Perusahaan

Lampiran 16. Hasil Uji Regresi Sederhana (Hipotesis 4)

Regression

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Komposisi_Komisaris_Independen ^a	.	Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: Nilai_Perusahaan

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,011 ^a	,00012	-,014	3,23632

a. Predictors: (Constant), Komposisi_Komisaris_Independen

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,092	1	,092	,009	,926 ^a
	Residual	764,584	73	10,474		
	Total	764,675	74			

a. Predictors: (Constant), Komposisi_Komisaris_Independen

b. Dependent Variable: Nilai_Perusahaan

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2,369	,970		2,443	,017
	Komposisi_Komisaris_Independen	,231	2,464	,011	,094	,926

a. Dependent Variable: Nilai_Perusahaan

Lampiran 17. Hasil Uji Regresi Berganda

Regression

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Komposisi_Komisaris_Independen, CSR, Kepemilikan_Institusional, Kepemilikan_Manajerial	.	Enter

- a. All requested variables entered.
b. Dependent Variable: Nilai_Perusahaan

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,597 ^a	,357	,320	2,65100

- a. Predictors: (Constant), Komposisi_Komisaris_Independen, CSR, Kepemilikan_Institusional, Kepemilikan_Manajerial

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	272,729	4	68,182	9,702	,000 ^a
	Residual	491,946	70	7,028		
	Total	764,675	74			

- a. Predictors: (Constant), Komposisi_Komisaris_Independen, CSR, Kepemilikan_Institusional, Kepemilikan_Manajerial
b. Dependent Variable: Nilai_Perusahaan

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-21,936	4,059		-5,405	,000
	CSR	91,188	15,115	,593	6,033	,000
	Kepemilikan_Manajerial	-19,842	8,721	-,226	-2,275	,026
	Kepemilikan_Institusional	1,257	1,363	,090	,922	,359
	Komposisi_Komisaris_Independen	,177	2,028	,008	,087	,931

- a. Dependent Variable: Nilai_Perusahaan

Lampiran 18. CSR 2012

N O	Kriteria csr	AD RO	AT PK	BUM I	BYA N	DE WA	DOI D	GT BO	HRU M	ITM G	KKG I	MY OH	PKP K	PTB A	PTR O	SMM T
1	Perolehan dan distribusi ekonomi langsung yang meliputi pendapatan, biaya operasi, imbalan jasa karyawan, donasi dan investasi komunitas lainnya, laba ditahan dan pembayaran kepada penyandang dana serta pemerintah.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2	Implikasi finansial dan risiko lainnya akibat perubahan iklim serta peluangnya bagi aktivitas organisasi.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
3	Jaminan kewajiban organisasi terhadap program imbalan pasti.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
4	Bantuan finansial yang signifikan dari pemerintah.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5	Rentang rasio standar upah terendah dibandingkan dengan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

	upah minimum setempat pada lokasi operasi yang signifikan.															
6	Kebijakan, praktik dan proporsi pengeluaran untuk pemasok lokal pada lokasi operasi yang signifikan.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7	Prosedur penerimaan pegawai lokal dan proporsi manajemen senior lokal yang dipekerjakan pada lokasi operasi yang signifikan.	√	X	√	X	X	√	√	X	√	√	√	√	√	√	√
8	Pembangunan dan dampak dari investasi infrastruktur serta jasa yang diberikan untuk kepentingan publik secara komersial dan natura.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
9	Pemahaman dan penjelasan dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan, termasuk seberapa luas dampaknya.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
10	Penggunaan Bahan;	√	X	√	X	√	X	√	X	X	X	√	X	√	√	X

	diperinci berdasarkan berat atau volume															
11	Persentase Penggunaan Bahan Daur Ulang.	√	X	X	X	√	X	√	X	X	X	√	X	√	X	X
12	Penggunaan Energi Langsung dari Sumberdaya Energi Primer.	√	X	√	X	√	X	√	X	X	X	√	X	X	√	X
13	Pemakaian Energi Tidak Langsung Berdasarkan Sumber Primer.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
14	Penghematan Energi melalui Konservasi dan Peningkatan Efisiensi.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
15	Inisiatif untuk mendapatkan produk dan jasa berbasis energi efisien atau energi yang dapat diperbarui serta pengurangan persyaratan kebutuhan energi sebagai akibat dari inisiatif tersebut.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
16	Inisiatif untuk mengurangi konsumsi energi tidak langsung dan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

	pengurangan yang dicapai.															
17	Total pengambilan air per sumber.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
18	Sumber air yang terpengaruh secara signifikan akibat pengambilan air.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
19	Persentase dan total volume air yang digunakan kembali dan didaur ulang.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
20	Lokasi dan ukuran tanah yang dimiliki, disewa dan dikelola oleh organisasi pelapor yang berlokasi di dalam atau yang berdekatan dengan daerah yang diproteksi (dilindungi) atau daerah-daerah yang memiliki nilai keanekaragaman hayati yang tinggi di luar daerah yang diproteksi.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
21	Uraian atas berbagai dampak signifikan yang diakibatkan oleh aktivitas, produk dan jasa organisasi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

	pelapor terhadap keanekaragaman hayati di daerah yang dilindungi dan daerah yang memiliki keanekaragaman hayati bernilai tinggi di luar daerah yang dilindungi.															
22	Perlindungan dan pemulihan habitat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
23	Strategi, tindakan dan rencana mendatang untuk mengelola dampak terhadap keanekaragaman hayati.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
24	Jumlah spesies berdasarkan tingkat risiko kepunahan yang masuk dalam Daftar Merah IUCN (IUCN Red List Species) dan yang termasuk dalam daftar konservasi nasional dengan habitat di daerah-daerah yang terkena dampak operasi.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
25	Jumlah emisi gas rumah kaca yang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

	bersifat langsung maupun tidak langsung dan dirinci berdasarkan berat.															
26	Emisi gas rumah kaca tidak langsung lainnya diperinci berdasarkan berat.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
27	Inisiatif untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan pencapaiannya.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
28	Emisi bahan kimia yang merusak lapisan Ozon (Ozone-depleting substances/ODS) diperinci berdasarkan berat.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
29	NOX, SOX dan emisi udara signifikan lainnya yang diperinci berdasarkan jenis dan berat.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
30	Jumlah buangan air menurut kualitas dan tujuan.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
31	Jumlah berat limbah menurut jenis dan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

	metode pembuangan.															
32	Jumlah dan volume tumpahan yang signifikan.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
33	Berat limbah yang diangkut, diimpor, diekspor atau diolah yang dianggap berbahaya menurut Lampiran Konservasi Basel I, II, III dan VIII serta persentase limbah yang diangkut secara internasional.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
34	Identitas, ukuran, status proteksi dan nilai keanekaragaman hayati badan air serta habitat terkait yang secara signifikan dipengaruhi oleh pembuangan dan limpasan air organisasi pelapor.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
35	Inisiatif untuk mengurangi dampak lingkungan produk dan jasa serta sejauh mana dampak pengurangan	√	√	√	√	X	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

	tersebut.															
36	Persentase produk terjual dan bahan kemasannya yang ditarik menurut kategori.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
37	Nilai moneter denda yang signifikan dan jumlah sanksi nonmoneter atas pelanggaran terhadap hukum dan regulasi lingkungan.	√	√	√	√	√	X	√	√	√	√	√	X	√	√	X
38	Dampak lingkungan yang signifikan akibat pemindahan produk dan barang-barang lain serta material yang digunakan untuk operasi perusahaan dan tenaga kerja yang memindahkan.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
39	Jumlah pengeluaran untuk proteksi dan investasi lingkungan menurut jenis.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
40	Jumlah angkatan kerja menurut jenis pekerjaan, kontrak pekerjaan dan wilayah.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

41	Jumlah dan tingkat perputaran karyawan menurut kelompok usia, jenis kelamin dan wilayah.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
42	Manfaat yang disediakan bagi karyawan tetap (purna waktu) yang tidak disediakan bagi karyawan tidak tetap (paruh waktu) menurut kegiatan pokoknya.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
43	Persentase karyawan yang dilindungi perjanjian tawar-menawar kolektif tersebut.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
44	Masa pemberitahuan minimal tentang perubahan kegiatan penting, termasuk apakah hal tersebut dijelaskan dalam perjanjian kolektif tersebut.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
45	Persentase jumlah angkatan kerja yang resmi diwakili dalam panitia Kesehatan dan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

	Keselamatan antara manajemen dan pekerja yang membantu memantau dan memberi nasihat untuk program keselamatan dan kesehatan jabatan.															
46	Tingkat kecelakaan fisik, penyakit karena jabatan, hari-hari yang hilang dan ketidakhadiran dan jumlah kematian karena pekerjaan menurut wilayah.	X	X	X	X	X	√	√	X	√	√	√	√	√	X	√
47	Program pendidikan, pelatihan, penyuluhan/bimbingan, pencegahan, pengendalian risiko setempat untuk membantu para karyawan, anggota keluarga dan masyarakat mengenai penyakit berat atau berbahaya.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
48	Masalah kesehatan dan keselamatan yang tercakup dalam perjanjian resmi	√	√	√	√	X	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

	dengan serikat karyawan.															
49	Rata-rata jam pelatihan tiap tahun tiap karyawan menurut kategori/kelompok karyawan.	√	√	√	√	X	√	√	√	√	√	X	√	√	√	√
50	Program untuk pengaturan keterampilan dan pembelajaran sepanjang hayat yang menunjang kelangsungan pekerjaan karyawan dan membantu mereka dalam mengatur akhir karier.	√	√	√	√	X	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
51	Persentase karyawan yang menerima peninjauan kinerja dan pengembangan karier secara teratur.	√	X	X	√	X	√	√	√	√	√	X	√	√	X	√
52	Komposisi badan pengelola/penguasa dan perincian karyawan tiap kategori/kelompok menurut jenis kelamin, kelompok, usia, keanggotaan kelompok minoritas dan keanekaragaman indikator	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

	lain.															
53	Perbandingan atau rasio gaji dasar pria terhadap wanita menurut kelompok atau kategori karyawan.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
54	Persentase dan jumlah perjanjian investasi signifikan yang memuat klausul HAM atau telah menjalani proses skrining/filtrasi terkait dengan aspek hak asasi manusia.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
55	Persentase pemasok dan kontraktor signifikan yang telah menjalani proses skrining/filtrasi aspek hak asasi manusia.	X	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
56	Jumlah waktu pelatihan bagi karyawan dalam hal mengenai kebijakan dan prosedur yang berakitan dengan aspek HAM yang sesuai dengan kegiatan organisasi, termasuk persentase karyawan yang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

	telah menjalani pelatihan.															
57	Jumlah kasus diskriminasi yang terjadi dan tindakan yang diambil/dilakukan.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
58	Segala kegiatan berserikat dan berkumpul yang teridentifikasi dapat menimbulkan risiko yang signifikan serta tindakan yang diambil untuk mendukung hak-hak tersebut.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
59	Kegiatan yang teridentifikasi mengandung risiko yang signifikan dapat menimbulkan terjadinya kasus pekerja anak dan langkah-langkah yang diambil untuk mendukung upaya penghapusan pekerja anak.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
60	Kegiatan yang teridentifikasi mengandung risiko yang signifikan dapat menimbulkan kasus kerja	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

	paksa atau kerja wajib dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mendukung upaya penghapusan kerja paksa atau kerja wajib.															
61	Persentase personel penjaga keamanan yang terlatih dalam hal kebijakan dan prosedur organisasi terkait dengan aspek HAM yang sesuai dengan kegiatan organisasi.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
62	Jumlah kasus pelanggaran yang terkait dengan hak penduduk asli dan langkah-langkah yang diambil.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
63	Sifat dasar, ruang lingkup dan keefektifan setiap program dan praktik yang dilakukan untuk menilai dan mengelola dampak operasi terhadap masyarakat, baik pada saat memulai, beroperasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

	maupun mengakhiri.															
64	Persentase dan jumlah unit usaha yang memiliki risiko terhadap korupsi.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
65	Persentase pegawai yang dilatih dalam kebijakan dan prosedur antikorupsi.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
66	Tindakan yang diambil dalam menanggapi kejadian korupsi.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
67	Kedudukan kebijakan publik dan partisipasi dalam proses melobi dan pembuatan kebijakan publik.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
68	Nilai kontribusi finansial dan natura kepada partai politik, politisi dan institusi terkait berdasarkan negara dimana perusahaan beroperasi.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
69	Jumlah tindakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan anti persaingan,	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

	anti trust, praktik monopoli dan sanksinya.															
70	Nilai uang dari denda signifikan dan jumlah sanksi nonmoneter untuk pelanggaran hukum dan peraturan yang dilakukan.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
71	Tahapan daur hidup dimana dampak produk dan jasa yang menyangkut kesehatan dan keamanan dinilai untuk penyempurnaan dan persentase dari kategori produk dan jasa yang penting dan harus mengikuti prosedur tersebut.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
72	Jumlah pelanggaran terhadap peraturan dan etika mengenai dampak kesehatan dan keselamatan suatu produk dan jasa selama daur hidup per produk.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

73	Jenis informasi produk dan jasa yang dipersyaratkan oleh prosedur dan persentase produk serta jasa yang signifikan berkaitan dengan informasi yang dipersyaratkan tersebut.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
74	Jumlah pelanggaran peraturan dan voluntary codes mengenai penyediaan informasi produk dan jasa serta pemberian label per produk.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
75	Praktik yang berkaitan dengan kepuasan pelanggan termasuk hasil survei yang mengukur kepuasan pelanggan.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
76	Program-program untuk ketaatan pada hukum, standar dan voluntary codes yang terkait dengan komunikasi pemasaran, seperti periklanan,	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

	promosi dan sponsorship.															
77	Jumlah pelanggaran peraturan dan voluntary codes sukarela mengenai komunikasi pemasaran, seperti periklanan, promosi dan sponsorship menurut produknya.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
78	Jumlah keseluruhan dari pengaduan yang berdasar tentang pelanggaran keleluasaan pribadi (privacy) pelanggan dan hilangnya data pelanggan.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
79	Nilai moneter dari denda pelanggaran hukum dan peraturan tentang pengadaan dan penggunaan produk dan jasa.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Jumlah	22	18	21	19	17	20	24	19	21	21	22	20	23	21	20

CSR 2013

N O	Kriteria csr	AD RO	ATP K	BUM I	BYA N	DE WA	DOI D	GTB O	HR UM	ITM G	KKG I	MYO H	PKP K	PTB A	PTR O	SMM T
1	Perolehan dan distribusi ekonomi langsung yang meliputi pendapatan, biaya operasi, imbalan jasa karyawan, donasi dan investasi komunitas lainnya, laba ditahan dan pembayaran kepada penyandang dana serta pemerintah.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2	Implikasi finansial dan risiko lainnya akibat perubahan iklim serta peluangnya bagi aktivitas organisasi.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
3	Jaminan kewajiban organisasi terhadap program imbalan pasti.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
4	Bantuan finansial yang signifikan dari pemerintah.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5	Rentang rasio standar upah terendah dibandingkan dengan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

	upah minimum setempat pada lokasi operasi yang signifikan.															
6	Kebijakan, praktik dan proporsi pengeluaran untuk pemasok lokal pada lokasi operasi yang signifikan.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7	Prosedur penerimaan pegawai lokal dan proporsi manajemen senior lokal yang dipekerjakan pada lokasi operasi yang signifikan.	√	X	√	X	X	√	√	X	√	√	√	√	√	√	√
8	Pembangunan dan dampak dari investasi infrastruktur serta jasa yang diberikan untuk kepentingan publik secara komersial dan natura.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
9	Pemahaman dan penjelasan dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan, termasuk seberapa luas dampaknya.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
10	Penggunaan Bahan;	√	X	√	X	√	X	X	X	X	X	√	X	√	√	√

	diperinci berdasarkan berat atau volume															
11	Persentase Penggunaan Bahan Daur Ulang.	√	X	X	X	√	X	X	X	X	X	√	X	√	X	√
12	Penggunaan Energi Langsung dari Sumberdaya Energi Primer.	√	X	√	X	√	X	X	X	X	X	√	X	X	√	√
13	Pemakaian Energi Tidak Langsung Berdasarkan Sumber Primer.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
14	Penghematan Energi melalui Konservasi dan Peningkatan Efisiensi.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
15	Inisiatif untuk mendapatkan produk dan jasa berbasis energi efisien atau energi yang dapat diperbarui serta pengurangan persyaratan kebutuhan energi sebagai akibat dari inisiatif tersebut.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
16	Inisiatif untuk mengurangi konsumsi energi tidak langsung dan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

	pengurangan yang dicapai.															
17	Total pengambilan air per sumber.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
18	Sumber air yang terpengaruh secara signifikan akibat pengambilan air.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
19	Persentase dan total volume air yang digunakan kembali dan didaur ulang.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
20	Lokasi dan ukuran tanah yang dimiliki, disewa dan dikelola oleh organisasi pelapor yang berlokasi di dalam atau yang berdekatan dengan daerah yang diproteksi (dilindungi) atau daerah-daerah yang memiliki nilai keanekaragaman hayati yang tinggi di luar daerah yang diproteksi.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
21	Uraian atas berbagai dampak signifikan yang diakibatkan oleh aktivitas, produk dan jasa organisasi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

	pelapor terhadap keanekaragaman hayati di daerah yang dilindungi dan daerah yang memiliki keanekaragaman hayati bernilai tinggi di luar daerah yang dilindungi.															
22	Perlindungan dan pemulihan habitat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
23	Strategi, tindakan dan rencana mendatang untuk mengelola dampak terhadap keanekaragaman hayati.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
24	Jumlah spesies berdasarkan tingkat risiko kepunahan yang masuk dalam Daftar Merah IUCN (IUCN Red List Species) dan yang termasuk dalam daftar konservasi nasional dengan habitat di daerah-daerah yang terkena dampak operasi.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
25	Jumlah emisi gas rumah kaca yang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

	bersifat langsung maupun tidak langsung dan dirinci berdasarkan berat.															
26	Emisi gas rumah kaca tidak langsung lainnya diperinci berdasarkan berat.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
27	Inisiatif untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan pencapaiannya.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
28	Emisi bahan kimia yang merusak lapisan Ozon (Ozone-depleting substances/ODS) diperinci berdasarkan berat.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
29	NOX, SOX dan emisi udara signifikan lainnya yang diperinci berdasarkan jenis dan berat.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
30	Jumlah buangan air menurut kualitas dan tujuan.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
31	Jumlah berat limbah menurut jenis dan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

	metode pembuangan.															
32	Jumlah dan volume tumpahan yang signifikan.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
33	Berat limbah yang diangkut, diimpor, diekspor atau diolah yang dianggap berbahaya menurut Lampiran Konservasi Basel I, II, III dan VIII serta persentase limbah yang diangkut secara internasional.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
34	Identitas, ukuran, status proteksi dan nilai keanekaragaman hayati badan air serta habitat terkait yang secara signifikan dipengaruhi oleh pembuangan dan limpasan air organisasi pelapor.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
35	Inisiatif untuk mengurangi dampak lingkungan produk dan jasa serta sejauh mana dampak pengurangan	√	√	√	√	X	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

	tersebut.															
36	Persentase produk terjual dan bahan kemasannya yang ditarik menurut kategori.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
37	Nilai moneter denda yang signifikan dan jumlah sanksi nonmoneter atas pelanggaran terhadap hukum dan regulasi lingkungan.	√	√	√	√	√	X	√	√	√	√	√	X	√	√	√
38	Dampak lingkungan yang signifikan akibat pemindahan produk dan barang-barang lain serta material yang digunakan untuk operasi perusahaan dan tenaga kerja yang memindahkan.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
39	Jumlah pengeluaran untuk proteksi dan investasi lingkungan menurut jenis.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
40	Jumlah angkatan kerja menurut jenis pekerjaan, kontrak pekerjaan dan wilayah.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

41	Jumlah dan tingkat perputaran karyawan menurut kelompok usia, jenis kelamin dan wilayah.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
42	Manfaat yang disediakan bagi karyawan tetap (purna waktu) yang tidak disediakan bagi karyawan tidak tetap (paruh waktu) menurut kegiatan pokoknya.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
43	Persentase karyawan yang dilindungi perjanjian tawar-menawar kolektif tersebut.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
44	Masa pemberitahuan minimal tentang perubahan kegiatan penting, termasuk apakah hal tersebut dijelaskan dalam perjanjian kolektif tersebut.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
45	Persentase jumlah angkatan kerja yang resmi diwakili dalam panitia Kesehatan dan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

	Keselamatan antara manajemen dan pekerja yang membantu memantau dan memberi nasihat untuk program keselamatan dan kesehatan jabatan.															
46	Tingkat kecelakaan fisik, penyakit karena jabatan, hari-hari yang hilang dan ketidakhadiran dan jumlah kematian karena pekerjaan menurut wilayah.	X	X	X	X	X	√	√	X	√	√	√	√	√	X	√
47	Program pendidikan, pelatihan, penyuluhan/bimbingan, pencegahan, pengendalian risiko setempat untuk membantu para karyawan, anggota keluarga dan masyarakat mengenai penyakit berat atau berbahaya.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
48	Masalah kesehatan dan keselamatan yang tercakup dalam perjanjian resmi	√	√	√	√	X	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

	dengan serikat karyawan.															
49	Rata-rata jam pelatihan tiap tahun tiap karyawan menurut kategori/kelompok karyawan.	√	√	√	√	X	√	√	√	√	√	X	√	√	√	√
50	Program untuk pengaturan keterampilan dan pembelajaran sepanjang hayat yang menunjang kelangsungan pekerjaan karyawan dan membantu mereka dalam mengatur akhir karier.	√	√	√	√	X	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
51	Persentase karyawan yang menerima peninjauan kinerja dan pengembangan karier secara teratur.	√	X	X	√	X	X	X	√	√	√	X	√	√	X	√
52	Komposisi badan pengelola/penguasa dan perincian karyawan tiap kategori/kelompok menurut jenis kelamin, kelompok, usia, keanggotaan kelompok minoritas dan keanekaragaman indikator	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

	lain.															
53	Perbandingan atau rasio gaji dasar pria terhadap wanita menurut kelompok atau kategori karyawan.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
54	Persentase dan jumlah perjanjian investasi signifikan yang memuat klausul HAM atau telah menjalani proses skrining/filtrasi terkait dengan aspek hak asasi manusia.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
55	Persentase pemasok dan kontraktor signifikan yang telah menjalani proses skrining/filtrasi aspek hak asasi manusia.	X	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
56	Jumlah waktu pelatihan bagi karyawan dalam hal mengenai kebijakan dan prosedur yang berakitan dengan aspek HAM yang sesuai dengan kegiatan organisasi, termasuk persentase karyawan yang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

	telah menjalani pelatihan.															
57	Jumlah kasus diskriminasi yang terjadi dan tindakan yang diambil/dilakukan.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
58	Segala kegiatan berserikat dan berkumpul yang teridentifikasi dapat menimbulkan risiko yang signifikan serta tindakan yang diambil untuk mendukung hak-hak tersebut.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
59	Kegiatan yang teridentifikasi mengandung risiko yang signifikan dapat menimbulkan terjadinya kasus pekerja anak dan langkah-langkah yang diambil untuk mendukung upaya penghapusan pekerja anak.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
60	Kegiatan yang teridentifikasi mengandung risiko yang signifikan dapat menimbulkan kasus kerja	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

	paksa atau kerja wajib dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mendukung upaya penghapusan kerja paksa atau kerja wajib.															
61	Persentase personel penjaga keamanan yang terlatih dalam hal kebijakan dan prosedur organisasi terkait dengan aspek HAM yang sesuai dengan kegiatan organisasi.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
62	Jumlah kasus pelanggaran yang terkait dengan hak penduduk asli dan langkah-langkah yang diambil.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
63	Sifat dasar, ruang lingkup dan keefektifan setiap program dan praktik yang dilakukan untuk menilai dan mengelola dampak operasi terhadap masyarakat, baik pada saat memulai, beroperasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

	maupun mengakhiri.															
64	Persentase dan jumlah unit usaha yang memiliki risiko terhadap korupsi.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
65	Persentase pegawai yang dilatih dalam kebijakan dan prosedur antikorupsi.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
66	Tindakan yang diambil dalam menanggapi kejadian korupsi.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
67	Kedudukan kebijakan publik dan partisipasi dalam proses melobi dan pembuatan kebijakan publik.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
68	Nilai kontribusi finansial dan natura kepada partai politik, politisi dan institusi terkait berdasarkan negara dimana perusahaan beroperasi.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
69	Jumlah tindakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan anti persaingan,	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

	anti trust, praktik monopoli dan sanksinya.															
70	Nilai uang dari denda signifikan dan jumlah sanksi nonmoneter untuk pelanggaran hukum dan peraturan yang dilakukan.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
71	Tahapan daur hidup dimana dampak produk dan jasa yang menyangkut kesehatan dan keamanan dinilai untuk penyempurnaan dan persentase dari kategori produk dan jasa yang penting dan harus mengikuti prosedur tersebut.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
72	Jumlah pelanggaran terhadap peraturan dan etika mengenai dampak kesehatan dan keselamatan suatu produk dan jasa selama daur hidup per produk.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

73	Jenis informasi produk dan jasa yang dipersyaratkan oleh prosedur dan persentase produk serta jasa yang signifikan berkaitan dengan informasi yang dipersyaratkan tersebut.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
74	Jumlah pelanggaran peraturan dan voluntary codes mengenai penyediaan informasi produk dan jasa serta pemberian label per produk.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
75	Praktik yang berkaitan dengan kepuasan pelanggan termasuk hasil survei yang mengukur kepuasan pelanggan.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
76	Program-program untuk ketaatan pada hukum, standar dan voluntary codes yang terkait dengan komunikasi pemasaran, seperti periklanan,	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

	promosi dan sponsorship.															
77	Jumlah pelanggaran peraturan dan voluntary codes sukarela mengenai komunikasi pemasaran, seperti periklanan, promosi dan sponsorship menurut produknya.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
78	Jumlah keseluruhan dari pengaduan yang berdasar tentang pelanggaran keleluasaan pribadi (privacy) pelanggan dan hilangnya data pelanggan.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
79	Nilai moneter dari denda pelanggaran hukum dan peraturan tentang pengadaan dan penggunaan produk dan jasa.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Jumlah	22	18	21	19	17	19	20	19	21	21	22	20	23	21	24

CSR 2014

N O	Kriteria csr	AD RO	ATP K	BUM I	BYA N	DE WA	DOI D	GTB O	HR UM	ITM G	KKG I	MYO H	PKP K	PTB A	PTR O	SMM T
1	Perolehan dan distribusi ekonomi langsung yang meliputi pendapatan, biaya operasi, imbalan jasa karyawan, donasi dan investasi komunitas lainnya, laba ditahan dan pembayaran kepada penyandang dana serta pemerintah.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2	Implikasi finansial dan risiko lainnya akibat perubahan iklim serta peluangnya bagi aktivitas organisasi.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
3	Jaminan kewajiban organisasi terhadap program imbalan pasti.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
4	Bantuan finansial yang signifikan dari pemerintah.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5	Rentang rasio standar upah terendah dibandingkan dengan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

	upah minimum setempat pada lokasi operasi yang signifikan.															
6	Kebijakan, praktik dan proporsi pengeluaran untuk pemasok lokal pada lokasi operasi yang signifikan.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7	Prosedur penerimaan pegawai lokal dan proporsi manajemen senior lokal yang dipekerjakan pada lokasi operasi yang signifikan.	√	X	√	√	X	√	√	X	√	√	√	√	√	√	√
8	Pembangunan dan dampak dari investasi infrastruktur serta jasa yang diberikan untuk kepentingan publik secara komersial dan natura.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
9	Pemahaman dan penjelasan dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan, termasuk seberapa luas dampaknya.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
10	Penggunaan Bahan;	√	X	√	√	√	X	X	X	X	X	√	X	√	√	√

	diperinci berdasarkan berat atau volume															
11	Persentase Penggunaan Bahan Daur Ulang.	√	X	X	√	√	X	X	X	X	X	√	X	√	X	√
12	Penggunaan Energi Langsung dari Sumberdaya Energi Primer.	√	X	√	√	√	X	X	X	X	X	√	X	X	√	√
13	Pemakaian Energi Tidak Langsung Berdasarkan Sumber Primer.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
14	Penghematan Energi melalui Konservasi dan Peningkatan Efisiensi.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
15	Inisiatif untuk mendapatkan produk dan jasa berbasis energi efisien atau energi yang dapat diperbarui serta pengurangan persyaratan kebutuhan energi sebagai akibat dari inisiatif tersebut.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
16	Inisiatif untuk mengurangi konsumsi energi tidak langsung dan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

	pengurangan yang dicapai.															
17	Total pengambilan air per sumber.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
18	Sumber air yang terpengaruh secara signifikan akibat pengambilan air.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
19	Persentase dan total volume air yang digunakan kembali dan didaur ulang.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
20	Lokasi dan ukuran tanah yang dimiliki, disewa dan dikelola oleh organisasi pelapor yang berlokasi di dalam atau yang berdekatan dengan daerah yang diproteksi (dilindungi) atau daerah-daerah yang memiliki nilai keanekaragaman hayati yang tinggi di luar daerah yang diproteksi.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
21	Uraian atas berbagai dampak signifikan yang diakibatkan oleh aktivitas, produk dan jasa organisasi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

	pelapor terhadap keanekaragaman hayati di daerah yang dilindungi dan daerah yang memiliki keanekaragaman hayati bernilai tinggi di luar daerah yang dilindungi.															
22	Perlindungan dan pemulihan habitat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
23	Strategi, tindakan dan rencana mendatang untuk mengelola dampak terhadap keanekaragaman hayati.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
24	Jumlah spesies berdasarkan tingkat risiko kepunahan yang masuk dalam Daftar Merah IUCN (IUCN Red List Species) dan yang termasuk dalam daftar konservasi nasional dengan habitat di daerah-daerah yang terkena dampak operasi.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
25	Jumlah emisi gas rumah kaca yang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

	bersifat langsung maupun tidak langsung dan dirinci berdasarkan berat.															
26	Emisi gas rumah kaca tidak langsung lainnya diperinci berdasarkan berat.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
27	Inisiatif untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan pencapaiannya.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
28	Emisi bahan kimia yang merusak lapisan Ozon (Ozone-depleting substances/ODS) diperinci berdasarkan berat.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
29	NOX, SOX dan emisi udara signifikan lainnya yang diperinci berdasarkan jenis dan berat.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
30	Jumlah buangan air menurut kualitas dan tujuan.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
31	Jumlah berat limbah menurut jenis dan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

	metode pembuangan.															
32	Jumlah dan volume tumpahan yang signifikan.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
33	Berat limbah yang diangkut, diimpor, diekspor atau diolah yang dianggap berbahaya menurut Lampiran Konservasi Basel I, II, III dan VIII serta persentase limbah yang diangkut secara internasional.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
34	Identitas, ukuran, status proteksi dan nilai keanekaragaman hayati badan air serta habitat terkait yang secara signifikan dipengaruhi oleh pembuangan dan limpasan air organisasi pelapor.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
35	Inisiatif untuk mengurangi dampak lingkungan produk dan jasa serta sejauh mana dampak pengurangan	√	√	√	√	X	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

	tersebut.															
36	Persentase produk terjual dan bahan kemasannya yang ditarik menurut kategori.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
37	Nilai moneter denda yang signifikan dan jumlah sanksi nonmoneter atas pelanggaran terhadap hukum dan regulasi lingkungan.	√	√	√	√	√	X	√	√	√	√	√	X	√	√	√
38	Dampak lingkungan yang signifikan akibat pemindahan produk dan barang-barang lain serta material yang digunakan untuk operasi perusahaan dan tenaga kerja yang memindahkan.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
39	Jumlah pengeluaran untuk proteksi dan investasi lingkungan menurut jenis.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
40	Jumlah angkatan kerja menurut jenis pekerjaan, kontrak pekerjaan dan wilayah.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

41	Jumlah dan tingkat perputaran karyawan menurut kelompok usia, jenis kelamin dan wilayah.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
42	Manfaat yang disediakan bagi karyawan tetap (purna waktu) yang tidak disediakan bagi karyawan tidak tetap (paruh waktu) menurut kegiatan pokoknya.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
43	Persentase karyawan yang dilindungi perjanjian tawar-menawar kolektif tersebut.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
44	Masa pemberitahuan minimal tentang perubahan kegiatan penting, termasuk apakah hal tersebut dijelaskan dalam perjanjian kolektif tersebut.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
45	Persentase jumlah angkatan kerja yang resmi diwakili dalam panitia Kesehatan dan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

	Keselamatan antara manajemen dan pekerja yang membantu memantau dan memberi nasihat untuk program keselamatan dan kesehatan jabatan.															
46	Tingkat kecelakaan fisik, penyakit karena jabatan, hari-hari yang hilang dan ketidakhadiran dan jumlah kematian karena pekerjaan menurut wilayah.	X	X	X	X	X	√	√	X	√	√	√	√	√	X	√
47	Program pendidikan, pelatihan, penyuluhan/bimbingan, pencegahan, pengendalian risiko setempat untuk membantu para karyawan, anggota keluarga dan masyarakat mengenai penyakit berat atau berbahaya.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
48	Masalah kesehatan dan keselamatan yang tercakup dalam perjanjian resmi	√	√	√	√	X	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

	dengan serikat karyawan.															
49	Rata-rata jam pelatihan tiap tahun tiap karyawan menurut kategori/kelompok karyawan.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	X	√	√	√	√
50	Program untuk pengaturan keterampilan dan pembelajaran sepanjang hayat yang menunjang kelangsungan pekerjaan karyawan dan membantu mereka dalam mengatur akhir karier.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
51	Persentase karyawan yang menerima peninjauan kinerja dan pengembangan karier secara teratur.	√	X	X	√	X	√	X	√	√	√	X	√	√	X	√
52	Komposisi badan pengelola/penguasa dan perincian karyawan tiap kategori/kelompok menurut jenis kelamin, kelompok, usia, keanggotaan kelompok minoritas dan keanekaragaman indikator	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

	lain.															
53	Perbandingan atau rasio gaji dasar pria terhadap wanita menurut kelompok atau kategori karyawan.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
54	Persentase dan jumlah perjanjian investasi signifikan yang memuat klausul HAM atau telah menjalani proses skrining/filtrasi terkait dengan aspek hak asasi manusia.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
55	Persentase pemasok dan kontraktor signifikan yang telah menjalani proses skrining/filtrasi aspek hak asasi manusia.	X	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
56	Jumlah waktu pelatihan bagi karyawan dalam hal mengenai kebijakan dan prosedur yang berakitan dengan aspek HAM yang sesuai dengan kegiatan organisasi, termasuk persentase karyawan yang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

	telah menjalani pelatihan.															
57	Jumlah kasus diskriminasi yang terjadi dan tindakan yang diambil/dilakukan.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
58	Segala kegiatan berserikat dan berkumpul yang teridentifikasi dapat menimbulkan risiko yang signifikan serta tindakan yang diambil untuk mendukung hak-hak tersebut.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
59	Kegiatan yang teridentifikasi mengandung risiko yang signifikan dapat menimbulkan terjadinya kasus pekerja anak dan langkah-langkah yang diambil untuk mendukung upaya penghapusan pekerja anak.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
60	Kegiatan yang teridentifikasi mengandung risiko yang signifikan dapat menimbulkan kasus kerja	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

	paksa atau kerja wajib dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mendukung upaya penghapusan kerja paksa atau kerja wajib.															
61	Persentase personel penjaga keamanan yang terlatih dalam hal kebijakan dan prosedur organisasi terkait dengan aspek HAM yang sesuai dengan kegiatan organisasi.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
62	Jumlah kasus pelanggaran yang terkait dengan hak penduduk asli dan langkah-langkah yang diambil.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
63	Sifat dasar, ruang lingkup dan keefektifan setiap program dan praktik yang dilakukan untuk menilai dan mengelola dampak operasi terhadap masyarakat, baik pada saat memulai, beroperasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

	maupun mengakhiri.															
64	Persentase dan jumlah unit usaha yang memiliki risiko terhadap korupsi.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
65	Persentase pegawai yang dilatih dalam kebijakan dan prosedur antikorupsi.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
66	Tindakan yang diambil dalam menanggapi kejadian korupsi.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
67	Kedudukan kebijakan publik dan partisipasi dalam proses melobi dan pembuatan kebijakan publik.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
68	Nilai kontribusi finansial dan natura kepada partai politik, politisi dan institusi terkait berdasarkan negara dimana perusahaan beroperasi.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
69	Jumlah tindakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan anti persaingan,	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

	anti trust, praktik monopoli dan sanksinya.															
70	Nilai uang dari denda signifikan dan jumlah sanksi nonmoneter untuk pelanggaran hukum dan peraturan yang dilakukan.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
71	Tahapan daur hidup dimana dampak produk dan jasa yang menyangkut kesehatan dan keamanan dinilai untuk penyempurnaan dan persentase dari kategori produk dan jasa yang penting dan harus mengikuti prosedur tersebut.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
72	Jumlah pelanggaran terhadap peraturan dan etika mengenai dampak kesehatan dan keselamatan suatu produk dan jasa selama daur hidup per produk.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

73	Jenis informasi produk dan jasa yang dipersyaratkan oleh prosedur dan persentase produk serta jasa yang signifikan berkaitan dengan informasi yang dipersyaratkan tersebut.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
74	Jumlah pelanggaran peraturan dan voluntary codes mengenai penyediaan informasi produk dan jasa serta pemberian label per produk.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
75	Praktik yang berkaitan dengan kepuasan pelanggan termasuk hasil survei yang mengukur kepuasan pelanggan.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
76	Program-program untuk ketaatan pada hukum, standar dan voluntary codes yang terkait dengan komunikasi pemasaran, seperti periklanan,	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

	promosi dan sponsorship.															
77	Jumlah pelanggaran peraturan dan voluntary codes sukarela mengenai komunikasi pemasaran, seperti periklanan, promosi dan sponsorship menurut produknya.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
78	Jumlah keseluruhan dari pengaduan yang berdasar tentang pelanggaran keleluasaan pribadi (privacy) pelanggan dan hilangnya data pelanggan.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
79	Nilai moneter dari denda pelanggaran hukum dan peraturan tentang pengadaan dan penggunaan produk dan jasa.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Jumlah	22	18	21	23	19	20	20	19	21	21	22	20	23	21	24

CSR 2015

N O	Kriteria csr	AD RO	ATP K	BUM I	BYA N	DE WA	DOI D	GTB O	HR UM	ITM G	KKG I	MYO H	PKP K	PTB A	PTR O	SMM T
1	Perolehan dan distribusi ekonomi langsung yang meliputi pendapatan, biaya operasi, imbalan jasa karyawan, donasi dan investasi komunitas lainnya, laba ditahan dan pembayaran kepada penyandang dana serta pemerintah.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2	Implikasi finansial dan risiko lainnya akibat perubahan iklim serta peluangnya bagi aktivitas organisasi.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
3	Jaminan kewajiban organisasi terhadap program imbalan pasti.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
4	Bantuan finansial yang signifikan dari pemerintah.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5	Rentang rasio standar upah terendah dibandingkan dengan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

	upah minimum setempat pada lokasi operasi yang signifikan.															
6	Kebijakan, praktik dan proporsi pengeluaran untuk pemasok lokal pada lokasi operasi yang signifikan.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7	Prosedur penerimaan pegawai lokal dan proporsi manajemen senior lokal yang dipekerjakan pada lokasi operasi yang signifikan.	√	X	√	√	X	√	√	X	√	√	√	√	√	√	√
8	Pembangunan dan dampak dari investasi infrastruktur serta jasa yang diberikan untuk kepentingan publik secara komersial dan natura.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
9	Pemahaman dan penjelasan dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan, termasuk seberapa luas dampaknya.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
10	Penggunaan Bahan;	√	X	√	√	√	X	X	X	X	X	√	X	X	√	X

	diperinci berdasarkan berat atau volume															
11	Persentase Penggunaan Bahan Daur Ulang.	√	X	X	√	√	X	X	X	X	X	√	X	X	X	X
12	Penggunaan Energi Langsung dari Sumberdaya Energi Primer.	√	X	√	√	√	X	X	X	X	X	√	X	X	√	X
13	Pemakaian Energi Tidak Langsung Berdasarkan Sumber Primer.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
14	Penghematan Energi melalui Konservasi dan Peningkatan Efisiensi.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
15	Inisiatif untuk mendapatkan produk dan jasa berbasis energi efisien atau energi yang dapat diperbarui serta pengurangan persyaratan kebutuhan energi sebagai akibat dari inisiatif tersebut.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
16	Inisiatif untuk mengurangi konsumsi energi tidak langsung dan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

	pengurangan yang dicapai.															
17	Total pengambilan air per sumber.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
18	Sumber air yang terpengaruh secara signifikan akibat pengambilan air.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
19	Persentase dan total volume air yang digunakan kembali dan didaur ulang.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
20	Lokasi dan ukuran tanah yang dimiliki, disewa dan dikelola oleh organisasi pelapor yang berlokasi di dalam atau yang berdekatan dengan daerah yang diproteksi (dilindungi) atau daerah-daerah yang memiliki nilai keanekaragaman hayati yang tinggi di luar daerah yang diproteksi.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
21	Uraian atas berbagai dampak signifikan yang diakibatkan oleh aktivitas, produk dan jasa organisasi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

	pelapor terhadap keanekaragaman hayati di daerah yang dilindungi dan daerah yang memiliki keanekaragaman hayati bernilai tinggi di luar daerah yang dilindungi.															
22	Perlindungan dan pemulihan habitat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
23	Strategi, tindakan dan rencana mendatang untuk mengelola dampak terhadap keanekaragaman hayati.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
24	Jumlah spesies berdasarkan tingkat risiko kepunahan yang masuk dalam Daftar Merah IUCN (IUCN Red List Species) dan yang termasuk dalam daftar konservasi nasional dengan habitat di daerah-daerah yang terkena dampak operasi.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
25	Jumlah emisi gas rumah kaca yang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

	bersifat langsung maupun tidak langsung dan dirinci berdasarkan berat.															
26	Emisi gas rumah kaca tidak langsung lainnya diperinci berdasarkan berat.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
27	Inisiatif untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan pencapaiannya.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
28	Emisi bahan kimia yang merusak lapisan Ozon (Ozone-depleting substances/ODS) diperinci berdasarkan berat.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
29	NOX, SOX dan emisi udara signifikan lainnya yang diperinci berdasarkan jenis dan berat.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
30	Jumlah buangan air menurut kualitas dan tujuan.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
31	Jumlah berat limbah menurut jenis dan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

	metode pembuangan.															
32	Jumlah dan volume tumpahan yang signifikan.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
33	Berat limbah yang diangkut, diimpor, diekspor atau diolah yang dianggap berbahaya menurut Lampiran Konservasi Basel I, II, III dan VIII serta persentase limbah yang diangkut secara internasional.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
34	Identitas, ukuran, status proteksi dan nilai keanekaragaman hayati badan air serta habitat terkait yang secara signifikan dipengaruhi oleh pembuangan dan limpasan air organisasi pelapor.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
35	Inisiatif untuk mengurangi dampak lingkungan produk dan jasa serta sejauh mana dampak pengurangan	√	√	√	√	X	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

	tersebut.															
36	Persentase produk terjual dan bahan kemasannya yang ditarik menurut kategori.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
37	Nilai moneter denda yang signifikan dan jumlah sanksi nonmoneter atas pelanggaran terhadap hukum dan regulasi lingkungan.	√	√	√	√	√	X	√	√	√	√	√	X	√	√	X
38	Dampak lingkungan yang signifikan akibat pemindahan produk dan barang-barang lain serta material yang digunakan untuk operasi perusahaan dan tenaga kerja yang memindahkan.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
39	Jumlah pengeluaran untuk proteksi dan investasi lingkungan menurut jenis.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
40	Jumlah angkatan kerja menurut jenis pekerjaan, kontrak pekerjaan dan wilayah.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

41	Jumlah dan tingkat perputaran karyawan menurut kelompok usia, jenis kelamin dan wilayah.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
42	Manfaat yang disediakan bagi karyawan tetap (purna waktu) yang tidak disediakan bagi karyawan tidak tetap (paruh waktu) menurut kegiatan pokoknya.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
43	Persentase karyawan yang dilindungi perjanjian tawar-menawar kolektif tersebut.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
44	Masa pemberitahuan minimal tentang perubahan kegiatan penting, termasuk apakah hal tersebut dijelaskan dalam perjanjian kolektif tersebut.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
45	Persentase jumlah angkatan kerja yang resmi diwakili dalam panitia Kesehatan dan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

	Keselamatan antara manajemen dan pekerja yang membantu memantau dan memberi nasihat untuk program keselamatan dan kesehatan jabatan.															
46	Tingkat kecelakaan fisik, penyakit karena jabatan, hari-hari yang hilang dan ketidakhadiran dan jumlah kematian karena pekerjaan menurut wilayah.	X	X	X	√	X	√	√	X	√	√	√	√	√	X	√
47	Program pendidikan, pelatihan, penyuluhan/bimbingan, pencegahan, pengendalian risiko setempat untuk membantu para karyawan, anggota keluarga dan masyarakat mengenai penyakit berat atau berbahaya.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
48	Masalah kesehatan dan keselamatan yang tercakup dalam perjanjian resmi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

	dengan serikat karyawan.															
49	Rata-rata jam pelatihan tiap tahun tiap karyawan menurut kategori/kelompok karyawan.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	X	√	X	√	√
50	Program untuk pengaturan keterampilan dan pembelajaran sepanjang hayat yang menunjang kelangsungan pekerjaan karyawan dan membantu mereka dalam mengatur akhir karier.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
51	Persentase karyawan yang menerima peninjauan kinerja dan pengembangan karier secara teratur.	√	X	X	√	X	X	X	√	√	√	X	√	X	X	√
52	Komposisi badan pengelola/penguasa dan perincian karyawan tiap kategori/kelompok menurut jenis kelamin, kelompok, usia, keanggotaan kelompok minoritas dan keanekaragaman indikator	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

	lain.															
53	Perbandingan atau rasio gaji dasar pria terhadap wanita menurut kelompok atau kategori karyawan.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
54	Persentase dan jumlah perjanjian investasi signifikan yang memuat klausul HAM atau telah menjalani proses skrining/filtrasi terkait dengan aspek hak asasi manusia.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
55	Persentase pemasok dan kontraktor signifikan yang telah menjalani proses skrining/filtrasi aspek hak asasi manusia.	X	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
56	Jumlah waktu pelatihan bagi karyawan dalam hal mengenai kebijakan dan prosedur yang berakitan dengan aspek HAM yang sesuai dengan kegiatan organisasi, termasuk persentase karyawan yang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

	telah menjalani pelatihan.															
57	Jumlah kasus diskriminasi yang terjadi dan tindakan yang diambil/dilakukan.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
58	Segala kegiatan berserikat dan berkumpul yang teridentifikasi dapat menimbulkan risiko yang signifikan serta tindakan yang diambil untuk mendukung hak-hak tersebut.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
59	Kegiatan yang teridentifikasi mengandung risiko yang signifikan dapat menimbulkan terjadinya kasus pekerja anak dan langkah-langkah yang diambil untuk mendukung upaya penghapusan pekerja anak.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
60	Kegiatan yang teridentifikasi mengandung risiko yang signifikan dapat menimbulkan kasus kerja	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

	paksa atau kerja wajib dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mendukung upaya penghapusan kerja paksa atau kerja wajib.															
61	Persentase personel penjaga keamanan yang terlatih dalam hal kebijakan dan prosedur organisasi terkait dengan aspek HAM yang sesuai dengan kegiatan organisasi.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
62	Jumlah kasus pelanggaran yang terkait dengan hak penduduk asli dan langkah-langkah yang diambil.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
63	Sifat dasar, ruang lingkup dan keefektifan setiap program dan praktik yang dilakukan untuk menilai dan mengelola dampak operasi terhadap masyarakat, baik pada saat memulai, beroperasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

	maupun mengakhiri.															
64	Persentase dan jumlah unit usaha yang memiliki risiko terhadap korupsi.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
65	Persentase pegawai yang dilatih dalam kebijakan dan prosedur antikorupsi.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
66	Tindakan yang diambil dalam menanggapi kejadian korupsi.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
67	Kedudukan kebijakan publik dan partisipasi dalam proses melobi dan pembuatan kebijakan publik.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
68	Nilai kontribusi finansial dan natura kepada partai politik, politisi dan institusi terkait berdasarkan negara dimana perusahaan beroperasi.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
69	Jumlah tindakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan anti persaingan,	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

	anti trust, praktik monopoli dan sanksinya.															
70	Nilai uang dari denda signifikan dan jumlah sanksi nonmoneter untuk pelanggaran hukum dan peraturan yang dilakukan.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
71	Tahapan daur hidup dimana dampak produk dan jasa yang menyangkut kesehatan dan keamanan dinilai untuk penyempurnaan dan persentase dari kategori produk dan jasa yang penting dan harus mengikuti prosedur tersebut.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
72	Jumlah pelanggaran terhadap peraturan dan etika mengenai dampak kesehatan dan keselamatan suatu produk dan jasa selama daur hidup per produk.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

73	Jenis informasi produk dan jasa yang dipersyaratkan oleh prosedur dan persentase produk serta jasa yang signifikan berkaitan dengan informasi yang dipersyaratkan tersebut.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
74	Jumlah pelanggaran peraturan dan voluntary codes mengenai penyediaan informasi produk dan jasa serta pemberian label per produk.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
75	Praktik yang berkaitan dengan kepuasan pelanggan termasuk hasil survei yang mengukur kepuasan pelanggan.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
76	Program-program untuk ketaatan pada hukum, standar dan voluntary codes yang terkait dengan komunikasi pemasaran, seperti periklanan,	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

	promosi dan sponsorship.															
77	Jumlah pelanggaran peraturan dan voluntary codes sukarela mengenai komunikasi pemasaran, seperti periklanan, promosi dan sponsorship menurut produknya.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
78	Jumlah keseluruhan dari pengaduan yang berdasar tentang pelanggaran keleluasaan pribadi (privacy) pelanggan dan hilangnya data pelanggan.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
79	Nilai moneter dari denda pelanggaran hukum dan peraturan tentang pengadaan dan penggunaan produk dan jasa.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Jumlah	22	18	21	24	20	19	20	19	21	21	22	20	19	21	20

CSR 2016

N O	Kriteria csr	AD RO	ATP K	BUM I	BYA N	DE WA	DOI D	GTB O	HR UM	ITM G	KKG I	MYO H	PKP K	PTB A	PTR O	SMM T
1	Perolehan dan distribusi ekonomi langsung yang meliputi pendapatan, biaya operasi, imbalan jasa karyawan, donasi dan investasi komunitas lainnya, laba ditahan dan pembayaran kepada penyandang dana serta pemerintah.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2	Implikasi finansial dan risiko lainnya akibat perubahan iklim serta peluangnya bagi aktivitas organisasi.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
3	Jaminan kewajiban organisasi terhadap program imbalan pasti.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
4	Bantuan finansial yang signifikan dari pemerintah.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5	Rentang rasio standar upah terendah dibandingkan dengan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

	upah minimum setempat pada lokasi operasi yang signifikan.															
6	Kebijakan, praktik dan proporsi pengeluaran untuk pemasok lokal pada lokasi operasi yang signifikan.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7	Prosedur penerimaan pegawai lokal dan proporsi manajemen senior lokal yang dipekerjakan pada lokasi operasi yang signifikan.	√	X	√	√	X	√	√	X	√	√	√	√	√	√	√
8	Pembangunan dan dampak dari investasi infrastruktur serta jasa yang diberikan untuk kepentingan publik secara komersial dan natura.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
9	Pemahaman dan penjelasan dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan, termasuk seberapa luas dampaknya.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
10	Penggunaan Bahan;	√	X	√	√	√	√	X	X	X	X	√	X	X	√	X

	diperinci berdasarkan berat atau volume															
11	Persentase Penggunaan Bahan Daur Ulang.	√	X	X	√	√	√	X	X	X	X	√	X	X	X	X
12	Penggunaan Energi Langsung dari Sumberdaya Energi Primer.	√	X	√	√	√	√	√	X	X	X	√	X	X	√	X
13	Pemakaian Energi Tidak Langsung Berdasarkan Sumber Primer.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
14	Penghematan Energi melalui Konservasi dan Peningkatan Efisiensi.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
15	Inisiatif untuk mendapatkan produk dan jasa berbasis energi efisien atau energi yang dapat diperbarui serta pengurangan persyaratan kebutuhan energi sebagai akibat dari inisiatif tersebut.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
16	Inisiatif untuk mengurangi konsumsi energi tidak langsung dan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

	pengurangan yang dicapai.															
17	Total pengambilan air per sumber.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
18	Sumber air yang terpengaruh secara signifikan akibat pengambilan air.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
19	Persentase dan total volume air yang digunakan kembali dan didaur ulang.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
20	Lokasi dan ukuran tanah yang dimiliki, disewa dan dikelola oleh organisasi pelapor yang berlokasi di dalam atau yang berdekatan dengan daerah yang diproteksi (dilindungi) atau daerah-daerah yang memiliki nilai keanekaragaman hayati yang tinggi di luar daerah yang diproteksi.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
21	Uraian atas berbagai dampak signifikan yang diakibatkan oleh aktivitas, produk dan jasa organisasi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

	pelapor terhadap keanekaragaman hayati di daerah yang dilindungi dan daerah yang memiliki keanekaragaman hayati bernilai tinggi di luar daerah yang dilindungi.															
22	Perlindungan dan pemulihan habitat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
23	Strategi, tindakan dan rencana mendatang untuk mengelola dampak terhadap keanekaragaman hayati.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
24	Jumlah spesies berdasarkan tingkat risiko kepunahan yang masuk dalam Daftar Merah IUCN (IUCN Red List Species) dan yang termasuk dalam daftar konservasi nasional dengan habitat di daerah-daerah yang terkena dampak operasi.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
25	Jumlah emisi gas rumah kaca yang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

	bersifat langsung maupun tidak langsung dan dirinci berdasarkan berat.															
26	Emisi gas rumah kaca tidak langsung lainnya diperinci berdasarkan berat.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
27	Inisiatif untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan pencapaiannya.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
28	Emisi bahan kimia yang merusak lapisan Ozon (Ozone-depleting substances/ODS) diperinci berdasarkan berat.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
29	NOX, SOX dan emisi udara signifikan lainnya yang diperinci berdasarkan jenis dan berat.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
30	Jumlah buangan air menurut kualitas dan tujuan.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
31	Jumlah berat limbah menurut jenis dan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

	metode pembuangan.															
32	Jumlah dan volume tumpahan yang signifikan.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
33	Berat limbah yang diangkut, diimpor, diekspor atau diolah yang dianggap berbahaya menurut Lampiran Konservasi Basel I, II, III dan VIII serta persentase limbah yang diangkut secara internasional.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
34	Identitas, ukuran, status proteksi dan nilai keanekaragaman hayati badan air serta habitat terkait yang secara signifikan dipengaruhi oleh pembuangan dan limpasan air organisasi pelapor.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
35	Inisiatif untuk mengurangi dampak lingkungan produk dan jasa serta sejauh mana dampak pengurangan	√	√	√	√	X	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

	tersebut.															
36	Persentase produk terjual dan bahan kemasannya yang ditarik menurut kategori.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
37	Nilai moneter denda yang signifikan dan jumlah sanksi nonmoneter atas pelanggaran terhadap hukum dan regulasi lingkungan.	√	√	√	√	√	X	√	√	√	√	√	X	√	√	X
38	Dampak lingkungan yang signifikan akibat pemindahan produk dan barang-barang lain serta material yang digunakan untuk operasi perusahaan dan tenaga kerja yang memindahkan.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
39	Jumlah pengeluaran untuk proteksi dan investasi lingkungan menurut jenis.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
40	Jumlah angkatan kerja menurut jenis pekerjaan, kontrak pekerjaan dan wilayah.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

41	Jumlah dan tingkat perputaran karyawan menurut kelompok usia, jenis kelamin dan wilayah.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
42	Manfaat yang disediakan bagi karyawan tetap (purna waktu) yang tidak disediakan bagi karyawan tidak tetap (paruh waktu) menurut kegiatan pokoknya.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
43	Persentase karyawan yang dilindungi perjanjian tawar-menawar kolektif tersebut.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
44	Masa pemberitahuan minimal tentang perubahan kegiatan penting, termasuk apakah hal tersebut dijelaskan dalam perjanjian kolektif tersebut.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
45	Persentase jumlah angkatan kerja yang resmi diwakili dalam panitia Kesehatan dan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

	Keselamatan antara manajemen dan pekerja yang membantu memantau dan memberi nasihat untuk program keselamatan dan kesehatan jabatan.															
46	Tingkat kecelakaan fisik, penyakit karena jabatan, hari-hari yang hilang dan ketidakhadiran dan jumlah kematian karena pekerjaan menurut wilayah.	X	X	X	√	X	√	√	X	√	√	√	√	√	X	√
47	Program pendidikan, pelatihan, penyuluhan/bimbingan, pencegahan, pengendalian risiko setempat untuk membantu para karyawan, anggota keluarga dan masyarakat mengenai penyakit berat atau berbahaya.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
48	Masalah kesehatan dan keselamatan yang tercakup dalam perjanjian resmi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

	dengan serikat karyawan.															
49	Rata-rata jam pelatihan tiap tahun tiap karyawan menurut kategori/kelompok karyawan.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	X	√	√	√	√
50	Program untuk pengaturan keterampilan dan pembelajaran sepanjang hayat yang menunjang kelangsungan pekerjaan karyawan dan membantu mereka dalam mengatur akhir karier.	√	√	√	√	√	√	X	√	√	√	√	√	√	√	√
51	Persentase karyawan yang menerima peninjauan kinerja dan pengembangan karier secara teratur.	√	X	X	√	X	√	X	√	√	√	X	√	X	X	√
52	Komposisi badan pengelola/penguasa dan perincian karyawan tiap kategori/kelompok menurut jenis kelamin, kelompok, usia, keanggotaan kelompok minoritas dan keanekaragaman indikator	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

	lain.															
53	Perbandingan atau rasio gaji dasar pria terhadap wanita menurut kelompok atau kategori karyawan.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
54	Persentase dan jumlah perjanjian investasi signifikan yang memuat klausul HAM atau telah menjalani proses skrining/filtrasi terkait dengan aspek hak asasi manusia.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
55	Persentase pemasok dan kontraktor signifikan yang telah menjalani proses skrining/filtrasi aspek hak asasi manusia.	X	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
56	Jumlah waktu pelatihan bagi karyawan dalam hal mengenai kebijakan dan prosedur yang berakitan dengan aspek HAM yang sesuai dengan kegiatan organisasi, termasuk persentase karyawan yang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

	telah menjalani pelatihan.															
57	Jumlah kasus diskriminasi yang terjadi dan tindakan yang diambil/dilakukan.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
58	Segala kegiatan berserikat dan berkumpul yang teridentifikasi dapat menimbulkan risiko yang signifikan serta tindakan yang diambil untuk mendukung hak-hak tersebut.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
59	Kegiatan yang teridentifikasi mengandung risiko yang signifikan dapat menimbulkan terjadinya kasus pekerja anak dan langkah-langkah yang diambil untuk mendukung upaya penghapusan pekerja anak.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
60	Kegiatan yang teridentifikasi mengandung risiko yang signifikan dapat menimbulkan kasus kerja	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

	paksa atau kerja wajib dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mendukung upaya penghapusan kerja paksa atau kerja wajib.															
61	Persentase personel penjaga keamanan yang terlatih dalam hal kebijakan dan prosedur organisasi terkait dengan aspek HAM yang sesuai dengan kegiatan organisasi.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
62	Jumlah kasus pelanggaran yang terkait dengan hak penduduk asli dan langkah-langkah yang diambil.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
63	Sifat dasar, ruang lingkup dan keefektifan setiap program dan praktik yang dilakukan untuk menilai dan mengelola dampak operasi terhadap masyarakat, baik pada saat memulai, beroperasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

	maupun mengakhiri.															
64	Persentase dan jumlah unit usaha yang memiliki risiko terhadap korupsi.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
65	Persentase pegawai yang dilatih dalam kebijakan dan prosedur antikorupsi.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
66	Tindakan yang diambil dalam menanggapi kejadian korupsi.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
67	Kedudukan kebijakan publik dan partisipasi dalam proses melobi dan pembuatan kebijakan publik.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
68	Nilai kontribusi finansial dan natura kepada partai politik, politisi dan institusi terkait berdasarkan negara dimana perusahaan beroperasi.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
69	Jumlah tindakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan anti persaingan,	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

	anti trust, praktik monopoli dan sanksinya.															
70	Nilai uang dari denda signifikan dan jumlah sanksi nonmoneter untuk pelanggaran hukum dan peraturan yang dilakukan.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
71	Tahapan daur hidup dimana dampak produk dan jasa yang menyangkut kesehatan dan keamanan dinilai untuk penyempurnaan dan persentase dari kategori produk dan jasa yang penting dan harus mengikuti prosedur tersebut.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
72	Jumlah pelanggaran terhadap peraturan dan etika mengenai dampak kesehatan dan keselamatan suatu produk dan jasa selama daur hidup per produk.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

73	Jenis informasi produk dan jasa yang dipersyaratkan oleh prosedur dan persentase produk serta jasa yang signifikan berkaitan dengan informasi yang dipersyaratkan tersebut.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
74	Jumlah pelanggaran peraturan dan voluntary codes mengenai penyediaan informasi produk dan jasa serta pemberian label per produk.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
75	Praktik yang berkaitan dengan kepuasan pelanggan termasuk hasil survei yang mengukur kepuasan pelanggan.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
76	Program-program untuk ketaatan pada hukum, standar dan voluntary codes yang terkait dengan komunikasi pemasaran, seperti periklanan,	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

	promosi dan sponsorship.															
77	Jumlah pelanggaran peraturan dan voluntary codes sukarela mengenai komunikasi pemasaran, seperti periklanan, promosi dan sponsorship menurut produknya.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
78	Jumlah keseluruhan dari pengaduan yang berdasar tentang pelanggaran keleluasaan pribadi (privacy) pelanggan dan hilangnya data pelanggan.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
79	Nilai moneter dari denda pelanggaran hukum dan peraturan tentang pengadaan dan penggunaan produk dan jasa.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Jumlah	22	18	21	24	20	23	20	19	21	21	22	20	20	21	20